

DIKTAT

METODE PENELITIAN HUKUM

Oleh :

Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Metode Penelitian Hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah. Metode Penelitian Hukum mutlak perlu dipahami oleh setiap mahasiswa hukum untuk dapat menulis sebuah karya ilmiah di bidang hukum yang disebut skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib ditulis oleh setiap mahasiswa hukum untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu Ilmu Hukum.

Diktat Metode Penelitian Hukum ini secara sengaja ditulis dengan tujuan untuk membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip penelitian pada umumnya dan penelitian hukum pada khususnya. Dalam diktat ini dibahas berbagai hal mengenai Ilmu Pengetahuan Hukum dan Metode Penelitian Hukum yang sangat perlu dipahami oleh para mahasiswa calon sarjana hukum. Di samping itu, pengetahuan dan atau ketrampilan melakukan penelitian hukum tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan akademik tetapi juga praktik. Dalam kenyataannya, kemampuan seorang sarjana dalam praktik hukum ternyata sangat terbantu jika menguasai pengetahuan dan ketrampilan penelitian hukum.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan bahwa isi diktat ini masih sangat sederhana karena disesuaikan dengan tujuan yakni untuk membantui para mahasiswa dalam memahami Metode Penelitian Hukum. Oleh karena itu, diktat ini masih memiliki kelemahan yang mudah-mudahan di kemudian hari dapat diperbaiki. Tiada gading yang tak retak. Demikian kata pepatah. Selamat membaca.

Jakarta, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Ilmu Pengetahuan	1
B. Pembagian Ilmu Pengetahuan Secara Garis Besar	18
C. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Praktis Normologis-Otoritatif	23
 BAB II DOGMATIKA HUKUM (ILMU HUKUM DALAM ARTI SEMPIT)	26
A. Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit	26
B. Ilmu-Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Kenyataan Hukum	46
 BAB III PENGERTIAN PENELITIAN SEBAGAI AKTIVITAS ILMIAH	50
A. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum	50
B. Masalah Sebagai Titik Tolak Penelitian	54
C. Metode Ilmiah	59
D. Tujuan Penelitian	63
E. Hubungan Penelitian dengan Ilmu Pengetahuan	64
F. Macam-macam Penelitian	65
 BAB IV BAHAN HUKUM DAN TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM	69
A. Pembagian Data Menurut Sumber dan Sifatnya	69
B. Data Dalam Penelitian Yuridis Dogmatis	71
C. Teknik Pengumpulan Data	75

BAB V PENELITIAN YURIDIS-NORMATIF	78
A. Pengertian Penelitian Yuridis-Normatif	78
B. Tipologi Penelitian Yuridis-Normatif	79
BAB VI PENELITIAN YURIDIS-EMPIRIS	124
A. Pengertian Metode Penelitian Yuridis-Empiris	124
B. Kerangka Teoretis, Kerangka Konsep dan Definisi Operasional	127
C. Hipotesa	131
D. Variabel	134
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	135
F. Teknik Analisis Data	136

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Ilmu Pengetahuan (*Science*) Dalam Tradisi *Saintisme* Barat

Ilmu Pengetahuan moderen yang berkembang dengan pesat pada jaman sekarang memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sebab, ilmu pengetahuan moderen tersebut merupakan hasil dari proses perkembangan pengetahuan umat manusia yang sudah berlangsung secara bertahap dalam beberapa abad. Ilmu pengetahuan moderen yang berkembang dengan sangat pesat tersebut merupakan hasil kerja keras bangsa-bangsa Eropa Barat. Namun, sepanjang yang dapat diketahui, bangsa-bangsa Eropa Barat mewarisi ilmu pengetahuan moderen tersebut dari bibit yang ditabur oleh bangsa Yunani Kuno beberapa abad sebelumnya. Plato dan Aristoteles adalah contoh ahli ilmu pengetahuan bangsa Yunani Kuno yang sangat besar sumbangsihnya terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan moderen. Oleh sebab itu, pengaruh pemikiran bangsa Yunani Kuno terhadap perkembangan ilmu pengetahuan moderen sangat besar dan tidak mungkin diabaikan. G.H. Sabine misalnya mengemukakan komentar sebagai berikut:

"... ajaran-ajaran sekolah Athena mempunyai peranan yang sama besarnya dalam kebudayaan Eropa sebagai halnya dengan kesenian dalam abad kelima. Sebab, sekolah-sekolah ini merupakan permulaan filsafat di Eropa, khusus dalam hubungannya dengan ilmu politik dan lain-lain ilmu kemasyarakatan. Dalam lapangan ini karya-karya Plato dan Aristoteles merupakan hasil yang pertama dari intelek Eropa yang tinggi mutunya..."¹

Karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh pemiki-pemikir bangsa Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang disinggung di atas mula-mula berkenaan dengan bidang filsafat. Sebab, pada zaman Yunani Kuno segenap gejala hendak dipahami secara hakiki dari sudut

¹ G.H. Sabine, *Teori-teori Politik, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terjemahan Soewarno Hadiatmodjo, (Jakarta, 1977), hlm. 36.

pandang filosofis. Hal itu mudah dipahami karena ilmu pengetahuan ilmiah dengan metodologi seperti dikenal pada jaman sekarang belum berkembang pada jaman Yunani Kuno. Hasil-hasil penyelidikan bangsa Yunani Kuno kemudian dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa menjadi ilmu pengetahuan moderen dengan mengubah metode pendekatannya yakni dari metode pendekatan yang bersifat filsafat menjadi metode pendekatan ilmiah.² Hal ini berarti bahwa yang menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan moderen adalah bangsa Yunani Kuno tetapi pengembangannya menjadi ilmu pengetahuan moderen dilakukan oleh bangsa Eropa seperti bangsa Jerman, Prancis, Belanda dan lain-lain.³

Ilmu pengetahuan moderen yang dikenal sekarang ini tentu saja sudah berbeda jauh kondisinya dari ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Yunani Kuno. Perbedaan itu berkenaan dengan dua macam hal. *Pertama*, perbedaan itu berkenaan dengan jumlah cabang ilmu pengetahuan yang semakin bertambah banyak (multiplikasi). Jika pada jaman Yunani Kuno, jumlah cabang ilmu pengetahuan dapat dihitung dengan jari tangan. Akan tetapi, pada jaman moderen jumlah cabang ilmu pengetahuan sudah berkembang dengan sangat pesat. *Kedua*, berkenaan dengan metodologi pendekatan yang dipergunakan oleh masing-masing cabang ilmu pengetahuan juga sudah semakin beraneka ragam. Pada jaman Yunani Kuno, segala fenomena baik fisik maupun non-fisik pada dasarnya ditanggapi dari metode pendekatan (perspektif) filsafat. Namun, pada zaman sekarang, setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metodologi pendekatan dan metode penelitian sendiri yang berbeda

² Pendekatan yang bersifat filsafat selalu pendekatan reflektif (perenungan) sedangkan pendekatan ilmiah selalu bersifat sistematis, metodis, logis dan rasional.

³ J.B. Raper, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*, (Jakarta, 2001), hlm. 25.

dengan metodologi cabang ilmu pengetahuan yang lain.⁴ Dengan perkataan lain, metodologi penelitian tiap cabang ilmu pengetahuan disesuaikan dengan karakteristik ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁵

Pengaruh bangsa-bangsa Eropa Barat terhadap ilmu pengetahuan moderen yang berkembang dewasa ini memang tidak dapat diingkari atau diabaikan. Sebagaimana dikemukakan, ilmu pengetahuan moderen dapat berkembang dengan pesat berkat jasa bangsa-bangsa Eropa. Oleh sebab itu, cara pandang dan tradisi berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat terhadap ilmu pengetahuan tetap melekat dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan (*science*) moderen. Salah satu aspek dari tradisi berfikir Eropa Barat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan seperti yang dikemukakan di atas berkaitan dengan pengertian dan hakikat ilmu pengetahuan.

Dalam tradisi berfikir bangsa-bangsa Eropa Barat, pada mulanya, ilmu pengetahuan (*science*) dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh hasil dari proses berfikir manusia yang telah teruji oleh data atau fakta-fakta yang diperoleh dari pengalaman manusia (*empiris*).⁶ Pengertian ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas dipengaruhi oleh keyakinan mengenai hakikat kebenaran. Dalam cara berfikir bangsa-bangsa Barat tersebut, kebenaran dianggap terletak pada pengalaman manusia yang dapat dipersepsi dengan pancaindera. Pengalaman dianggap sebagai ukuran bagi segala-galanya. Yang benar adalah yang dialami. Itulah salah satu prinsip ilmu pengetahuan moderen. Segala macam hal yang

⁴ Rumy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, 1990), hlm. 9.

⁵ *Ibid.*

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta, 2002), hlm. 99.

tidak dapat dibuktikan berdasarkan pengalaman manusia dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak benar atau tidak mengandung kebenaran.

Dalam pengalaman yang menjadi ukuran adalah data yaitu peristiwa atau perbuatan manusia sepanjang yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Sebagai konsekuensinya, tidak ada pengetahuan yang benar jika tidak dapat diuji dengan data. Jadi, sesuai dengan asumsi di atas, segala pengetahuan dapat dianggap benar hanya jika pengetahuan itu lolos dalam pengujian yang berdasarkan data atau fakta yang diperoleh dari pengalaman manusia. Dalam perspektif (sudut pandang) yang dikemukakan di atas, Teologi, Ilmu Hukum dan lain-lain dianggap bukan sebagai cabang ilmu pengetahuan (*science*) karena Teologi dan Ilmu Hukum tidak menyelidiki objek yang bersifat empiris (dalam bentuk kejadian atau perbuatan manusia).

Proses pengujian pengetahuan dengan data yang diperoleh dari pengalaman manusia disebut metode verifikasi. Maka, dalam tradisi berfikir Barat, metode verifikasi dianggap sebagai satu-satunya metode ilmiah yang diakui kesahihannya atau yang dapat menghasilkan kebenaran. Dengan perkataan lain, pengetahuan yang lolos dalam pengujian dengan berdasarkan metode verifikasi dianggap dapat menghasilkan ilmu pengetahuan yang diyakini mengandung kebenaran. Sebaliknya, jika pengetahuan tersebut tidak lolos dalam pengujian dengan berdasarkan metode verifikasi, pengetahuan itu dianggap tidak mengandung kebenaran atau bukan merupakan ilmu pengetahuan (*science*). Pengetahuan yang gagal dalam proses verifikasi tersebut tentu saja dianggap tidak mengandung kebenaran.

Pengetahuan yang tidak mengandung kebenaran dengan sendirinya dianggap tidak bersifat ilmiah. Untuk memperjelas pemahaman mengenai pengertian ilmu pengetahuan dengan metode verifikasi tersebut dapat dibuat suatu contoh yang sederhana seperti

dikemukakan di bawah ini. Seseorang dapat mengatakan "Semakin tinggi gaji yang diberikan kepada seseorang, semakin tinggi prestasi kerja orang tersebut." Sebaliknya, dapat dikemukakan "Semakin rendah gaji yang diberikan kepada seseorang, semakin rendah prestasi kerja orang tersebut." Pernyataan di atas belum dapat disebut sebagai pengetahuan jika belum diuji dengan data empiris. Pernyataan itu masih memerlukan pengujian sebelum meningkat derajatnya menjadi hukum-hukum alam, teori-teori sampai menjadi ilmu pengetahuan (*science*). Pengetahuan yang dikemukakan di atas menjadi hukum-hukum alam dan kemudian menjadi ilmu pengetahuan kalau dapat dibuktikan berdasarkan data empiris bahwa orang yang gajinya dinaikkan semakin meningkat prestasi kerjanya dan orang yang rendah gajinya cenderung lebih rendah prestasi kerjanya. Untuk membuktikan hal itu lalu dilakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data empiris yang dapat mendukung pernyataan di atas.

Pengetahuan yang telah teruji oleh data yang diperoleh dari pengalaman manusia menghasilkan hukum-hukum alam.⁷ Derajat kepastian hukum-hukum alam tersebut semakin meningkat jika hukum-hukum alam itu lolos dalam setiap ujian verifikasi yang dilaksanakan di kemudian hari. Secara perlahan-lahan, hukum-hukum alam tersebut akan bergerak menuju kepastian yang lebih tinggi sampai kemudian menjadi suatu teori ilmiah.⁸ Pada akhirnya, hukum-hukum alam menghasilkan teori-teori ilmiah. Teori-teori ilmiah dalam hubungannya satu sama lain akan membentuk suatu sistem ilmu pengetahuan.

Pandangan mengenai ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang sudah teruji berdasarkan metode verifikasi seperti dikemukakan di atas tentu saja akan memiliki

⁷ C. Verbeek dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, (Jakarta, 1989), hlm. 59.

⁸ *Ibid.*

kelemahan. Sebab, mustahil suatu metode ilmiah yang disebut verifikasi dapat diterapkan terhadap segala cabang ilmu pengetahuan yang berbeda objek kajiannya. Padahal, perbedaan objek mungkin saja akan mengakibatkan perbedaan metode ilmiah. Sebagai contoh, Ilmu Hukum memiliki objek kajian yang berbeda dengan Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam. Objek kajian Ilmu-ilmu Hukum adalah norma-norma hukum sebagai produk manusia yang dibuat secara sadar untuk mengatur kehidupan bersama. Objek kajian Ilmu-ilmu Alam adalah gejala-gejala alam seperti panas, dingin, angin dan sebagainya yang tentu saja bukan produk manusia sehingga pasti berbeda dari norma-norma hukum. Ilmu-ilmu Sosial menyelidiki gejala-gejala sosial yakni gejala-gejala yang terjadi dalam hubungan manusia seperti konflik sosial, kemiskinan dan sebagainya yang tentu saja juga berbeda dari norma-norma hukum. Oleh sebab itu, metode ilmiah yang diterapkan dalam Ilmu Hukum dengan sendirinya harus dibedakan dari metode ilmiah dalam Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Alam tersebut.

Pandangan mengenai hakikat ilmu pengetahuan dengan metode verifikasi menurut tradisi keilmuan Barat seperti dikemukakan di atas disebut *saintisme*. Saintisme adalah paham mengenai hakikat ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang sudah teruji oleh data empiris berdasarkan metode verifikasi. Saintisme lahir pada abad rasionalitas ketika orang mulai berani dan bersedia *mendunia* dengan melihat alam yang terbentang dihadapannya dengan pengamatan indrawi sebagai pengamatan-pengamatan logik juga.⁹ Artinya, manusia sudah berani memandang gejala-gejala alam sebagai gejala-gejala yang dapat dipahami oleh manusia berdasarkan akal-budinya. Gejala-gejala alam dipahami sebagai gejala yang dapat ditentangkan berdasarkan metode yang dapat diterima kebenarannya oleh akal manusia.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Penggunaan Metode Penelitian Menurut Tradisi Sains Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Sebuah Perbincangan tentang Masalah Teknis Operasional," (Makalah, tanpa tahun), hlm. 1.

Dengan perkataan lain, dalam saintisme, gejala-gejala alam yang empiris hendak dipahami oleh manusia secara rasionalitas atau ilmiah berdasarkan penjelasan-penjelasan yang masuk akal atau dapat diterima akal atau berdasarkan hukum-hukum yang bersifat rasional. Jadi, dalam saintisme, objek kajian ilmu pengetahuan dikonsepsikan sebagai objek-objek yang mungejala dalam alam pengalaman manusia atau indrawi (empiris) dan atau di dalam pengamatan yang kebenarannya dapat ditangkap secara indrawi (alam positif).¹⁰ Dalam hubungan dengan saintisme tersebut, Sunarjati Hartono mengemukakan "Memang yang sejak semula dianggap "Ilmu" atau "Science" hanyalah matematika dan Ilmu-ilmu Alam yang hasil penelitiannya dapat diulangi secara terbatas untuk dilihat dan diukur hasilnya (apabila hasil penelitian tersebut adalah benar dan objektif) akan selalu sama di mana pun penelitian atau percobaan atau eksperimen itu diadakan."¹¹

Pandangan mengenai hakikat ilmu pengetahuan seperti dikemukakan di atas tentu saja menimbulkan akibat yang lebih jauh terhadap cabang ilmu pengetahuan yang lain yang tidak memakai metode verifikasi. Sikap penolakan terhadap cabang ilmu pengetahuan lain di luar kelompok ilmu pengetahuan yang memakai metode verifikasi kemudian muncul. Ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi dianggap bukan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, mungkin dianggap sebagai ideologi, seni atau agama. Penolakan terhadap cabang ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi terjadi karena saintisme berkeyakinan bahwa metode verifikasi harus atau dapat diterapkan dalam segenap cabang ilmu pengetahuan. Dengan perkataan lain, saintisme sangat yakin bahwa metode verifikasi sebagai

¹⁰ Soetandyo Wigjosoebroto, *op. cit.*, hlm. 124.

¹¹ Sunarjati Hartono, "Kembali ke Metode Penelitian Hukum," (Makalah yang disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992), hlm. 3.

satu-satunya metode ilmiah yang dapat dipakai semua cabang ilmu pengetahuan baik ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya (ilmu-ilmu kemanusiaan). Sumartaji Hartono mengemukakan "... pemikiran dan penelitian di bidang-bidang lain, terutama yang menyangkut masyarakat dan kehidupan mental manusia, baik sebagai penerangan (psikologi) maupun di dalam masyarakat seperti Sejarah, Sosiologi, Hukum, Politik dan sebagainya tidak mungkin menghasilkan ilmu atau merupakan kegiatan ilmiah.¹²

Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang tidak memakai metode verifikasi adalah Ilmu Hukum. Sebab, Ilmu-ilmu Hukum tidak termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu alam ataupun ilmu-ilmu sosial. Dari segi objek materialnya, Ilmu-ilmu Hukum tidak mengkaji atau mempersoalkan gejala-gejala alam ataupun gejala-gejala sosial tetapi mengkaji dan mempersoalkan norma-norma hukum sebagai produk manusia. Oleh sebab itu, jika dipandang dari sudut objek kajiannya sangat jelas perbedaan antara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam. Ilmu-ilmu Hukum lebih cocok digolongkan ke dalam Ilmu-ilmu Kebudayaan atau Ilmu-ilmu Kemanusiaan yang objek materialnya adalah segenap hasil karya atau perbuatan manusia sebagai ungkapan dari hati nurani, pikiran dan perasaan manusia yang bersifat normatif.

Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempersoalkan gejala-gejala normatif sebagai ungkapan hati nurani, perasaan dan pikiran manusia dalam bentuk norma-norma hukum tentu saja metode verifikasi tidak cocok diterapkan dalam Ilmu-ilmu Hukum. Dengan perkataan lain, Ilmu-ilmu Hukum tidak dapat memakai metode verifikasi sebagai metode ilmiah karena sifat dan hakikat Ilmu-ilmu Hukum sebagai Ilmu-ilmu Budaya atau Ilmu-ilmu Kemanusiaan yang bersifat normatif. Ilmu-ilmu Hukum harus memiliki metode ilmiah yang

¹² Ibid.

berbeda dari metode ilmiah Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial sesuai dengan karakteristik Ilmu-ilmu Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sifat dan hakikatnya berbeda dari Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu-ilmu Alam. Ilmu-ilmu Hukum menolak metode verifikasi sebagai metode ilmiah. Sebagai akibat penolakan tersebut, Ilmu-ilmu Hukum dahulu dianggap bukan ilmu pengetahuan dalam tradisi berfikir saintisme atau tradisi keilmuan Barat.¹³ Metode ilmiah Ilmu-ilmu Hukum yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial membuat Ilmu-ilmu Hukum dianggap bukan pengetahuan ilmiah sehingga dianggap tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang benar.

Ilmu Hukum pada mulanya adalah pengetahuan mengenai hukum yang bersifat dogmatis sehingga dahulu disebut sebagai ajaran-ajaran tentang hukum (*rechtsdogmatiek*). Oleh karena itu, Ilmu Hukum dahulu lazim disebut sebagai Dogmatika Hukum.¹⁴ Sebagai dogma yang berkenaan dengan atau dogma tentang norma-norma hukum, Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat dogmatis tentang ajaran-ajaran mengenai hukum positif sebagai hukum yang ditetapkan oleh negara dan berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Pada zaman sekarang, Dogmatika hukum disebut juga sebagai Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit.¹⁵ Sebab, sesuai dengan perkembangan pada zaman sekarang, Dogmatika hukum adalah bagian dari Ilmu-ilmu Hukum dalam arti luas yang meliputi Ilmu Hukum Normatif, Ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Kenyataan Hukum.

¹³ Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Alih Bahasa : Arief B.Sidharta, (Bandung, 2003), hlm. 1 dan seterusnya.

¹⁴ Arief B.Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung, 1999), hlm. 122.

¹⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa : Arief B.Sidharta (Bandung, 1996), hlm. 161.

Objek kajian Dogmatika Hukum sebagai Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit adalah terutama hukum positif.¹⁶ Bagaimana pandangan Dogmatika Hukum terhadap hukum positif yang berlaku dalam suatu negara? Dogmatika Hukum memandang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat semata-mata sebagai suatu sistem norma atau kaidah yang ditetapkan oleh negara. Norma-norma hukum positif tersebut dianggap sebagai kaidah yang berfungsi untuk menuntun tingkah laku manusia. Sebagai kaidah penuntun perilaku, Dogmatika Hukum memandang norma-norma hukum sebagai bagian yang terpisah dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dengan perkataan lain, Dogmatika Hukum memandang norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu negara sebagai suatu tatanan (system) yang bersifat otonom (mandiri). Oleh sebab itu, Dogmatika Hukum sering disebut sebagai pengetahuan yang sistematis dan dogmatis tentang norma-norma hukum positif.

Dogmatika Hukum sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Hukum dalam arti luas membatasi kajiannya pada hal-ikhwal kandungan normatif yang terdapat dalam perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.¹⁷ Dalam hal ini berarti, Dogmatika Hukum sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Hukum menyelidiki materi-muatan yang terdapat dalam norma-norma hukum yang disebut sebagai kandungan normatif yaitu perintah, larangan, ijin, perbolehan, hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan dan sebagainya. Norma-norma hukum itu kalau tidak ditata dalam suatu tatanan yang bersistem tentu saja sangat mungkin bertentangan satu sama lain. Cara menata norma-norma hukum itu dalam suatu tatanan yang sistematis supaya tidak bertentangan satu sama lain merupakan objek

¹⁶ *Ibid.* hlm. 169.

¹⁷ Bandingkan dengan objek kajian Sosiologi Hukum menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam *op. cit.*

kajian dari Dogmatika Hukum. Bahkan, doktrin-doktrin hukum yang menjadi landasan penataan norma-norma hukum dalam suatu tatanan yang bersistem juga merupakan objek kajian Dogmatika Hukum.

Jika ditinjau dari sudut tujuannya, pada dasarnya, kegiatan Dogmatika Hukum diarahkan pada dua jurusan yaitu (a) kegiatan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan (b) kegiatan pengambilan keputusan hukum yang disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*).¹⁸ Kedua macam kegiatan tersebut sepiantas lalu seolah-olah merupakan kegiatan yang terpisah. Namun, dalam praktik, kedua macam kegiatan tersebut sangat berkaitan secara erat. Bahkan, dalam arti yang luas, kedua macam kegiatan tersebut dapat dianggap- sebagai suatu kegiatan yang secara prinsip adalah sama hanya berbeda pada tujuannya.

Kegiatan Dogmatika Hukum dalam rangka pembentukan hukum (*rechtsvorming*) bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang cara membentuk hukum atau undang-undang yang baik sebagai norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum supaya undang-undang atau norma-norma hukum itu tidak bertentangan satu sama lain. Kegiatan Dogmatika Hukum yang demikian berdekatan dengan kegiatan Ilmu Perundang-undangan. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi lembaga-lembaga pembentuk undang-undang seperti DPR dan DPRD.

Kegiatan Dogmatika Hukum dalam rangka penemuan hukum (*rechtsvinding*) bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pengambilan keputusan hukum yang baik dalam rangka menyelesaikan suatu masalah hukum yang konkrit. Dalam arti luas, kegiatan penemuan hukum sesungguhnya juga dapat dianggap merupakan kegiatan pembentukan hukum yang disinggung di atas. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan

¹⁸ Bruggink, *op. cit.*, hlm. 169.

yang sangat bermanfaat bagi lembaga pengadilan (hakim) dalam menetapkan vonis untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum. Hakim yang membuat vonis dapat dianggap sebagai badan pembentuk norma hukum meskipun dalam arti bahwa vonis tersebut merupakan norma hukum yang bersifat individual-konkrit yang berbeda dari karakteristik norma-norma hukum yang berbentuk undang-undang.

Kedua jenis kegiatan (pengembangan) Dogmatika Hukum yang dikemukakan di atas yaitu pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berlangsung dalam suatu tatanan hukum positif dan terikat pada satu tatanan hukum nasional.¹⁹ Kedua macam kegiatan tersebut di atas juga terikat pada asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum tertentu yang berlaku dalam suatu negara. Meskipun dalam kasus tertentu diperkenankan juga untuk mengacu pada asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku di negara lain. Dalam hal ini berarti bahwa pembentukan hukum (undang-undang) terikat kepada hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam suatu negara sehingga pembentukan suatu undang-undang tersebut tidak boleh menyimpang dari undang-undang atau norma-norma hukum yang sudah ada lebih dahulu dan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukumnya.

Demikian pula dengan kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu sengketa (masalah) hukum. Dalam penemuan hukum, hakim membuat putusan (vonis) untuk menyelesaikan persengketaan. Kegiatan hakim untuk membuat putusan (vonis) tersebut tidak boleh menyimpang dan atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dalam negara yang bersangkutan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Dalam rangka kedua kegiatan yang dikemukakan di atas,

¹⁹ *Ibid.*

pengetahuan tentang struktur tata hukum positif, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum adalah sangat penting.

Sesuai dengan uraian di atas jelas bahwa Dogmatika Hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk memberikan penyelesaian terhadap suatu masalah hukum yang konkret dengan berpedoman pada tata hukum atau sistem hukum, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Oleh karena itu, Dogmatika Hukum dapat dipandang sebagai pengetahuan hukum yang bersifat praktis yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah konkret di bidang hukum. Sesuai dengan sifat hakikatnya sebagai ilmu praktis, tentu saja metode pendekatan dan metode penelitian yang dipergunakan dalam Dogmatika Hukum berbeda dari metode pendekatan dan metode penelitian yang dipergunakan oleh Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam Dogmatika Hukum pada dasarnya harus metode pendekatan doktriner atau metode pendekatan normatif sesuai dengan objek kajian Dogmatika Hukum yaitu tatanan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukumnya. Tatanan hukum positif itu dianggap bersifat otonom dalam arti tidak terkait dengan tatanan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain sebagaimana sudah dikemukakan di atas.

Dalam perkembangan berikutnya, hukum ternyata tidak hanya dipelajari oleh Dogmatika Hukum. Cabang ilmu-ilmu pengetahuan lain seperti Sosiologi, Sejarah, Anthropologi, Psikologi, Perbandingan, Politik dan lain-lain juga tertarik mempelajari hukum. Namun, cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut melakukan pendekatan terhadap norma-norma hukum dengan bertitik tolak dari titik berdiri dan perspektif yang berbeda

dengan Ilmu Hukum.²⁰ Oleh sebab itu, muncul cabang ilmu-ilmu pengetahuan baru yang mempelajari hukum sebagai objek kajiannya seperti Politik Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum, Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum dan lain-lain.²¹ Menurut Sidharta, perkembangan minat (studi) terhadap hukum tersebut antara lain disebabkan oleh faktor (a) eksternal dan (b) internal.²²

Cara kerja cabang-cabang ilmu-ilmu hukum baru yang disebut di atas berbeda dari cara kerja Dogmatika Hukum. Masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum baru tersebut mengikuti cara kerja ilmu pengetahuan yang induknya seperti Sosiologi Hukum mengikuti metode pendekatan Sosiologi dan lain-lain. Dengan demikian, jelas dapat dipahami bahwa hukum menjadi objek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, tidak salah kalau Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan "Hukum bisa menjadi objek kajian dari pelbagai ilmu dengan pendekatan yang masing-masing berbeda sehingga kita bisa juga berbicara tentang Ilmu-ilmu Hukum."²³

Istilah Ilmu-ilmu Hukum yang dipergunakan Mochtar Kusumaatmadja tersebut menunjukkan bahwa Ilmu-ilmu Hukum sesungguhnya merupakan kumpulan (gabungan) dari berbagai cabang-cabang pengetahuan yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Dogmatika Hukum yang dibicarakan di atas hanya merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu

²⁰ Sidharta, "Mencari Alternatif Paradigma Penalaran Hukum Untuk Kepentingan Pembangunan Hukum Indonesia," (Makalah yang disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 2004), hlm. 417.

²¹ *Ibid.*, hlm. 427.

²² *Ibid.*

²³ Arief B. Sidharta, *Refleksi tentang Struktur . . . op. cit.*, hlm. 132.

pengetahuan hukum yang mempelajari hukum sebagai objeknya dalam arti hukum sebagai tata hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.

Masing-masing cabang ilmu pengetahuan hukum tersebut mempelajari hukum dari sudut pandang yang berbeda sesuai dengan pemaknaan tiap cabang ilmu pengetahuan terhadap hukum. Umpamanya, Sosiologi Hukum meneliti hukum tetapi hukum diartikan bukan sebagai sistem kaidah atau norma yang bersifat otonom melainkan sebagai perilaku yang sudah terpola. Dalam hal ini, para penstudi Sosiologi Hukum mempelajari hukum bukan sebagai partisipan atau peneliti yang berdiri dari titik berdiri internal melainkan sebagai pengamat karena berkedudukan sebagai peneliti yang berpijak dari titik berdiri eksternal.²⁴ Ilmu Politik mempelajari hukum juga tetapi hukum diartikan bukan sebagai norma melainkan hukum sebagai produk dari suatu keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa. Penstudi Ilmu Politik mempelajari hukum dari titik berdiri yang sama dengan penstudi sosiologi hukum yakni titik berdiri eksternal (pengamat). Demikian pula halnya dengan penstudi yang lain seperti penstudi Sejarah Hukum, Psikologi Hukum, Anthropologi Hukum dan lain-lain bertitik tolak dari titik berdiri eksternal.

Pemaknaan yang berbeda terhadap hukum seperti dikemukakan di atas membawa konsekuensi perbedaan terhadap titik berdiri dan perspektif penstudi hukum dalam mempelajari hukum. Ada penstudi hukum yang mempelajari hukum dari titik berdiri (sudut pandang) eksternal seperti cabang ilmu pengetahuan Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum atau Anthropologi Hukum. Dari titik berdiri eksternal, penstudi hukum bertindak sebagai pengamat (penonton yang bersifat pasif) dalam mempelajari hukum. Namun, ada pula penstudi hukum yang mempelajari hukum dari titik berdiri (sudut pandang) internal yakni

²⁴ Sidharta, *op. cit.*

Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Dari titik berdiri internal, penstudi hukum bertindak sebagai partisipan (pelaku yang bertindak aktif) dalam mempelajari hukum.

Perbedaan titik berdiri dalam mempelajari hukum seperti dikemukakan di atas dengan sendirinya berakibat terhadap perbedaan metode pendekatan dan metode penelitian yang dipergunakan oleh masing-masing cabang ilmu pengetahuan dalam mempelajari hukum. Tiap cabang ilmu pengetahuan dalam mempelajari hukum memiliki kerangka berfikir dan metode pendekatan yang berbeda serta mempergunakan metode penelitian yang berbeda pula dalam meneliti hukum. Penstudi hukum yang mengamati hukum dari titik berdiri eksternal yang bertindak sebagai pengamat atau penonton mengikuti pola pikir, metode pendekatan dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial dalam mempelajari hukum. Penstudi hukum yang meneliti hukum dari titik berdiri internal dan bertindak sebagai partisipan (pelaku aktif) mengikuti pola pikir logis-rasional, metode pendekatan dogmatis dan metode penelitian yang bersifat normatif. Jadi, pada tahap perkembangan sekarang, metode penelitian yang dipergunakan dalam meneliti hukum harus disesuaikan dengan cabang ilmu pengetahuan yang melakukan kajian terhadap hukum tersebut. Dalam hal penelitian hukum dilakukan dalam perspektif Ilmu Hukum (Dogmatika Hukum), metode penelitian yang dipergunakan harus bersifat doktriner atau normative. Akan tetapi, jika penelitian hukum dilakukan dalam perspektif Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Anthropologi Hukum dan Politik Hukum, metode penelitian yang dipergunakan harus metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial.

Sesuai dengan perkembangan tentang studi hukum yang telah dikemukakan sepintas lalu di atas, Ilmu Hukum dewasa ini bukan semata-mata Dogmatika Hukum. Sebab, ada cabang-cabang Ilmu Hukum di luar Dogmatika Hukum sehingga Ilmu-ilmu hukum dapat

dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu Ilmu Hukum Dogmatik dan Ilmu Hukum Empiris.²⁵

Ilmu Hukum Dogmatik atau Dogmatika Hukum meliputi semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari suatu tatanan hukum positif yang konkret. Ilmu Hukum Dogmatik memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi dan struktur kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukumnya. Penstudi hukum yang mencakup teoretisi seperti dosen maupun praktisi hukum seperti hakim atau jaksa yang hendak mempelajari tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia baik tentang isi maupun strukturnya beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukumnya merupakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup aktivitas Dogmatika Hukum.

Ilmu Hukum Empiris membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norma hukum. Gejala-gejala hukum dipandang bukan sebagai gejala normatif melainkan sebagai gejala empiris atau faktual yang murni yakni sebagai tingkah-laku yang sudah terbentuk (teratur). Gejala-gejala itu harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode-metode empiris. Hal ini berarti bahwa menurut pandangan Ilmu-ilmu Hukum Empiris, hukum bukanlah sistem norma atau kaidah yang memberikan tuntutan berperilaku yang seharusnya kepada manusia yang bersifat otonom melainkan bagian dari gejala-gejala kemasyarakatan. Sebagai gejala kemasyarakatan (fenomena sosial), menurut Ilmu-ilmu Hukum Empiris, hukum dengan demikian berkaitan dengan gejala ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

²⁵ D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum," *Pro Justitia*, Tahun XII, Nomor 4, (Oktober, 1994), hlm. 20.

Pengelompokan ilmu hukum ke dalam kedua kelompok seperti dikemukakan di atas tidak serta merta disepakati oleh segenap kalangan masyarakat hukum terutama kalangan ilmuwan hukum. Ada sebagian sarjana hukum yang beranggapan bahwa cabang-cabang Ilmu-ilmu Hukum seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum dianggap merupakan cabang ilmu-ilmu lain yang non-disiplin hukum sehingga dianggap bahwa istilah ilmu hukum empiris sebaiknya diganti menjadi ilmu-ilmu empiris yang mempelajari hukum atau yang berobjekkan hukum.²⁶ Di lain pihak, ada sebagian dari sarjana hukum yang beranggapan bahwa Sejarah Hukum, Politik Hukum, Sosiologi Hukum, Anthropologi Hukum, Psikologi Hukum merupakan bagian dari Ilmu-ilmu Hukum.

1.2. Pembagian Ilmu Pengetahuan Secara Garis Besar

Pengelompokan cabang-cabang Ilmu pengetahuan seperti yang dikenal pada zaman sekarang belum ada pada jaman dahulu karena ilmu pengetahuan bersifat satu kesatuan. Akan tetapi, setelah spesialisasi dikenal mulai timbul sifat pengkhususan dalam mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Sifat pengkhususan ini mengakibatkan kemunculan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang satu sama lain semakin jauh jaraknya. Proses multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan timbul akibat dorongan hasrat untuk melakukan spesialisasi sehingga menghasilkan cara kerja yang semakin teknis dan rumit. Cara kerja yang sangat teknis dan rumit tersebut hanya dapat dikuasai oleh masing-masing orang yang menekuni cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian, bagi orang lain, cara kerja yang sangat teknis dan rumit pada suatu cabang ilmu pengetahuan bagaikan rimba raya yang sangat lebat yang tidak mungkin dapat dijelajahi dan pahami atau dikuasai oleh awam.

²⁶ Sidharta, *op. cit.*

Proses multiplikasi cabang-cabang ilmu pengetahuan membuat cabang-cabang ilmu pengetahuan menjadi seperti tercerai-berai tanpa hubungan dan ikatan satu sama lain. Namun, dalam perkembangan berikut muncul niat untuk menggabungkan segenap cabang ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan metode ilmiah. Usaha penyatuan metode ilmiah ilmu pengetahuan tersebut ternyata mengalami kegagalan. Usaha yang gagal ini kemudian mendorong pengelompokan cabang-cabang ilmu pengetahuan dilakukan dari sudut pandang tertentu seperti dari sudut substansi, tujuan, metode dan lain-lain. Salah satu cara dalam membedakan cabang-cabang ilmu pengetahuan adalah pengelompokan dari segi substansinya. Berdasarkan pengelompokan berdasarkan substansinya, ilmu pengetahuan dapat dibedakan atas Ilmu-ilmu Formal dan Ilmu-ilmu Empiris.

Ilmu-ilmu Formal yang juga disebut ilmu-ilmu deduktif adalah ilmu pengetahuan yang tidak bertumpu pada pengalaman (empiris). Sebab, penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi Ilmu-ilmu Formal tidak didasarkan atas pengalaman seperti dalam ilmu-ilmu empirik. Ilmu-ilmu Formal menyelesaikan masalah didasarkan atas deduksi-deduksi (penjabaran-penjabaran).²⁷ Dalam rangka deduksi-deduksi itu, dalil-dalil dibuktikan kebenarannya bukan berdasarkan data empiris melainkan berdasarkan dalil-dalil lain. Dalam hal ini, berarti bahwa satu dalil hendak diteguhkan oleh dalil yang lain. Pada akhirnya, penjelasan atas suatu dalil akan berakhir pada dalil-dalil yang diterima kebenarannya walaupun tanpa bukti yang disebut aksioma-aksioma atau postulat-postulat.²⁸

Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan di atas kiranya mudah dipahami bahwa objek yang dipelajari oleh ilmu-ilmu formal adalah struktur logikal (penalaran) dan tidak

²⁷ Beerling, Kwee, Mooij, Van Veursen, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Alih bahasa Soemargono (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002), hlm. 23.

²⁸ *Ibid.* hlm. 77 dan seterusnya.

bermaksud untuk mengungkapkan, menjelaskan ataupun menunjuk pada kenyataan atau fakta empiris. Kebenaran dalam Ilmu Formal tidak memerlukan pembuktian atas dasar *verifikasi yang bersifat empiris* melainkan pembuktian *rasional* dan *konsistensi rasional*. Jadi, produk Ilmu Formal tidak dinilai berdasarkan kebenaran empiris dengan cara verifikasi melainkan berdasarkan *validitasnya* (keabsahan proses penalarannya). Ilmu Formal ini meliputi Logika dan Matematika.

Ilmu Empiris adalah cabang ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual dan karena itu bersumber pada pengalaman (empiris). Ilmu-ilmu empirik memperoleh atau menggali bahan-bahannya melalui pengalaman.²⁹ Kelompok ilmu-ilmu empirik dimaksudkan untuk menyajikan pernyataan-pernyataan atau penjelasan teoretis yang dapat diuji secara eksperimental atau empiris tentang proses yang terjadi dalam kenyataan. Kebenaran pengetahuan yang dihasilkan ilmu-ilmu empirik menuntut pembuktian empiris (metode verifikasi) selain pembuktian rasional dan sejauh mungkin konsistensi. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dengan kebenaran dalam kelompok ilmu empirik adalah korespondensi antara pernyataan dengan keterberian fakta empiris. Suatu pernyataan dianggap benar jika di dalam kenyataan terdapat bukti-bukti yang dapat mendukung pernyataan tersebut. Ilmu-ilmu Empiris disebut juga Ilmu-ilmu Positif dan terdiri atas Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Manusia.³⁰

Salah satu bagian dari Ilmu-ilmu Empiris adalah Ilmu-ilmu Alam. Ilmu-ilmu Alam mempelajari alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia sebagai objeknya. Ilmu-ilmu Alam berusaha menyelidiki gejala-gejala alam dengan rumus logika yang bersifat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 77 dan seterusnya.

kausal-deterministik. Bentuk penalaran atau kerangka pemikirannya dirumuskan dalam hukum yang bersifat keniscayaan yang pasti (jika . . . maka, . . .). Artinya, Ilmu-ilmu Alam beranggapan bahwa semua fenomena alam memiliki keterkaitan dengan peristiwa alam yang lain sehingga segenap gejala-gejala alam dapat diterangkan atas dasar hukum sebab-akibat yang deterministik atau sebab-akibat yang pasti atau tidak menyimpang. Misalnya, setiap besi yang dipanaskan memuai. Apa sebab besi memuai ? Pertanyaan ini dijawab dengan menyatakan bahwa panas yang membuat besi memuai. Menurut Ilmu-ilmu Alam, hubungan antara panas dan memuai adalah hubungan sebab-akibat yang bersifat pasti (deterministik). Metode penjelasan yang lazim dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam adalah metode penjelasan (*Erklaren*).

Ilmu-ilmu Manusia yang juga disebut sebagai Ilmu-ilmu Budaya mempelajari manusia sebagai subjek (bukan sebagai objek). Pengertian manusia sebagai subjek adalah manusia sebagai makhluk berhati nurani yang memiliki nilai, kemauan, perasaan dan akal budi. Sesuai dengan nurani, kemauan, perasaan dan akal budinya, manusia dapat (mampu) menentukan sikap atau memberikan reaksi sendiri terhadap segala sesuatu. Dengan perkataan lain, tindakan (perbuatan) manusia tidak dapat dipahami dan dijelaskan berdasarkan metode pendekatan sebab-akibat yang biasa dipakai dalam Ilmu-ilmu Alam. Gejala-gejala yang dipelajari Ilmu-Ilmu Budaya tidak dapat dijelaskan dengan berdasarkan hukum kausalitas deterministik yang berlaku secara niscaya (bersifat pasti atau tidak mungkin menyimpang) seperti dalam Ilmu-ilmu Alam. Metode penjelasan yang dipergunakan dalam Ilmu-ilmu Manusia adalah metode pemahaman atau *Verstehen*. Dalam metode pemahaman (*verstehen*), segenap gejala yang terjadi dianggap mengandung makna karena merupakan perwujudan dari perilaku manusia. Pemaknaan terhadap gejala-gejala sebagai manifestasi dari tindakan

manusia tidak dapat dijelaskan berdasarkan prinsip sebab-akibat. Sarana yang dapat dipakai untuk mengungkap makna yang tersembunyi dalam perbuatan manusia tersebut adalah penafsiran. Dalam hal ini, penafsiran yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi memiliki fungsi yang sangat penting. Penafsiran itu bertujuan untuk menentukan atau mengungkapkan makna yang tersembunyi (*latent*) dalam tindakan.

Dari sudut pandang fungsinya, ilmu pengetahuan dapat dibagi atas Ilmu-ilmu Teoretis dan Ilmu-ilmu Praktis. Ilmu Teoretis adalah ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan semata-mata. Tujuan Kelompok Ilmu Teoretis adalah untuk mengubah pengetahuan atau menambah pengetahuan tentang sesuatu objek atau gejala. Ilmu Formal dan Ilmu Empiris yang terdiri atas Logika, Matematika, Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Kemanusiaan sebagaimana dijelaskan di atas termasuk Ilmu Teoretis Ilmu.

Ilmu Praktis adalah ilmu yang mempelajari aktivitas penerapan ilmu itu sendiri sebagai objeknya. Kelompok Ilmu Praktis bertujuan untuk mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian terhadap suatu masalah konkret. Ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kelompok Ilmu Praktis adalah Etika, Teologi, Ilmu Teknik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Hukum, Ilmu Manajemen dan Ilmu Komunikasi. Kelompok Ilmu-ilmu Praktis dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Ilmu-ilmu Praktis Nomologis dan Ilmu Praktis Normologis.

Ilmu Praktis Nomologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual-empiris yakni pengetahuan tentang hubungan yang telah terpola (pasti) antara dua hal atau lebih berdasarkan asas (prinsip) kausalitas-deterministik. Produknya dapat diungkapkan dengan rumus "Jika A ada atau terjadi, maka B ada atau pasti terjadi." Ilmu-ilmu Pengetahuan yang termasuk dalam Kelompok Ilmu Praktis Nomologis adalah Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknik dan lain-lain.

Ilmu Praktis Normologis atau juga disebut Ilmu Normatif berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas *imputasi* atau asas yang menautkan tanggung jawab atau kewajiban' untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu sehubungan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Rumus logikanya adalah "Jika A ada, maka B seharusnya ada walaupun B mungkin dalam kenyataannya tidak ada." Ilmu Praktis Normologis antara lain terdiri atas Etika, Pedagogi dan Ilmu Hukum.

Ilmu-ilmu Praktis Normologis dapat dibagi atas dua bagian yaitu Ilmu Praktis Normologis yang otoritatif dan Ilmu Praktis Normologis yang non-otoritatif. Ilmu Praktis Normologis yang non-otoritatif antara lain adalah Etika dan Pedagogi. Ilmu Praktis Normologis yang bersifat otoritatif adalah Ilmu Hukum. Sebagai bagian dari Ilmu Praktis Normologis yang otoritatif, Ilmu Hukum mengkaji teks-teks otoritatif yaitu teks-teks yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga legislatif beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukumnya.

1.3. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Praktis Normologis Yang Otoritatif

Sebagaimana dikemukakan di atas, Ilmu Hukum adalah Ilmu Pengetahuan Praktis Normologis yang otoritatif. Objek kajian Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis Normologis yang otoritatif adalah kaedah-kaedah hukum. Kaidah-kaidah hukum itu sendiri dapat disebut sebagai teks otoritatif (teks yang berwibawa) karena ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang yakni negara (penguasa). Sebagai teks, kaidah-kaidah hukum bermuatan aturan-aturan hukum yang merupakan produk perundang-undangan, putusan-putusan hakim, hukum

tidak tertulis dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya (doktrin).³¹ Oleh karena itu, sasaran penelitian Ilmu Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan Praktis Normologis yang bersifat otoritatif seharusnya adalah hukum atau kaidah hukum.³² Pengertian kaidah hukum di sini meliputi asas hukum, kaidah hukum dalam arti norm, peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.³³ Sesuai dengan paparan di atas, penelitian hukum dalam arti meneliti kaidah-kaidah atau norma hukum disebut penelitian hukum normatif.³⁴

Apakah yang dilakukan oleh Ilmu Hukum terhadap kaidah hukum yang menjadi objek kajiannya? Kaedah hukum atau norma hukum diolah oleh Ilmu Hukum sesuai dengan metode ilmiah, metode pendekatan dan metode penelitiannya. Proses pengolahan kaidah hukum atau norma hukum sebagai objek kajian Ilmu Hukum tidak sama dengan Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Alam terhadap objek kajiannya seperti telah dikemukakan di atas. Proses pengolahan kaidah hukum atau norma hukum dilaksanakan sesuai dengan fungsi Ilmu Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan.

Apakah fungsi Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis Normologis? Jawaban terhadap pertanyaan yang dikemukakan di atas menentukan tindakan yang dilakukan oleh Ilmu Hukum terhadap norma-norma hukum. Ilmu Hukum bukan cabang ilmu pengetahuan yang berfungsi memberikan penjelasan kausal (sebab-akibat) terhadap gejala-gejala alam seperti ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial. Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memaknai norma-norma hukum dan menatanya dalam suatu kerangka sistem sehingga

³¹ Arief B. Sidharta, *Refleksi tentang Struktur . . . op. cit.*, hlm. 135.

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, 2001), hlm. 29.

³³ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁴ *Ibid.*

membentuk suatu tatanan hukum menurut asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum tertentu. Dalam hubungan dengan fungsi tersebut, Ilmu Hukum bertugas menghimpun, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu.³⁵

Ilmu Hukum tidak bertujuan untuk secara objektif dan teoretis-netral memperoleh pengetahuan dan menjelaskan gejala-gejala hukum secara kausal. Sebab, seperti dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja pada bagian sebelumnya, tujuan Ilmu Hukum positif adalah untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas hukum untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkan kaidah dan asas-asas hukum tersebut. Jadi, pengembangan Ilmu Hukum diarahkan pada penyelesaian masalah hukum konkrit sebagai masalah kemasyarakatan tertentu berdasarkan hukum positif tertentu. Dengan perkataan lain, pengembangan Ilmu Hukum adalah kegiatan mengantisipasi dan menawarkan penyelesaian masalah hukum yang konkret yang mungkin timbul dan harus dihadapi dalam masyarakat, baik yang dihadapi individu maupun masyarakat dalam kerangka tatanan hukum yang ada. Jika demikian halnya berarti bahwa pengetahuan mengenai masalah kaidah hukum, asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan sistem hukum merupakan hal yang mutlak harus dikuasai jika hendak melakukan penelitian hukum.

³⁵ Arief B. Sidharta, *Refleksi tentang Struktur . . . op. cit.*, hlm. 134.

BAB II

DOGMATIKA HUKUM (ILMU HUKUM DALAM ARTI SEMPIT) DAN ILMU HUKUM EMPIRIS SERTA ILMU KENYATAAN HUKUM

2.1. Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit

Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit bukan cabang ilmu pengetahuan seperti dimaksud saintisme yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat ajaran (dogma) tentang hukum. Soetandyo Wignyosoebroto dalam salah satu tulisannya berkenaan dengan pengertian ilmu hukum dalam arti sempit atau dogmatika hukum mengemukakan:

“Ilmu Hukum --- yang dalam Bahasa Inggris disebut *jurisprudence* --- adalah suatu cabang aktivitas intelektual manusia yang pertama-tama hendak berkenaan dengan objek garapannya yaitu berupa norma-norma. Norma, yang rasionalisasinya akan berupa ajaran atau doktrin yang disebut ajaran (atau yang dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut “leer” atau “Lehre”) bukanlah garapan cabang aktivitas intelektual manusia yang dimasukkan ke dalam bilangan ‘ilmu pengetahuan’ (atau yang dalam Bahasa Inggris disebut ‘science’ dan yang dialihbahasakan di Malaysia --- dan akhir-akhir ini juga di Indonesia --- dengan kata ‘sains.’) Oleh sebab itu, membicarakan metodologi dan methode penelitian hukum tidaklah akan sekali-kali menjurus ke model-model penelitian sains yang dikenal dengan sebutan “the scientific method.”³⁶

Sesuai dengan pendapat Soetandyo Wignyosoebroto di atas jelas bahwa ilmu pengetahuan hukum tidak termasuk golongan atau kelompok sains yang memakai metode verifikasi. Ilmu Hukum cenderung sebagai “leer” atau “lehre” atau “ajaran” sehingga dalam arti sempit, Ilmu Hukum disebut juga Dogmatika Hukum.³⁷ Sebagai ajaran tentang norma-norma hukum, Dogmatika Hukum pada dasarnya tidak bersifat empiris. Artinya, Dogmatika

³⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, “Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Yang Normatif (*The Jurisprudence*),” (Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas PELITA HARAPAN, Jakarta), 2005, hlm. 1.

³⁷ D.H.M. Meuwissen, “Ilmu Hukum,” (Alih Bahasa : B. Arief Sidharta), Jurnal Ilmiah, PRO JUSTITIA, Bandung, Tahun XII, Nomor 4 Oktober, 1994, hlm. 20.

Hukum tidak meneliti atau mengkaji gejala-gejala yang bersifat empiris seperti peristiwa-peristiwa alam atau perbuatan-perbuatan manusia dan berusaha menjelaskan gejala-gejala tersebut. Selain itu, kebenaran dalam Dogmatika Hukum tidak membutuhkan pembuktian berdasarkan data empiris. Fokus perhatian Dogmatika Hukum adalah mempelajari norma-norma hukum dalam rangka perbuatan-perbuatan manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, Dogmatika Hukum jelas sangat berbeda dari ilmu pengetahuan (sains) yang bersifat empiris.

Perbedaan Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial dengan Dogmatika Hukum dimulai dari perbedaan pada hakikat objek kajian (ontologi) Dogmatika Hukum. Perbedaan sifat dan hakikat keilmuan (ontologi) Dogmatika Hukum tersebut dengan sendirinya mengandung konsekuensi terhadap aspek epistemologi dan aksiologi Dogmatika Hukum. Dari sudut pandang epistemologi, Dogmatika Hukum adalah ajaran tentang norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Hal itu dengan sendirinya membuat Dogmatika Hukum memiliki epistemologi yang berbeda dari Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial. Sebagai konsekuensi perbedaan epistemologi tersebut dengan sendirinya, Dogmatika Hukum tidak mungkin memakai metode verifikasi sebagai metode (cara) untuk memahami atau memaknai norma-norma hukum. Dengan demikian, sifat dan hakikat keilmuan Dogmatika Hukum yang berbeda dari Ilmu-ilmu Alam dan Ilmu-ilmu Sosial membuat Dogmatika Hukum memiliki metode ilmiah dan metode penelitian yang berbeda dari metode verifikasi sebagai metode ilmiah ilmu pengetahuan (sains).

Dogmatika Hukum adalah salah satu cabang atau bagian dari Ilmu-ilmu Hukum karena Ilmu-ilmu Hukum sesungguhnya merupakan kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang memilih hukum sebagai objek kajiannya. Mochtar Kusumaatmadja

mengatakan bahwa hukum bisa menjadi objek dari pelbagai ilmu dengan pendekatan masing-masing yang berlainan sehingga kita bisa juga berbicara tentang Ilmu-ilmu Hukum.³⁸ Dengan perkataan lain, hukum tidak hanya dapat dikaji dari perspektif suatu cabang ilmu pengetahuan saja tetapi dapat menjadi objek kajian dari pelbagai cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam meneliti atau mengkaji hukum sebagai objek kajian terdapat beberapa metode penelitian dan metode pendekatan (sudut pandang) yang satu sama lain masing-masing berlainan. Dalam hal ini yang perlu diketahui adalah bahwa seorang peneliti yang meneliti hukum sebagai objek kajian harus memahami dari sudut pandang ilmu pengetahuan mana penelitian dilakukan supaya dapat memilih metode penelitian yang relevan dalam melakukan penelitian.

Hal yang dikemukakan di atas akan dapat dengan baik dilakukan oleh seorang peneliti jika peneliti yang bersangkutan mengetahui dengan jelas bagian-bagian dari Ilmu-ilmu Hukum sebagai ilmu kumpulan seperti dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja di atas. Oleh sebab itu, pembagian Ilmu-ilmu Hukum menjadi pengetahuan dasar yang sebaiknya dikuasai sebelum melakukan suatu penelitian. Dalam hubungan dengan di atas dapat dikemukakan pembagian Ilmu-ilmu Hukum menurut pendapat Meuwissen. Meuwissen dalam garis besar membagi Ilmu-ilmu Hukum dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu Ilmu Hukum Dogmatik dan Ilmu Hukum Empiris.³⁹ Namun, di samping itu, ada cabang Ilmu Pengetahuan lain yang objek kajiannya adalah hukum yaitu Ilmu Kenyataan Hukum.

³⁸ Mochtar Kusumaatmadja seperti dikutip dari B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung, 1999), hlm. 132.

³⁹ Meuwissen, *op. cit.* hlm. 24 – 25.

Apakah Ilmu Hukum Dogmatik atau Dogmatika Hukum itu? Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat dogmatis tentang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Meuwissen mengemukakan bahwa bentuk yang paling penting (dari Ilmu-ilmu Hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan --- pen.) tidak diragukan lagi adalah Ilmu Hukum Dogmatik.⁴⁰ Dogmatika Hukum merupakan bagian utama pengajaran mengenai hukum pada fakultas-fakultas hukum.⁴¹ Objek Dogmatika Hukum adalah terutama hukum positif sebagai tata hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.⁴²

Pengertian hukum sebagai objek telaah (objek kajian) Dogmatika Hukum bukan semata-mata hukum dalam arti sistem kaidah yang berlaku sebagai hukum positif dalam suatu negara. Akan tetapi, termasuk juga asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum sebagai karya para ilmuwan hukum. Karya-karya ilmiah para ilmuwan hukum tersebut seperti dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto pada halaman sebelumnya merupakan rasionalisasi dari keberadaan norma-norma hukum. Dengan perkataan lain, keberadaan norma dirasionalisasikan oleh ajaran atau doktrin yang berfungsi sebagai dasar pembenar keberadaan norma-norma hukum tersebut. Karya-karya ilmiah para ilmuwan hukum dalam teori sumber hukum termasuk salah satu sumber hukum formal. Doktrin hukum dimasukkan sebagai salah satu objek telaah Dogmatika Hukum karena doktrin hukum dalam Teori Sumber Hukum termasuk salah satu sumber hukum yang bersifat formal selain Hukum Tertulis, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Yurisprudensi dan Traktat (Perjanjian).

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ J.J.H.Bruggink, *Refleksi tentang Hukum op. cit.*, hlm. 168.

⁴² *Ibid.*

Objek telaah Dogmatika Hukum sebagai bagian dari Ilmu-ilmu Hukum adalah norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Namun, norma-norma hukum positif itu tidak mungkin dapat dipahami tanpa memahami doktrin-doktrin atau asas-asas hukum yang menjadi dasar keberadaan norma-norma hukum tersebut. B. Arief Sidharta mengemukakan "Objek telaah Ilmu Hukum (Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit atau Dogmatika hukum --- pen.) adalah teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan (undang-undang dalam arti luas), putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam bidangnya (doktrin)."⁴³ Pernyataan itu mengandung arti bahwa mempelajari Dogmatika Hukum tidak cukup hanya dengan mempelajari tatanan norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Doktrin-doktrin hukum yang melandasi keberadaan norma-norma hukum positif juga harus dipelajari dan dipahami. Sebab, rasionalitas keberadaan norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat adalah doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dan yang diterima kebenarannya oleh masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dogmatika Hukum adalah pengetahuan yang bersifat sistematis dan dogmatis mengenai norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat berikut doktrin-doktrin hukum yang melandasi keberadaan norma-norma hukum tersebut. Norma-norma hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum diselidiki Dogmatika Hukum dari titik berdiri dan sudut pandang tertentu yakni titik berdiri internal yang berbeda dari kajian sosiologis terhadap hukum yang bertitik tolak dari titik berdiri eksternal. Titik berdiri dan sudut pandang yang berbeda itu yang membuat Dogmatika Hukum berbeda dari cabang-

⁴³ B.Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur . . . op. cit.*, hlm. 135.

cabang Ilmu-ilmu Hukum yang lain. Jadi, tidak salah kalau dalam hubungan ini dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto bahwa Dogmatika Hukum membatasi kajiannya pada ikhwal kandungan normatif perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit terdiri atas Ilmu Kaidah Hukum dan Ilmu Pengertian Hukum.⁴⁵ Ilmu tentang Kaidah Hukum atau *normwissenschaft* adalah bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang antara lain membahas masalah perumusan kaidah hukum. Ilmu Kaidah Hukum berkenaan dengan jenis-jenis kaidah hukum (kaidah hukum abstrak atau konkrit), isi kaidah hukum, sifat-sifat kaidah hukum, esensialia kaidah hukum, tugas dan kegunaan kaidah hukum dan sebagainya.⁴⁶ Sebagai bagian dari Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit, Ilmu Pengertian Hukum (*begriffenwissenschaft*) antara lain membahas pengertian-pengertian pokok (konsep-konsep hukum). Beberapa konsep hukum pokok dalam Ilmu Hukum adalah subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, demokrasi, konstitusi, wanprestasi, kesalahan, hukuman, negara hukum, itikad baik, lembaga perwakilan, negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kedaulatan dan lain-lain.⁴⁷ Selain itu, ada konsep-konsep hukum yang lebih rumit dan lebih sulit ditetapkan ruang lingkup ataupun pengertiannya seperti kepentingan umum, perbuatan melanggar hukum dan sebagainya.

⁴⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta, 2002), hlm. 9.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung, 1993), hlm. 2.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, 1990), hlm. 3.

⁴⁷ *Ibid.*

Dogmatika Hukum merupakan pengetahuan mengenai hukum yang bersifat teoretis-rasional sehingga pengungkapan makna norma-norma hukum berdasarkan dogmatika hukum terikat pada metode yang didasarkan pada logika deduktif.⁴⁸ Dogmatika Hukum (Ilmu Hukum Dogmatik) bertugas mengolah bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum terberi atau bahan-bahan hukum yang sudah terdapat dalam suatu tatanan hukum nasional. Pengolahan bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum terberi dimaksudkan untuk memahami atau menguasai sistem hukum positif (tata hukum) supaya dapat dibuat keputusan yang paling memadai (adekuat) berdasarkan tata hukum atau dalam kerangka suatu tatanan hukum positif. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tujuan ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Hukum Positif (Dogmatika Hukum --- pen.) adalah untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas (hukum --- pen.) itu untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkananya.⁴⁹ Jadi, pengolahan bahan-bahan hukum atau norma-norma hukum terberi oleh Dogmatika Hukum dimaksudkan untuk menawarkan suatu solusi dalam rangka penyelesaian masalah hukum tertentu. Penyelesaian suatu masalah hukum tertentu berdasarkan Dogmatika Hukum termasuk dalam aktivitas penemuan hukum. Penemuan hukum itu sendiri adalah salah satu aspek dari kegiatan Dogmatika Hukum. Sebab, di samping kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) tersebut ada aspek kegiatan Dogmatika Hukum yang lain yaitu pembentukan hukum (*rechtsvorming*).

Sesuai dengan uraian di atas jelas dapat diketahui bahwa Dogmatika Hukum sebagai aktivitas intelektual meliputi kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Menurut Bruggink, aktivitas utama Dogmatika Hukum diarahkan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

pada pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁵⁰ Oleh sebab itu, Bruggink mengemukakan "Seorang dogmatikus hukum akan sering menempatkan diri seolah-olah ia tengah melakukan kegiatan pembentukan hukum atau penemuan hukum."⁵¹ Kedua macam aktivitas Dogmatika Hukum tersebut memiliki ciri khas yang dapat menunjukkan perbedaannya dengan aktivitas Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial yang tergolong dalam kelompok sains. Dalam rangka pembentukan hukum, dogmatikus hukum bertindak seolah-olah seperti badan pembentuk hukum (badan legislatif). Di sisi lain, dalam rangka penemuan hukum, dogmatikus hukum bertindak seolah-olah seperti hakim (pengadilan) yang menetapkan norma hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa konkrit. Bagaimanakah kedua aktivitas Dogmatika Hukum yakni pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang menjadi fokus perhatian Metode Penelitian Hukum.

Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun penemuan hukum, seorang dogmatikus hukum tidak melakukan kegiatannya secara arbitrer (sewenang-wenang). Sebab, segenap aktivitas dogmatikus hukum berlangsung dalam kerangka suatu sistem hukum atau terikat pada suatu tatanan hukum nasional.⁵² Selain itu, pembentukan hukum dan penemuan hukum oleh dogmatikus hukum bukan kegiatan asal-asalan (sembarangan). Namun, merupakan kegiatan ilmiah sehingga harus didasarkan pada metode ilmiah yang bersifat sistematis, rasional, logis, metodis dan sebagainya sekalipun berbeda dari metode ilmiah ilmu pengetahuan yang termasuk ke dalam kelompok sains.

⁵⁰ Bruggink, *op. cit.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

pada pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁵⁰ Oleh sebab itu, Bruggink mengemukakan "Seorang dogmatikus hukum akan sering menempatkan diri seolah-olah ia tengah melakukan kegiatan pembentukan hukum atau penemuan hukum."⁵¹ Kedua macam aktivitas Dogmatika Hukum tersebut memiliki ciri khas yang dapat menunjukkan perbedaannya dengan aktivitas Ilmu-ilmu Kealaman dan Ilmu-ilmu Sosial yang tergolong dalam kelompok sains. Dalam rangka pembentukan hukum, dogmatikus hukum bertindak seolah-olah seperti badan pembentuk hukum (badan legislatif). Di sisi lain, dalam rangka penemuan hukum, dogmatikus hukum bertindak seolah-olah seperti hakim (pengadilan) yang menetapkan norma hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa konkrit. Bagaimanakah kedua aktivitas Dogmatika Hukum yakni pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dilakukan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang menjadi fokus perhatian Metode Penelitian Hukum.

Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun penemuan hukum, seorang dogmatikus hukum tidak melakukan kegiatannya secara arbitrer (sewenang-wenang). Sebab, segenap aktivitas dogmatikus hukum berlangsung dalam kerangka suatu sistem hukum atau terikat pada suatu tatanan hukum nasional.⁵² Selain itu, pembentukan hukum dan penemuan hukum oleh dogmatikus hukum bukan kegiatan asal-asalan (sembarangan). Namun, merupakan kegiatan ilmiah sehingga harus didasarkan pada metode ilmiah yang bersifat sistematis, rasional, logis, metodis dan sebagainya sekalipun berbeda dari metode ilmiah ilmu pengetahuan yang termasuk ke dalam kelompok sains.

⁵⁰ Bruggink, *op. cit.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Baik dalam rangka pembentukan hukum ataupun dalam rangka penemuan hukum, norma-norma hukum terberi atau norma-norma hukum yang sudah ada dan berlaku dalam suatu masyarakat atau negara diolah menurut tahap-tahapan tertentu. Pada kedua jenis kegiatan tersebut, norma-norma hukum terberi (norma-norma hukum yang ada) dipaparkan (deskripsi) untuk kemudian diinterpretasi (ditetapkan maknanya) dan dianalisis (diurakan) serta disistematisasikan atau ditata ke dalam suatu jaringan sistem norma-norma hukum. Pengolahan bahan-bahan hukum yang ada dalam kerangka pembentukan hukum (*rechtsvorming*) bertujuan untuk menjawab masalah hukum konkrit yang memerlukan pengaturan secara umum. Pengaturan secara hukum menghendaki supaya dibentuk norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum dalam bentuk undang-undang oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum mengolah bahan-bahan hukum terberi ke dalam kerangka suatu sistem hukum nasional untuk membentuk suatu hukum baru yang dipergunakan untuk mengatur masalah kemasyarakatan.

Pengolahan bahan-bahan terberi dalam rangka penyelesaian suatu masalah hukum yang memerlukan pengaturan secara umum tersebut dalam praktiknya dilakukan badan legislatif atau lembaga yang berwenang membentuk aturan-aturan hukum yang bersifat umum. Pengolahan bahan-bahan hukum terberi oleh badan legislatif mau tidak mau akan bersinggungan dengan dunia kenyataan kemasyarakatan sehingga aktivitas pembentukan hukum bersinggungan dengan dunia empiris. Artinya, dalam rangka pembentukan undang-undang, badan legislatif harus memahami fakta-fakta kemasyarakatan yang berkembang supaya dapat membuat undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur masyarakat tersebut. Dalam hal inilah sumbangsih penelitian hukum empiris atau penelitian-penelitian empiris mengenai hukum sangat diperlukan.

Pilihan tentang bidang-bidang kemasyarakatan yang perlu diatur dengan undang-undang pada dasarnya merupakan kewenangan penguasa sehingga penetapan pilihan tersebut selalu bersifat politis. Di sisi lain, pilihan politis selalu berkaitan dengan masalah kepentingan yakni menguntungkan atau merugikan penguasa sehingga mengandung aspek praktis. Oleh sebab itu, tidak salah kalau Meuwissen lebih lanjut mengemukakan bahwa Dogmatika Hukum juga memiliki sisi politis-praktis.⁵³ Jadi, aktivitas Dogmatika Hukum dalam rangka pembentukan hukum yang dikemukakan di atas jelas tidak semata-mata dogmatis tetapi juga bersifat empiris. Aktivitas pembentukan hukum terutama dilakukan oleh badan legislatif sebagai badan pembentuk hukum yang asli (*original legislator*) dan kemudian juga oleh badan eksekutif sebagai badan pembentuk hukum yang memperoleh wewenang delegasi (*delegated legislator*) dari badan legislatif.

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam kerangka penemuan hukum bertujuan untuk menjawab suatu masalah hukum konkrit yang memerlukan pengaturan secara individual dan konkrit. Dalam hal ini, Dogmatika Hukum mengolah bahan-bahan hukum terberi yang terdapat dalam suatu sistem hukum nasional untuk membuat suatu keputusan hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan peristiwa konkrit tertentu. Aktivitas Dogmatika Hukum yang berbentuk penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim, pemerintah, pengacara atau praktisi hukum yang lain. Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dengan tujuan untuk menemukan hukum tertentu yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit meliputi beberapa tahap aktivitas. Tahap-tahap aktivitas dalam penemuan hukum tersebut lebih lanjut akan diterangkan pada bagian penelitian hukum untuk menemukan hukum *in concreto* pada bagian berikutnya.

⁵³ *Ibid.*

Pengolahan bahan-bahan hukum terberi dalam rangka aktivitas Dogmatika Hukum meliputi berbagai macam aktivitas intelektual (aktivitas akal-budi) yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam uraian berikut ini. Menurut Meuwissen, Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit bertugas untuk:

1. memaparkan hukum yang berlaku,
2. menginterpretasi hukum yang berlaku,
3. menganalisis hukum yang berlaku dan
4. mensistematisasi hukum yang berlaku.⁵⁴

Keempat aktivitas akal-budi dalam Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit yang dikemukakan di atas harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan penelitian hukum baik teoretisi ataupun praktisi hukum. Dalam ruang lingkup teoretisi hukum sebagai peneliti hukum, mahasiswa yang sedang meneliti hukum untuk tujuan penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi juga termasuk ke dalam kelompok peneliti sehingga segenap aktivitas Dogmatika Hukum itu juga harus dilakukan oleh yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan memaparkan hukum yang berlaku seperti dikemukakan di atas? Pemaparan atau deskripsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek sesuatu hal yang dianggap penting.⁵⁵ Pemaparan aspek-aspek dari sesuatu objek kajian yang dianggap penting dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dari objek yang dipaparkan tersebut secara menyeluruh (komprehensif). Pemaparan atau deskripsi sesuatu objek kajian tidak mungkin dapat dilakukan secara asal-asalan melainkan harus secara

⁵⁴ B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*. . . *op. cit.*

⁵⁵ Ali Mudhofir, "Landasan Ontologis Ilmu Pengetahuan," (Makalah pada penataran dosen-dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 1998), hlm. 20.

sistematis, berpedoman pada suatu metode tertentu dan rasional. Selain itu, pemaparan atau deskripsi sesuatu objek kajian sebagai suatu aktivitas akal budi tidak pernah dilakukan secara netral (bebas nilai). Akan tetapi, selalu bertitik tolak dari suatu sudut pandang tertentu atau atas dasar suatu penilaian (kepentingan) tertentu atau suatu teori tertentu. Oleh karena itu, pemaparan sebagai suatu bentuk aktivitas ilmiah (aktivitas ilmu pengetahuan) selalu bermuatan penilaian subjektif.⁵⁶ Penilaian subjektif tersebut antara lain dapat ditentukan oleh perspektif doktrin yang dipergunakan subjek sebagai titik tolak dalam menelaah objek kajian.

Subjek itu sendiri adalah manusia. Manusia dalam membuat suatu penilaian tidak pernah netral (bebas nilai). Manusia sebagai subjek selalu terikat pada nilai-nilai, tradisi dan lain-lain yang sudah terberi atau berasal dari dalam lingkungan hidup subjek (*Lebenswelt*).⁵⁷ Dalam konteks Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum juga tidak dapat dilakukan secara netral (bebas nilai) atau terlepas dari penilaian subjektif. Pemaparan norma-norma hukum biasanya dilakukan dengan bertitik tolak dari suatu doktrin hukum tertentu dan atau suatu asas hukum tertentu. Doktrin dan atau asas hukum pada dirinya adalah selalu bersifat subjektif. Dengan demikian, pemaparan atau deskripsi norma-norma hukum sebagai aktivitas Dogmatika Hukum sudah sejak semula bermuatan nilai-nilai subjektif sehingga hasil akhir dari pemaparan norma-norma hukum selalu bersifat subjektif atau tidak terlepas dari penilaian si peneliti sendiri.

Dalam Dogmatika Hukum, pemaparan norma-norma hukum dimulai dari suatu titik tolak tertentu atau suatu teori hukum atau suatu asas hukum tertentu. Pemilihan titik tolak pemaparan selalu bermuatan pertimbangan atau penilaian subjektif. Sebab, pemilihan itu

⁵⁶ B.Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 149.

⁵⁷ F.Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta, 2003), hlm. 39.

selalu sesuai dengan doktrin dan atau asas-asas hukum yang dipilih subjek sebagai titik tolak pemaparan.⁵⁸ Oleh sebab itu, pemaparan dalam konteks Dogmatika Hukum tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang atau orang awam. Akan tetapi, harus dilakukan oleh seseorang yang pernah belajar hukum secara baik yang dianggap menguasai doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum. Sebagai contoh, pemaparan pertingkatan norma-norma hukum biasa dilakukan dengan bertitik tolak dari doktrin Hans Kelsen. Kelsen mengajarkan bahwa norma-norma hukum dalam suatu tata hukum bertingkat-tingkat mulai dari norma paling abstrak sampai pada norma paling konkrit atau mulai dari norma yang paling tinggi sampai pada yang paling rendah. Menurut Doktrin Kelsen, norma-norma hukum tersusun mulai dari *Grundnorm*, Aturan-Aturan Dasar Kenegaraan, Norma-norma Umum dan Norma-norma Konkrit.⁵⁹

Apa yang dimaksud dengan menginterpretasi hukum atau menafsirkan hukum seperti dikemukakan di atas? Interpretasi sama artinya dengan penafsiran. Penafsiran pada dasarnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna norma hukum atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Penetapan atau pengungkapan makna norma-norma hukum sebagai tujuan penafsiran menghasilkan berbagai macam makna. Sebab, metode penafsiran yang dipergunakan untuk menetapkan atau mengungkap makna norma hukum tidak selalu sama. Dengan perkataan lain, hasil pemaknaan norma hukum bergantung pada metode penafsiran yang dipergunakan penafsir. Dengan demikian, metode penafsiran yang berbeda pasti menghasilkan makna norma-norma hukum yang berbeda pula.

⁵⁸ B.Arief Sidharta, *op. cit*, hlm. 135.

⁵⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Alih Bahasa : Somadi, (Jakarta, 1995), hlm. 126 dan seterusnya.

Keanekaragaman metode penafsiran dalam Ilmu Hukum yang menghasilkan keanekaragaman makna membuat aktivitas penafsiran seolah-olah aktivitas intelektual yang arbitrer (sewenang-wenang). Sekan-akan setiap orang dapat menetapkan makna norma hukum sesuai dengan kehendak hatinya dan makna yang dihasilkannya tetap dianggap sah. Dengan perkataan lain, penafsiran seolah-olah dianggap dapat dilakukan oleh setiap orang dan berlangsung secara bebas tanpa aturan sesuai dengan kepentingan masing-masing penafsir. Orang awam mudah menarik kesimpulan yang keliru yakni bahwa dalam Ilmu Hukum tidak ada kepastian karena masing-masing orang dapat menafsirkan makna aturan hukum sesuai dengan kehendak dan kepentingan penafsir.

Kesan demikian sesungguhnya merupakan kesan yang tampak dari luar saja dan tentu tidak benar. Penafsiran sebagai aktivitas akal budi yang ilmiah adalah aktivitas yang memiliki aturan. Penafsiran tidak dapat dilakukan oleh orang awam secara sewenang-wenang karena penafsiran berkaitan dengan penguasaan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang tentu saja tidak mungkin dilakukan orang awam. Sekalipun ada beberapa macam metode penafsiran dan setiap metode penafsiran menghasilkan makna yang berbeda tetapi tidak berarti bahwa kegiatan penafsiran merupakan kegiatan akal budi yang *ngawur* yang tidak jelas arah dan tujuannya. Beberapa metode penafsiran yang dipergunakan dalam menetapkan makna norma-norma hukum yang dikenal dalam Ilmu Hukum adalah penafsiran gramatika (penafsiran menurut tata bahasa), penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis atau penafsiran sosiologis.⁶⁰ Dalam perkembangan terakhir kemudian muncul (berkembang) penafsiran Hermeneutika Hukum sebagai Ilmu Tafsir Hukum.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, 2001), hlm. 145 dan seterusnya.

Apakah ada batas-batas yang harus diperhatikan dalam melakukan penafsiran hukum?

Logemann menyatakan "Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu."⁶¹ Dengan perkataan lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Faktor keterikatan terhadap kehendak pembentuk undang-undang membuat tujuan penafsiran adalah mengungkap kehendak pembentuk undang-undang seperti tertuang dalam teks undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran demikian ini dapat disebut penafsiran yang reproduktif.

Selain ketentuan bahwa penafsir harus terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang seperti dikemukakan Logemann di atas yang disebut sebagai penafsiran reproduktif perlu juga diperhatikan bahwa proses penafsiran terikat dengan aturan yang lain. Makna suatu istilah terikat pada atau tidak lepas dari konteks ayat dan pasal undang-undang di mana istilah itu berada. Namun, makna suatu ayat dari suatu pasal undang-undang itu sendiri tidak terlepas lepas dari konteks pasal undang-undang secara keseluruhan. Demikian pula dengan makna suatu pasal undang-undang tidak dapat terlepas dari konteks bab di mana pasal undang-undang berada. Pada akhirnya, makna suatu istilah itu tidak dapat terlepas dari konteks yang lebih luas atau konteks yang terluas yaitu konteks tata hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat.

⁶¹ Tim Pengajar PIH, "Pengantar Ilmu Hukum," (Diktat Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995), hlm. 30 dan seterusnya.

Keadaan yang sebaliknya dengan keadaan yang dikemukakan di atas juga berlaku. Suatu tata hukum harus dimaknai dalam konteks bidang-bidang hukum sebagian dari tata hukum. Makna tiap bidang hukum harus dipahami dalam konteks asas-asas hukum yang membentuknya. Asas-asas hukum harus dipahami dari konteks pasal-pasal yang dibentuknya. Demikian seterusnya sama pada suatu istilah hukum sebagai bagian terkecil dari suatu tata hukum. Sebagai contoh, istilah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) dalam Pasal 1365 BW. Apa arti perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW? Makna yang diberikan pada istilah itu harus dilihat dari konteks Pasal 1365 BW. Namun, Pasal 1365 BW harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas yaitu Bab-bab tentang Hukum Perikatan. Bab-bab tentang Hukum Perikatan harus dimaknai dalam konteks yang lebih luas lagi yaitu Buku III BW tentang Hukum Perjanjian. Demikian berlangsung seterusnya sehingga istilah perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 BW dapat ditetapkan maknanya dalam konteks yang lebih luas atau paling luas yaitu konteks keseluruhan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Jika penafsir sudah berhasil menetapkan makna suatu norma hukum, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh penafsir adalah menganalisis (mengurai) norma-norma hukum tersebut.

Apa yang dimaksud dengan menganalisis norma-norma hukum seperti dikemukakan di atas? Pengertian analisis hukum dalam konteks Ilmu Hukum Dogmatik berbeda dari pengertian analisis dalam Ilmu-ilmu Sosial atau Ilmu-ilmu Empiris. Analisis data dalam Ilmu-ilmu Empiris atau Ilmu-ilmu Sosial mengandung pengertian sebagai pengolahan data dengan memakai alat bantu statistika atau alat bantu yang lain. Analisis data dengan alat bantu statistika dan alat bantu yang lain dapat berbentuk analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang

pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum supaya kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.

Dalam Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik yang dianalisis adalah norma-norma hukum dan bukan data empiris seperti perilaku atau peristiwa. Alat bantu (sarana berfikir ilmiah) yang dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah Logika dan Bahasa bukan Matematika atau Statitika. Oleh sebab itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Alat bantu statistika dibutuhkan sebagai sarana untuk menganalisis jika data yang hendak dianalisis berupa data empiris.⁶² Analisis norma-norma hukum bertujuan untuk mengungkapkan isi dan sifat kaidah-kaidah hukum.⁶³ Jadi, tujuan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum. Kandungan norma-norma hukum tersebut dapat mengandung (a) suruhan (*gebod*), (b) larangan (*verbod*) atau kebolehan (*mogen*).⁶⁴

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat suatu kaidah hukum seperti dikemukakan di atas masih ada tindakan yang harus dilaksanakan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan adalah melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang ataupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari undang-undang yang berbeda.

⁶² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, 2004), hlm. 129.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, 1993), hlm. 34 dan seterusnya.

⁶⁴ *Ibid.*.

Apa yang dimaksud dengan mensistematisasi hukum atau menata hukum ke dalam suatu tatanan yang bersistem? Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang koheren dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya. Sebagai contoh, UU Pemda dapat ditata dalam suatu tatanan dengan UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, UU Tata Ruang, UU Kehutanan, UU Cagar Budaya dan lain-lain. Sistematisasi perlu dilakukan supaya dapat diketahui koherensi undang-undang satu sama lain atau hubungan yang saling bertentangan atau saling meniadakan. Secara ideal, kandungan tiap norma hukum dalam suatu tata hukum harus bersifat koheren (bersifat saling meneguhkan) dengan kandungan norma hukum lain. Umpamanya, kandungan norma-norma hukum dalam KUHPidana harus koheren dengan (meneguhkan) kandungan norma-norma hukum dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Jika kandungan norma-norma hukum di antara KUHPidana dengan UU Tindak Pidana Korupsi tidak koheren atau saling bertentangan, tatanan hukum positif Indonesia akan rusak dan kacau. Sebab, jika seumpamanya dalam KUHPidana suatu perbuatan dilarang tetapi dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dilarang berarti bahwa kedua norma hukum saling bertentangan. Pertentangan kedua undang-undang tentu saja akan menghilangkan kepastian hukum dan ketidakpastian hukum akan menciptakan ketidaktertiban. Pada hal kepastian hukum dan ketertiban merupakan aksiologi hukum (tujuan hukum) yang utama. Jika terjadi keadaan seperti itu, masyarakat akan kebingungan dan tidak tahu norma hukum mana yang dapat dijadikan pedoman. Tugas untuk mencegah supaya tidak terjadi keadaan seperti dikemukakan di atas dibebankan pada Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Dalam Arti Sempit.

Dalam Dogmatika Hukum, norma-norma hukum dipandang semata-mata kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang seharusnya sehingga norma hukum tidak lain dari kaidah atau norma yang memberikan tuntunan bertingkah laku yang seharusnya kepada manusia. Sebagai pedoman bertingkah laku, hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang bersifat otonom. Sebagai norma otonom, hukum dianggap tidak berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Oleh sebab itu, hukum harus dipatuhi atau pasti akan dipatuhi jika sudah ditetapkan penguasa (negara). Dalam hal ini hukum dipandang berlaku atau dipatuhi dengan sendirinya jika sudah ditetapkan atas dasar kekuasaan negara. Hukum dipandang seolah-olah tidak dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat mana hukum itu berlaku.

Pandangan yang mengandung keniscayaan seperti dikemukakan di atas mengandaikan manusia yang akan mematuhi undang-undang karena takut pada kekuasaan negara atau takut pada ancaman hukuman yang dikenakan negara. Dengan demikian, legalitas keberlakuan hukum semata-mata didasarkan pada kekuasaan negara. Namun, dalam kenyataan, hukum negara tidak otomatis dipatuhi karena selalu terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut. Ada faktor lain yang memaksa seseorang untuk mengabaikan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan negara yakni antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya. Sudut pandang yang memisahkan hukum dari faktor-faktor kemasyarakatan yang lain seperti faktor ekonomi, sosial budaya merupakan cara pandang Dogmatika Hukum yang khas.

Dalam kenyataan, segi-segi hukum bersifat beraneka ragam (multi faset). Satjipto Rahardjo misalnya mengemukakan "Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor

kehidupan lain dalam masyarakat.⁶⁵ Dari sudut pandang tertentu, hukum merupakan salah satu komponen dari sistem sosial yang sangat kompleks. Maka, untuk memahami hukum secara komprehensif dan adekuat (memadai), pemahaman terhadap hukum harus dalam kaitan dengan aspek-aspek sosial lain yang terdapat dalam masyarakat di tempat mana hukum berlaku. Dengan perkataan lain, untuk memahami hukum secara memadai, faktor-faktor sosial lain harus ikut pula dipertimbangkan. Hal ini sama artinya dengan memahami hukum sebagai teks yang tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, ekonomi di tempat mana hukum berlaku. Jadi, dengan bertitik tolak dari pendapat Satjipto Rahardjo dapat dimengerti bahwa hukum dalam kenyataan sebenarnya tidak otonom tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Sebagai akibatnya, hukum tidak secara otomatis dipatuhi masyarakat. Selalu akan muncul perbuatan-perbuatan yang menghindari, mengabaikan atau melanggar aturan hukum.

Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya hukum dalam kenyataan. Sebagai contoh, kemiskinan sebagai bagian dari faktor ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap kejahatan seseorang. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kemiskinan dapat mendorong orang melakukan kejahatan. Dalam hal ini, ada hubungan timbal balik antara hukum dengan faktor-faktor sosial. Hubungan tersebut merupakan bukti bahwa dalam kenyataan, hukum sebenarnya tidak otonom. Namun, Dogmatika Hukum secara sengaja dan secara sadar memisahkan hukum dari keterkaitan dengan berbagai aspek sosial dalam masyarakat. Dogmatika Hukum hanya menyelidiki hukum sebagai norma-norma yang memberikan tuntunan berperilaku kepada manusia dan membatasi diri untuk tidak menyelidiki sebab-sebab manusia patuh atau tidak patuh terhadap norma-norma hukum.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, 1991), hlm. 352.

4.2. Ilmu-ilmu Hukum Empiris dan Ilmu Kenyataan Hukum

Sesuai dengan perkembangan jaman, berkembang cabang ilmu pengetahuan hukum baru yaitu Ilmu Hukum Empiris. Ilmu Hukum Empiris memandang hukum bukan sebagai norma tetapi sebagai fakta sosial terberi yang tidak otonom. Secara demikian, hukum mempunyai hubungan timbal balik dengan segi-segi kemasyarakatan ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Satjipto Rahardjo mengemukakan "Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang kait-mengkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat."⁶⁶ Di satu pihak, hukum dapat mempengaruhi aspek-aspek kemasyarakatan tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor sosial. Di satu pihak hukum dapat meningkatkan pertumbuhan investasi modal dalam negeri dengan mengubah jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dari 30 (tigapuluh) tahun menjadi 90 (sembilan puluh) tahun. Akan tetapi, di lain pihak, hukum dapat mengakibatkan mengalirnya dana ke luar negeri jika masa berlaku HGU berkurang menjadi 20 tahun. Dengan perkataan lain, dalam bahasa penelitian dapat dikemukakan bahwa di satu pihak hukum menjadi variabel penyebab terhadap faktor sosial yakni alat untuk meningkatkan investasi. Namun, di lain pihak, hukum dapat menjadi variabel akibat bagi faktor sosial lain yaitu sebagai alat yang membuat modal mengalir ke luar negeri.

Dalam penelitian hukum empiris, hukum selalu dipandang sebagai variabel penyebab bagi faktor sosial. Titik tolak penelitian hukum empiris adalah norma-norma hukum. Norma-norma hukum diteliti dalam hubungan dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik, budaya. Penelitian hukum demikian, menurut Ronny Hanitijo adalah penelitian tentang *studi hukum dan masyarakat* karena sasaran studinya difokuskan pada

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 352.

hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*).⁶⁷ Ilmu-ilmu Hukum Empiris menyoroiti hukum bukan sebagai norma-norma tetapi sebagai perikelakuan atau sikap tindak.⁶⁸ Ilmu-ilmu Hukum Empiris bersifat teoretis-empiris sehingga pengungkapannya terikat pada metode induktif-logis.⁶⁹

Ilmu-ilmu Hukum Empiris menurut Abdurrahman dapat dimasukkan dalam kelompok Ilmu-ilmu Sosial.⁷⁰ Metode kajian dan kerangka berfikir Ilmu-ilmu Hukum Empiris mengikuti metode pendekatan dan metode penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Oleh sebab itu, kajian yang bersifat hukum empiris dengan sendirinya memanfaatkan teori-teori dalam ilmu-ilmu sosial.⁷¹ Ilmu-ilmu Hukum Empiris berjasa untuk mengungkapkan berbagai segi dari keberlakuan norma-norma hukum dalam kenyataan yang tidak dapat diungkapkan oleh Ilmu Hukum Dogmatik.⁷² Oleh sebab itu, Ilmu-ilmu Hukum Empiris dapat dikatakan sebagai ilmu pembantu bagi Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Dogmatik.

Selain Ilmu Hukum Empiris terdapat cabang ilmu pengetahuan lain yang mempelajari hukum sebagai objeknya yakni Ilmu Kenyataan Hukum. Ilmu Kenyataan Hukum memiliki cara pandang yang sama dengan Ilmu Hukum Empiris tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ilmu Hukum Empiris bertitik tolak dari optik (sudut pandang) hukum sebagai

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, 1990), hlm. 34-35.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (Bandung, 1993), hlm. 1.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, 1990), hlm. 4.

⁷⁰ Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung, Citra Adhitya Bhakti, 1995, hal. 159.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 161.

⁷² *Ibid.*, hlm. 164.

variabel bebas (variabel independen) dan aspek kemasyarakatan sebagai variabel akibat. Sebaliknya, Ilmu Kenyataan Hukum bertitik tolak dari aspek kemasyarakatan sebagai titik pandang (optik) dan hukum sebagai variabel akibat. Ilmu Kenyataan Hukum meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan yang objek kajiannya hukum yaitu Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum.⁷³

Salah satu cabang Ilmu Kenyataan Hukum adalah Sosiologi Hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa objek telaah Sosiologi Hukum adalah hukum dari sisi tampak kenyataannya yakni hukum seperti sehari-hari dijalankan dalam masyarakat.⁷⁴ Hukum dalam kenyataan tampak dari perilaku nyata manusia sehingga objek Sosiologi Hukum adalah perilaku anggota masyarakat. Tentu saja hal seperti itu tidak dibicarakan dalam Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Normatif. Sebab, Ilmu Hukum Dogmatik tidak pernah membicarakan hukum dalam arti perilaku manusia tetapi hukum dalam arti sistem norma atau kaidah. Penelitian hukum dari sudut pandang Sosiologi Hukum merupakan kebalikan dari penelitian Ilmu Hukum Empiris. Sebab, penelitian Sosiologi Hukum tidak bermula dari norma melainkan bermula dari aspek-aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, politik dan budaya tetapi berakhir pada hukum. Dengan perkataan lain, dalam penelitian Sosiologi Hukum, norma-norma hukum selalu merupakan variabel terikat (variabel akibat). Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa jika penelitian difokuskan pada studi tentang hukum sebagai variabel akibat (*dependent variable*), studi demikian merupakan studi tersendiri tentang hukum yang disebut Sosiologi Hukum.⁷⁵

⁷³ B.Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 118.

⁷⁴ Satjipto Sahardjo seperti dikutip dari B.Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 124.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

Menurut Soerjono Soekanto, sebagai salah satu cabang dari Ilmu Kenyataan Hukum adalah Psikologi Hukum. Psikologi Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan perkembangan jiwa manusia.⁷⁶ Psikologi Hukum merupakan cabang Ilmu Hukum paling muda. Psikologi Hukum mempelajari perilaku atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.⁷⁷

Cabang Ilmu Kenyataan Hukum yang lain adalah Perbandingan Hukum. Perbandingan Hukum bukan suatu metode ilmiah yang membandingkan sistem hukum yang berbeda. Dalam hal ini, Perbandingan Hukum adalah disiplin Ilmu Pengetahuan Hukum. Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang didalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku.⁷⁸

Cabang Ilmu Kenyataan Hukum lain adalah Sejarah Hukum. Sejarah Hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau itu.⁷⁹ Ilmu Pengetahuan Sejarah Hukum mulai berkembang sejak jamannya Von Savigny yakni seorang tokoh filsafat hukum berkebangsaan Jerman yang menjadi pelopor dari Mazhab Sejarah Hukum (Mazhab Historis) yang sangat terkenal dan sampai sekarang masih dirasakan pengaruhnya di Indonesia.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang . . . op. cit.*

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 2.

⁷⁸ B.Arief Sidharta, *op. cit.*, hlm. 126-127.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 130.

BAB III

PENGERTIAN PENELITIAN SEBAGAI AKTIVITAS ILMIAH

3.1. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum

Bagi sebagian orang, penelitian dianggap sebagai suatu aktivitas yang sulit dilakukan atau dapat dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu. Pendapat demikian sebagian adalah benar tetapi sesungguhnya tidaklah demikian kenyataannya. Penelitian memang aktivitas ilmiah yang tidak mudah untuk dilakukan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Bahkan, bagi seorang dosen, sesungguhnya penelitian bukan merupakan hal yang asing karena penelitian merupakan bagian dari aktivitas akademik atau aktivitas ilmiah yang menjadi tugas sehari-hari seorang dosen.

Apakah yang dimaksud dengan penelitian? Istilah penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *research*. Istilah *research* berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.⁸⁰ Jadi, secara harfiah (literal), istilah *research* kemudian diterjemahkan menjadi upaya untuk melakukan pencarian kembali. Upaya pencarian kembali sebagai makna harfiah *research* mengandung pengertian bahwa manusia selaku akan melakukan upaya pencarian jika menghadapi masalah yang belum diketahui jawabannya. Dengan perkataan lain, penelitian adalah aktivitas ilmiah yang berlangsung secara terus menerus tanpa ada akhirnya untuk mencari jawaban dari permasalahan yang belum ada jawabannya.

Apa yang dicari dalam suatu penelitian? Dalam suatu penelitian yang dicari adalah pengetahuan yang benar mengenai sesuatu hal atau fenomena. Apa sebab

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1997, hlm. 28.

pengetahuan yang benar itu perlu dicari ? Pengetahuan yang benar perlu dicari karena dipergunakan sebagai jawaban atas masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian perlu dilakukan karena ketidaktahuan manusia berkenaan dengan sesuatu hal atau untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dengan perkataan lain, ketika suatu masalah timbul dan manusia tidak tahu atau belum memiliki jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut, manusia tergerak untuk mencari pengetahuan sebagai jawabannya. Dengan demikian, masalah dan ketidaktahuan yang mendorong manusia untuk melakukan segala upaya untuk mencari jawaban setiap masalah yang dihadapinya.

Salah satu upaya yang ditempuh manusia untuk mencari jawaban masalah yang dialaminya adalah penelitian karena ada berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencari jawaban masalah yang dialami atau dihadapinya. Ada upaya yang dapat diterima akal sehat tetapi ada pula upaya yang tidak dapat diterima akal sehat. Sebagai contoh, kalau di suatu tempat terjadi bencana alam atau wabah penyakit, penduduk setempat pergi ke *orang pintar* untuk mencari penyebab kejadian tersebut. Dukun atau orang pintar dapat mengatakan bahwa penyakit atau bencana alam terjadi karena masyarakat tidak memberikan sesajen yang sepatutnya kepada penguasa alam. Pengetahuan seperti ini adalah pengetahuan yang tidak masuk akal karena tidak mempunyai dasar pertanggungjawaban yang rasional dan bersistem mengenai hubungan benacana alam dengan sesajen yang diberikan penduduk. Pengetahuan yang dihasilkan dari upaya seperti diemukakan di atas disebut pengetahuan *pra-ilmiah*.

Salah satu upaya manusia dalam mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya adalah kegiatan yang dapat diterima atau masuk akal (rasional). Upaya manusia yang

demikian disebut penelitian. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian dengan metode ilmiah disebut pengetahuan ilmiah. Sebab, pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian didasarkan pada metode ilmiah tertentu sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Tentu saja, metode ilmiah tidak selalu sama untuk setiap cabang ilmu pengetahuan. Tiap cabang ilmu pengetahuan mempunyai metode ilmiah sendiri yang berbeda dari metode ilmiah ilmu pengetahuan lain. Selain perbedaan metode, terdapat pula perbedaan dalam hal kerangka berfikir, prosedur penelitian dan lain-lain di antara berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Atas dasar hal-hal yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa kalau masalah tidak timbul, pada dasarnya manusia tidak terdorong untuk melakukan penelitian. Akan tetapi, jika terjadi masalah, manusia terdorong untuk melakukan penelitian. Masalah dalam kehidupan bersama manusia dapat terjadi dalam segala aspek seperti aspek ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain sebagainya. Masalah dalam kehidupan manusia bersifat kompleks atau rumit karena kehidupan manusia merupakan bentuk pergaulan hidup yang sangat kompleks. Tiap masalah yang timbul dalam kehidupan bersama manusia memiliki karakteristik tersendiri sehingga memerlukan penanganan tersendiri.

Salah satu aspek dari kehidupan bersama manusia adalah aspek hukum. Hukum diperlukan sebagai pedoman dalam bertindak laku. Hukum menggambarkan pola perilaku yang seharusnya dilakukan anggota masyarakat supaya tercapai ketertiban, kepastian dan keadilan dalam kehidupan bersama. Akan tetapi, keinginan ideal seperti itu tidak selalu dapat tercapai karena ada berbagai faktor yang membuat timbul masalah hukum dalam kehidupan bersama.

Pertama-tama, ada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum sehingga timbul masalah hukum. Kedua, hukum tidak selalu dapat menyediakan pola perilaku yang menjadi pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bersama. Pada suatu ketika dapat timbul masalah hukum yang tidak terpikirkan oleh pembentuk undang-undang atau pembentuk hukum sehingga terjadi kekosongan undang-undang. Hal itu terjadi karena masyarakat berkembang lebih cepat daripada pembentukan hukum. Ketiga, hukum adalah produk manusia yang besar kemungkinan mengandung kelemahan-kelemahan dalam tubuh tata hukum. Pembentuk undang-undang dapat saja melakukan kesalahan sehingga membentuk undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar yang berkedudukan lebih tinggi. Demikian pula pembentuk peraturan perundang-undangan dapat melakukan kesalahan sehingga terjadi pertentangan di antara dua peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat. Keempat, kesalahan dalam merumuskan norma hukum juga dapat terjadi sehingga ada norma hukum yang dirumuskan dengan kurang baik atau memakai istilah yang maknanya sukar dideskripsikan sehingga tidak jelas norma hukum yang dikandung.

Atas dasar uraian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum perlu dilakukan jika timbul masalah hukum dalam kehidupan bersama manusia seperti kekosongan hukum, pertentangan dua peraturan yang berbeda derajat dan lain-lain. Tujuan penelitian hukum adalah untuk mencari jawaban dari masalah tersebut. Oleh sebab itu, Soerjono Soekanto mengemukakan "Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya.”⁸¹ Dengan perkataan lain, penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode tertentu dan secara sistematis dalam rangka mempelajari gejala-gejala hukum dan mencari jawaban atas masalah hukum yang timbul.

3.2. Masalah Sebagai Titik Tolak Penelitian

Manusia merasakan ada sesuatu masalah ketika menyadari bahwa keadaan yang dialami menyimpang dari yang seharusnya. Seseorang datang ke dokter mata ketika merasakan ada sesuatu yang *tidak biasanya* waktu melihat sesuatu karena pandangan yang kurang jelas (rabun) sedangkan biasanya orang itu dapat melihat dengan jelas. Rasa ingin tahu mengenai penyebab gangguan penglihatan mendorong orang tersebut datang ke dokter mata. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa orang tersebut menghadapi suatu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi (*das sollen*) yaitu dapat melihat dengan jelas dari yang senyatanya terjadi (*das sein*) yakni gangguan penglihatan. Kesenjangan yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi merupakan keadaan yang melahirkan masalah.

Kesenjangan seperti dikemukakan di atas dapat terjadi dalam segenap aspek kehidupan bersama manusia termasuk dalam bidang hukum. Kesenjangan dalam bidang hukum terdapat pada tubuh tata hukum itu sebagai tatanan norma maupun kesenjangan yang terjadi ketika hukum diterapkan dalam masyarakat (kenyataan). Dengan perkataan lain, masalah hukum dalam kehidupan bersama manusia timbul karena terjadi kesenjangan antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan yang kenyatannya (*das sein*).

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1984, hlm. 43.

Masalah menjadi titik tolak untuk melakukan penelitian hukum. Oleh sebab itu, Bagir Manan mengemukakan "Jadi, pangkal tolak setiap penelitian adalah adanya permasalahan. Tanpa permasalahan tidak ada atau tidak perlu dilakukan penelitian."⁸²

Dalam penelitian bidang hukum, masalah-masalah hukum beraneka ragam. Dalam garis besar, kesenjangan dalam bidang hukum yang menjadi penyebab timbulnya masalah-masalah hukum dapat terjadi karena 2 (dua) kemungkinan sehingga dapat dikatakan bahwa peta permasalahan hukum terletak pada 2 (dua) kemungkinan. *Pertama*, masalah hukum timbul karena terjadinya kesenjangan dalam tubuh hukum. Sebagai contoh tipe masalah hukum yang pertama adalah kesenjangan yang terjadi ketika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada hal menurut doktrin hukum atau asas hukum, peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari mana hal itu dapat diketahui sebagai suatu kesenjangan dalam bidang hukum? Dalam hal ini seorang peneliti hukum dituntut untuk menguasai doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum.

Seorang peneliti dapat mengetahui ada kesenjangan hukum dengan bertitik tolak dari doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang sudah lebih dahulu diketahuinya. Sebagai contoh, menurut doktrin Hans Kelsen yang sudah umum diketahui, tatanan hukum positif suatu negara merupakan tatanan norma hukum yang berjenjang (bertingkat) seperti layaknya tangga. Jenjang (tangga) norma-norma hukum dimulai dari norma hukum yang paling tinggi dan yang paling abstrak sampai pada

⁸² Bagir Manan, "Penelitian di Bidang Hukum," (Jurnal Hukum, Puslitbangkum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Nomor Perdana, 1999), hlm. 1.

norma hukum yang paling rendah kedudukannya dan paling konkrit kandungannya.⁸³ Doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum merupakan pandangan yang bersifat seharusnya (*das sollen*). Maka, jika ada peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari doktrin seperti dikemukakan Hans Kelsen, hal itu menunjukkan ada kesenjangan dalam tatanan hukum positif suatu negara. Kesenjangan itu dengan sendirinya menimbulkan masalah hukum.

Masalah hukum yang ditimbulkan oleh pertentangan antara dua peraturan undang-undang yang berbeda derajat adalah kekacauan struktur vertikal tata hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Pertentangan dua norma hukum yang berbeda derajat membuat anggota masyarakat bingung karena norma hukum yang seharusnya dijadikan pedoman dalam bertindak tidak jelas. Kekacauan tersebut pada gilirannya dapat melanda keseluruhan sistem tata hukum. Dalam hubungan ini, dapat dikemukakan contoh peraturan-peraturan daerah yang akhir-akhir ini banyak dipersoalkan dan dibatalkan oleh Presiden (pemerintah pusat) karena bertentangan dengan undang-undang.⁸⁴ Masalah-masalah hukum seperti itu tentu saja membutuhkan jawaban sehingga untuk mencari jawabannya perlu dilakukan penelitian hukum.

Ketidakjelasan kandungan norma hukum dalam suatu undang-undang termasuk salah satu bentuk kesenjangan yang menimbulkan masalah hukum. Norma-norma hukum ditetapkan dengan tujuan (maksud) untuk memberikan tuntunan berperilaku bagi manusia. Supaya tuntutan berperilaku dapat diikuti, bentuk-bentuk perilaku yang

⁸³ Doktrin Hans Kelsen di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia..

⁸⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kumpulan Perda Bermasalah dan Kontroversial*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 33 dan seterusnya.

seharusnya terkandung dalam norma-norma hukum seyogianya dirumuskan secara jelas. Jika kandungan norma undang-undang tidak jelas, pola perilaku seharusnya yang hendak dinyatakan dalam norma-norma hukum dengan sendirinya menjadi tidak jelas. Sebagai akibatnya, fungsi norma hukum sebagai pedoman yang memberikan tuntunan berperilaku kepada manusia tidak dapat tercapai. Jadi, jika ada undang-undang yang kandungan normatifnya tidak jelas, secara substansial atau hakiki norma-norma hukum tersebut sesungguhnya bukan merupakan norma hukum yang baik karena gagal memberikan tuntutan berperilaku yang seharusnya kepada manusia.

Undang-undang yang tidak jelas kandungan norma-norma hukumnya, pada dasarnya merupakan suatu bentuk kesenjangan hukum. Masalah hukum seperti ini pada dasarnya memiliki karakter tersendiri dan dengan sendirinya menimbulkan masalah-masalah hukum tersendiri dalam kesatuan tata hukum. Secara ideal (*das sollen*), menurut Ilmu Kaedah Hukum, isi dan sifat kaidah hukum atau norma-norma hukum harus dirumuskan dengan tegas dan jelas.⁸⁵ Ketiadaan norma hukum yang disebut sebagai kekosongan hukum atau undang-undang juga merupakan suatu bentuk kesenjangan di bidang hukum yang menimbulkan permasalahan hukum tersendiri.

Selain hal-hal yang disebut di atas, kesenjangan hukum juga dapat terjadi dengan cara yang kedua seperti dijelaskan berikut ini sekalipun pada tataran yang berbeda. Masalah hukum juga dapat timbul karena terjadi kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang kenyataannya dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebagai contoh, kesenjangan terjadi ketika lalu lintas yang diharapkan tertib dalam kenyataan

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1993, hlm. 34 dan seterusnya.

ternyata tidak teratur dan kurang aman.⁸⁶ Masalah-masalah hukum yang terjadi dalam pelaksanaan hukum seperti dikemukakan di atas dapat diteliti dengan metode penelitian hukum empiris.

Dalam penelitian hukum empiris yang hendak dicari adalah hubungan pengaruh hukum dengan aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai subsistem kemasyarakatan yang dalam kenyataan berkaitan erat dengan subsistem kemasyarakatan yang lain seperti subsistem ekonomi, politik dan lain-lain. Penelitian yang menempatkan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan memiliki kerangka berfikir yang berbeda dengan kerangka penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis. Penelitian hukum empiris mengikuti bentuk penalaran ilmu-ilmu kealaman atau ilmu-ilmu sosial sehingga dengan sendirinya kerangka berfikir penelitian hukum empiris mengikuti pula kerangka berfikir ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial. Sebagai konsekuensinya, metode ilmiah penelitian hukum empiris juga mengikuti metode ilmiah ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial. Kecenderungan seperti ini menurut Francisco Budi Hardiman mula-mula terjadi karena pengaruh positivisme ilmu-ilmu kealaman yang melanda ilmu-ilmu sosial sehingga metode penelitian ilmu-ilmu kealaman dicoba diterapkan pada ilmu-ilmu sosial.⁸⁷

Metode ilmiah ilmu-ilmu kealaman yang diterapkan pada ilmu-ilmu sosial kemudian berkembang lebih jauh sehingga melanda ilmu-ilmu budaya termasuk ilmu hukum. Dengan perkataan lain, kajian ilmiah tentang hukum dari perspektif disiplin

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Francisco Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernisme, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta, Kanisius, 2003, hlm. 54-55.

sosial juga dilakukan terhadap hukum yang disebut penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, norma-norma hukum dianggap sama sebagai gejala-gejala yang bersifat alamiah dan bukan sebagai produk manusia yang memiliki hati nurani, pikiran dan perasaan. Hal ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya kesalahan ontologis dan epistemologis dalam suatu penelitian hukum empiris sejak dari awalnya. Dengan demikian, penelitian hukum empiris bukan merupakan penelitian hukum dalam arti yang sesungguhnya.

3.3. Metode Ilmiah

Bagaimana cara yang dilakukan manusia untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dialaminya? Cara-cara yang ditempuh manusia untuk mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya dibicarakan dalam topik metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara-cara (prosedur) yang harus ditempuh dalam suatu penelitian untuk mencari jawaban dari setiap masalah sehingga diperoleh pengetahuan ilmiah yang dapat diterima akal sehat. Hal ini perlu mendapat penegasan karena selain cara-cara ilmiah yang rasional, ada kemungkinan manusia mencari jawaban atas masalah yang dihadapinya dengan cara menebak-nebak atau dengan cara lain. Ada juga dengan cara mengandalkan kekuatan gaib yang dimiliki seseorang yang sering disebut orang pintar atau dukun ataupun dengan lain seperti cara uji-coba dan sebagainya. Cara-cara yang disebut di atas tidak dapat dikategorikan sebagai metode ilmiah. Cara manusia dalam mencari jawaban masalah yang dialami yang dikategorikan sebagai metode ilmiah adalah cara bersistem yakni cara yang berdasarkan tahap-tahapan kegiatan yang jelas arah dan tujuannya dan kebenarannya dapat diterima oleh akal. Jadi, metode ilmiah berkaitan

dengan langkah-langkah yang harus dilakukan atau ditempuh dalam suatu penelitian untuk mencari jawaban atas suatu masalah supaya dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah yang dapat diterima akal sehat.

Kata metode secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "meta" yang berarti sesudah dan "hodos" yang berarti jalan. Jadi, metode berarti langkah-langkah yang diambil menurut urutan tertentu untuk mencapai pengetahuan yang benar.⁸⁸ Langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam melakukan penelitian adalah aktivitas yang dilakukan demi kebenaran pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian. Jika penelitian dilakukan dengan menyimpang dari langkah-langkah yang sudah dibakukan, kebenaran pengetahuan yang diperoleh diragukan. Dengan perkataan lain, penelitian yang menyimpang dari prosedur baku penelitian tidak menghasilkan pengetahuan ilmiah. Jadi, metode ilmiah dapat dirumuskan sebagai "Suatu prosedur yang mencakup berbagai tindakan, pola kerja, cara teknis, dan tata langkah untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang telah ada."⁸⁹ Dengan perkataan lain, seolah-olah dapat disimpulkan bahwa kebenaran pengetahuan yang dihasilkan suatu penelitian terletak pada metode atau cara melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang perlu sebagai jawaban atas masalah.

Apa fungsi metode ilmiah dalam suatu penelitian ilmiah? Fungsi metode ilmiah dalam suatu penelitian ilmiah adalah untuk memberikan tuntunan atau pedoman supaya penelitian dilakukan sesuai dengan tahap-tahapan baku suatu penelitian sehingga dapat mencapai sasaran yang hasilnya dapat diterima akal sehat. Jika suatu penelitian dilakukan

⁸⁸ Tim Dosen Filsafat Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 104.

⁸⁹ *Ibid.*

secara menyimpang dari prosedur baku penelitian, kebenaran hasil penelitian tidak dapat diterima sebagai pengetahuan ilmiah. Dengan perkataan lain, metode ilmiah yang memberi jaminan bahwa penelitian dilakukan dengan prosedur yang benar (lazim) sehingga hasil penelitian dapat diterima sebagai pengetahuan ilmiah.

Sebenarnya, sampai sekarang belum ada kesepakatan di antara para pakar mengenai jumlah, macam dan urutan langkah yang harus dilakukan dalam penelitian untuk memenuhi syarat sebagai metode ilmiah. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga selalu terdapat berbagai perbedaan metode ilmiah. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan "Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya berbeda dengan penelitian ilmu hukum."⁹⁰ Oleh karena itu, metode ilmiah suatu cabang ilmu pengetahuan tidak dapat dipaksakan penerapannya terhadap cabang ilmu pengetahuan yang lain.

Pandangan yang berusaha menerapkan suatu metode ilmiah terhadap segenap cabang ilmu pengetahuan dipengaruhi aliran positivisme. Menurut aliran ini, tak perlu ada perbedaan pendekatan dalam ilmu-ilmu pengetahuan karena pendekatan ilmu-ilmu alam telah sukses menjelaskan gejala-gejala alam. Metode pendekatan ilmu-ilmu alam diyakini juga dapat membuahkan hasil yang sama sukses dengan yang diperoleh ilmu-ilmu kealaman jika metode itu diterapkan dalam ilmu-ilmu masyarakat.⁹¹ Pandangan satu metode ilmiah untuk segenap cabang ilmu pengetahuan dipelopori tokoh-tokoh Lingkaran Wina seperti Auguste Comte dan pelopor neo-positivisme abad ke-20.

⁹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9.

⁹¹ Francisco Budi Hardiman, *op.cit.*, hlm. 22.

Pandangan seperti dikemukakan di atas, sekarang sudah ditinggalkan orang sehingga dewasa ini setiap cabang ilmu pengetahuan memiliki metode ilmiah masing-masing. Perbedaan metode ilmiah dalam tiap cabang ilmu pengetahuan pertama-tama disebabkan perbedaan objek kajian. Namun, selain itu, perbedaan metode ilmiah tiap cabang ilmu pengetahuan dewasa ini semakin dirasakan penting karena ada kebutuhan untuk menghasilkan berbagai macam pengetahuan yang berbeda. Dalam hubungan ini, Budi Hardiman mengemukakan:

“Macam-macam objek penelitian menentukan macam-macam ilmu pengetahuan yang dihasilkannya. Namun, satu hal yang semakin serius dilihat dalam filsafat pengetahuan dewasa ini adalah fakta bahwa bermacam-macam pendekatan, metode, prosedur dan seterusnya juga menentukan macam-macam pengetahuan yang dihasilkannya.”⁹²

Ada yang berpendapat bahwa sekurang-kurangnya ada 5 (lima) langkah yang dapat dikatakan sebagai pola umum metode ilmiah yaitu:

1. Perumusan Masalah,
2. Perumusan dugaan sementara,
3. Pengumpulan Data,
4. Perumusan kesimpulan dan
5. Verifikasi hasil.⁹³

Tahap-tahapan yang dikemukakan di atas merupakan tahapan yang sudah permanen sehingga disebut juga sebagai prosedur baku. Hanya penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur baku yang dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah.⁹⁴ Penelitian yang menggunakan metode ilmiah (*scientific method*) disebut penelitian ilmiah (*scientific research*). Namun, ada perbedaan metode ilmiah dalam penelitian hukum yang bersifat

⁹² *Ibid.*, hlm. 21.

⁹³ Tim Dosen Filsafat UGM, *op. cit.*, hlm. 104..

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

yuridis-dogmatis. Metode ilmiah yang dikemukakan di atas merupakan metode ilmiah yang lazim dalam ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu sosial sedangkan ilmu hukum tidak termasuk dalam kedua cabang ilmu pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu, metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis dengan sendirinya berbeda.

Dalam penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis, norma-norma hukum tidak diperlakukan sebagai fenomena alam atau fenomena sosial karena hakikat norma hukum memang berbeda. Keberadaan norma-norma hukum dalam kehidupan bersama adalah fenomena kebudayaan karena merupakan produk yang dihasilkan manusia sebagai ungkapan dari hati nurani, perasaan dan pikiran manusia yang mengandung makna. Norma-norma hukum bukan sesuatu yang terberi atau terbentuk dengan sendirinya seperti halnya proses alam atau proses sosial. Akan tetapi, merupakan sesuatu yang secara sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, perlakuan terhadap norma-norma hukum tidak boleh sama dan harus berbeda dari perlakuan terhadap gejala-gejala kealaman atau gejala sosial yang bersifat terberi sebagaimana sudah dikemukakan.

3.4. Tujuan Penelitian

Penelitian sebagai aktivitas intelektual manusia pada dasarnya bertujuan untuk mencari pengetahuan sebagai jawaban dari permasalahan. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian bermacam-macam. Ada pengetahuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan gejala-gejala yang disebut pengetahuan deskriptif. Akan tetapi, ada pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua gejala yang disebut pengetahuan eksplanatif (menjelaskan). Umpamanya, pengetahuan

tentang hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan. Macam-macam pengetahuan yang diperoleh dari penelitian berkaitan erat dengan macam-macam tujuan penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penelitian pada dasarnya adalah untuk:

- a.mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah,
- b.menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok,
- c.mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum,
- d.memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain (yang biasanya berlandaskan hipotesa),
- e.menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab-akibat (harus didasarkan hipotesa).⁹⁵

3.5. Hubungan Penelitian dengan Ilmu Pengetahuan

Seperti diketahui, penelitian dilakukan untuk mencari jawaban dari masalah. Setiap kali menghadapi masalah yang belum diketahui jawabannya, manusia melakukan penelitian untuk mencari jawaban masalah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian disebut pengetahuan (*knowledge*) yaitu segala hal yang diketahui manusia yang berdasarkan pengamatan atau pengalaman (*empiri*). Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian menjadi suatu himpunan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Pengetahuan yang demikian disebut Ilmu Pengetahuan Ilmiah (*science*). Oleh sebab itu, penelitian dan ilmu pengetahuan mempunyai hubungan yang erat. Penelitian adalah alat yang dipergunakan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tingkat kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh manusia sampai dengan sekarang ini adalah pengetahuan yang dapat (1) membuat suatu deskripsi dan (2) menjelaskan hubungan

⁹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 9.

antara dua fakta dan menjelaskan hubungan kedua fakta tersebut dan (3) membuat perkiraan (prediksi) untuk masa yang akan datang.

3.6. Macam-macam Penelitian Hukum

Penelitian dapat dibedakan dengan berbagai macam cara atau berdasarkan berbagai macam titik tolak. Ada berbagai macam titik tolak yang dapat dipakai untuk membuat perbedaan macam-macam penelitian. Dalam garis besarnya, penelitian dapat dibedakan dari sudut sifat, bentuk, penerapan, sudut ilmu dan metode yang diterapkan, bidang ilmu dan dari sudut tempat (lokasi) penelitian dilakukan.

Dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibagi atas 3 (tiga) macam bentuk penelitian yaitu (1) Penelitian Eksploratoris (penjelajahan), (2) Penelitian Deskriptif (memaparkan) dan (3) Penelitian Eksplanatoris (menjelaskan). Penelitian Eksplanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali data sebanyak mungkin. Penelitian ini dilakukan jika pengetahuan tentang suatu gejala yang diteliti masih sangat kurang atau belum ada sama sekali. Penelitian ini kadang-kadang disebut "*feasibility study*" atau studi kelayakan. Umpamanya, polisi yang mendapat laporan telah terjadi suatu tabrakan datang ke tempat kejadian lalu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh data sebanyak mungkin.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena atau suatu keadaan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang seakurat mungkin sehingga suatu fenomena atau keadaan dapat digambarkan secara utuh (secara menyeluruh). Umpamanya, seseorang mengadakan pencatatan jumlah mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan setiap hari berdasarkan semester dan jenis kelaminnya. Data kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil

penelitian dapat diperoleh gambaran tentang mahasiswa yang paling sering mengunjungi perpustakaan dan dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Penelitian Ekspalanatoris adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Contohnya, penelitian tentang hubungan krisis ekonomi dengan pertumbuhan jumlah pengangguran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menguji hipotesis. Misalnya, ada teori yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong tindakan kejahatan. Untuk menguji kebenaran teori itu perlu dilakukan penelitian eksplanatoris untuk menguji hubungan gejala kemiskinan dengan gejala kejahatan.

Penelitian dari sudut bentuknya dapat dibagi atas 3 (tiga) macam bentuk penelitian yaitu (1) Penelitian Diagnostik, (2) Penelitian Preskriptif dan (3) Penelitian Evaluatif. Penelitian Diagnostik adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Umpamanya, dokter mendiagnosa penyebab penyakit seorang pasien. Penelitian Preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah. Sebagai contoh adalah penelitian dalam rangka merumuskan kebijakan "three in one" untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Penelitian Evaluatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menilai program-program yang dijalankan. Sebagai contoh adalah penelitian tentang evaluasi program (kebijakan) Keluarga Berencana (KB) di kalangan masyarakat Betawi.

Jika ditinjau dari sudut penerapannya, penelitian dapat dibagi atas 2 (dua) macam bentuk yaitu (1) Penelitian Murni (Pure Research) dan (2) Penelitian Terapan (Applied Research). Penelitian Murni (Pure Research) adalah penelitian yang bertujuan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan atau doktrin-doktrin. Penelitian ini juga disebut sebagai "*Basic Research atau Fundamental Research.*" Umpamanya, penelitian hukum yang bertujuan untuk mengembangkan Ilmu Hukum antara lain dengan cara menguji doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan norma-norma hukum. Penelitian Terapan (Applied Research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang dapat dibuat sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini juga disebut sebagai "Action Research." Umpamanya, hasil dari penelitian tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dapat dipakai untuk merumuskan suatu kebijakan tentang upaya pembrantasan korupsi.

Jika ditinjau dari sudut dasar ilmu dan metodologi yang diterapkan atau dipergunakan, penelitian dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu (1) Penelitian Mono disiplin, (2) Penelitian multi disiplin dan (3) Penelitian Inter disiplin. Penelitian mono disiplin adalah penelitian yang dilakukan atas dasar satu disiplin ilmu dan memakai metode disiplin ilmu yang bersangkutan. Contohnya, penelitian hukum dengan mempergunakan dasar Ilmu Hukum dan metode Ilmu Hukum. Penelitian multi disiplin adalah penelitian yang mempergunakan beberapa disiplin ilmu dan metode dari masing-masing disiplin ilmu tersebut. Umpamanya, beberapa ahli dari disiplin ilmu yang berbeda meneliti kecenderungan kawin muda di kalangan suatu masyarakat. Masing-masing pakar meneliti dari sudut Ilmu Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Agama dan Ilmu Ekonomi. Masing-masing disiplin ilmu meneliti dari sudut pandangnya dengan memakai metode ilmu yang bersangkutan. Penelitian inter disiplin adalah penelitian dengan mempergunakan dasar dari beberapa disiplin ilmu mengenai objek yang sama. Namun, metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah satu metode tertentu saja yang dipakai oleh

semua disiplin ilmu tersebut. Umpamanya, dalam kasus kecenderungan kawin muda yang disebut di atas, para ahli Ilmu Hukum, Budaya, Agama dan Ilmu Ekonomi memakai suatu metode tertentu yang disepakati secara bersama.

Penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan bidang ilmu yang bersangkutan. Oleh karena itu, macam penelitian itu akan sesuai dengan jumlah disiplin ilmu yang ada seperti misalnya (1) Penelitian Bidang Ilmu-ilmu Sosial, (2) Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi, (3) Penelitian Bidang Ilmu Hukum dan (4) Penelitian Bidang Ilmu Politik dan lain-lain sebagainya.

Penelitian juga dapat dibedakan atas dasar lokasi atau tempat di mana kegiatan penelitian itu dilakukan. Jika ditinjau dari sudut lokasi atau tempatnya, penelitian dapat dibagi atas (1) Penelitian di laboratorium (penelitian eksperimental), (2) Penelitian di perpustakaan (penelitian kepustakaan) dan (3) Penelitian di lapangan (penelitian di tengah masyarakat).

Ada juga bentuk-bentuk penelitian lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu macam penelitian di atas berhubung sifatnya yang sangat khusus. Salah satu contohnya adalah Penelitian Dasar (*Grounded Research*). Penelitian yang mendasar dalam arti "*Grounded Research*" tidak sama dengan penelitian Dasar yang disebut "*Basic Research*." Penelitian yang mendasar (*grounded research*) adalah penelitian yang tidak bertitik tolak dari suatu teori. Akan tetapi, bertitik tolak dari fakta dengan tujuan untuk membentuk suatu teori. Jadi, dengan bertitik tolak dari fakta dicoba dibuat suatu generalisasi (abstraksi) secara empiris untuk kemudian membentuk suatu teori. Oleh sebab itu, penelitian ini sering disebut kebalikan dari penelitian verifikasi yang bertujuan untuk menguji teori.

BAB IV

BAHAN HUKUM DAN TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM DALAM SUATU PENELITIAN HUKUM

4.1. Pembagian Data Menurut Sumber dan Sifatnya

Data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian karena penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data bertujuan untuk menjawab permasalahan. Istilah data selalu mengandung pengertian sebagai data yang bersifat empiris. Namun, dalam penelitian hukum, istilah data tidak lazim dipergunakan. Dalam penelitian hukum, data lebih tepat disebut bahan-bahan hukum sehingga penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang bertujuan untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Data penelitian dapat digolongkan dari 2 (dua) macam sudut pandang yaitu dari sudut pandang (a) sumbernya dan dari sudut pandang (b) sifatnya. Sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda. Jika ditinjau dari sudut pandang sumbernya, data dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (1) data primer dan (2) data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan yaitu masyarakat. Data primer antara lain meliputi peristiwa, perilaku manusia, pendapat, perilaku hewan, gejala-gejala alam, fosil, bangunan fisik seperti candi-candi, rumah-rumah adat dan lain-lain. Data primer dapat dikumpulkan dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang selanjutnya lazim disebut teknik pengumpulan data.

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering disebut data kepustakaan. Data sekunder meliputi data statistika, buku-buku

ilmiah, laporan penelitian, karya sastra, ensiklopedia, kamus, peraturan dan lain-lain. Dalam garis besar, data sekunder dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (a) data sekunder berbentuk bahan-bahan nonhukum dan (b) data sekunder berbentuk bahan-bahan hukum.

Data sekunder berbentuk bahan-bahan nonhukum sebagai bahan-bahan yang sudah didokumentasikan pada dasarnya dapat dibagi atas 5 (lima) macam yaitu :

1. Otobiographi,
2. Surat-surat pribadi, buku atau catatan harian,
3. Surat-surat kabar,
4. Dokumen-dokumen pemerintah dan
5. Cerita-cerita roman dan serita rakyat.⁹⁶

Data sekunder sebagai data yang sudah didokumentasikan pada umumnya mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut (a) pada umumnya sudah dalam keadaan siap pakai, (b) bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi peneliti terdahulu, (c) dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.⁹⁷

Jika ditinjau dari sudut sifatnya, data dapat dibagi atas 2 (dua) macam data yaitu (1) data kualitatif dan (2) data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan tetapi dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan kategoris tertentu seperti sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas atau sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan sangat tidak baik. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan. Contoh data

⁹⁶ Sartono Kartodirdjo, 'Metode Penggunaan Bahan Dokumen' dalam "Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*," Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 48.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 28.

kuantitatif adalah hasil ujian mahasiswa A, B, C, dan D untuk mata kuliah X adalah 10, 9, 8, 7 dan seterusnya.

Kedudukan data dalam penelitian tidak selalu sama bergantung pada disiplin ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu administrasi dan cabang ilmu pengetahuan lain, data primer merupakan data yang utama sedangkan data sekunder (data yang sudah didokumentasikan) merupakan data pendukung. Namun, dalam penelitian ilmu hukum, data sekunder dan khususnya data yang bersifat bahan-bahan hukum merupakan data yang utama sedangkan data primer merupakan data pendukung. Pengetahuan mengenai jenis atau macam data dalam suatu penelitian mutlak harus diketahui seorang peneliti supaya tidak terjadi pengumpulan data yang salah. Hal ini bertujuan untuk menghindari berbagai macam hal yang sesungguhnya tidak perlu terjadi seperti misalnya penelitian yang bias atau menyimpang, pengumpulan data yang diulang, pemborosan dana penelitian dan lain-lain sebagainya.

4.2. Data Dalam Penelitian Hukum Yuridis Dogmatis atau Yuridis Normatif

Data apa yang menjadi data utama dalam penelitian hukum? Pada dasarnya, dalam penelitian hukum sebagai penelitian yuridis-normatif (doktriner), data utama adalah data yang sudah didokumentasikan atau disebut data kepustakaan. Akan tetapi, tidak semua data kepustakaan (data yang sudah didokumentasikan) merupakan data yang penting dan dapat dipergunakan dalam penelitian hukum. Dalam hal ini, harus dibedakan antara data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan non-hukum dan data kepustakaan yang

merupakan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan non-hukum seperti otobiographi, surat-surat pribadi dan yang sejenis tidak penting dalam penelitian hukum.

Bahan-bahan non-hukum adalah bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Umpamanya, surat-surat pribadi seorang tokoh nasional seperti Kartini adalah bahan-bahan non-hukum yang sangat penting bagi penelitian sejarah. Namun, bagi penelitian hukum surat-surat pribadi tersebut tidak mempunyai kegunaan yang penting. Data kepustakaan yang merupakan bahan-bahan non-hukum pada dasarnya tidak penting dalam penelitian hukum. Sebaliknya, bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.

Data kepustakaan yang dapat dipergunakan sebagai data penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum. Data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya. Masing-masing bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, misalnya UUD, UU, Perpu, PP, Vonis, dan lain-lain,
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku, jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar dan
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan –lain-lain.

Bahan-bahan hukum yang dikemukakan di atas dibedakan atas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti UUD, UU, PP, Perda, Peraturan Presiden, Vonis (putusan hakim) dan lain-lain sebagainya mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada bahan hukum sekunder dan tersier. Pada dasarnya, bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan dan

ditegakkan oleh negara yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan keberlakuan peraturan hukum kepada setiap orang.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan mengikat yang lebih lemah daripada bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer yang sudah disebut. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak pada sikap penerimaan dan keyakinan atas kebenaran pendapat atau teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah tersebut. Sebagaimana diketahui, bahan-bahan hukum sekunder adalah buku-buku ilmiah, atau hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan lewat jurnal-jurnal penelitian dan sebagainya. Isi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal penelitian hukum tersebut adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing. Maka, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku atau jurnal penelitian hukum tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak (*forum kolegal*) terhadap pendapat tersebut.

Jika pendapat seorang pakar hukum dapat diterima orang banyak, pendapat itu berkembang menjadi suatu doktrin hukum seperti Doktrin Hukum Hans Kelsen mengenai Peningkatan Hukum (*Tangga-tangga Hukum*). Suatu teori atau pendapat yang berkualitas sebagai suatu doktrin seperti teori Hans Kelsen berkedudukan sebagai sumber-sumber hukum dalam arti formal sehingga mempunyai derajat kekuatan mengikat tertentu meskipun lebih lemah dari kekuatan mengikat bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang. Jika doktrin hukum diterima dan diikuti para praktisi hukum yakni pembentuk hukum, hakim, jaksa, kepolisian, pengacara, advokat, konsultan hukum dengan sendirinya doktrin hukum tersebut masuk dalam dunia nyata dan terwujudkan

melalui undang-undang, vonis hakim, advis hukum masing-masing. Jika hal itu terjadi, doktrin hukum tersebut menjadi satu kesatuan dengan sistem tata hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan hukum sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem tata hukum Indonesia. Doktrin hukum itu sudah diterima dan diikuti oleh pembentuk undang-undang (DPR) dan sudah tercantum dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya di antara ketiga bahan hukum. Apa sebab demikian? Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier tidak sama seperti bahan hukum primer yang kekuatan mengikatnya berdasarkan kekuasaan negara yang memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendaknya pada setiap orang. Bahkan, juga tidak sama dengan bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat dengan mengandalkan otoritas (wibawa) pendapat seorang ahli hukum sehingga dapat diterima, diyakini dan diikuti para pihak seperti halnya saran seorang dokter kepada pasiennya untuk minum jenis obat yang diikuti si pasien. Contoh di bidang hukum misalnya adalah pendapat (doktrin) Hans Kelsen tentang pertingkatan hukum yang telah diterima dan diikuti banyak orang sehingga sudah berkembang menjadi suatu doktrin. Doktrin itu diterima dan diakui karena didasarkan pada wibawa kepakaran Hans Kelsen di bidang hukum yang sudah diakui banyak orang.

Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier semata-mata didasarkan atas dasar suatu kesepakatan (konvensi) ataupun hal lain. Sebagai contoh adalah kamus sebagai

salah satu sumber bahan hukum tersier. Dalam kamus bahasa, suatu istilah (kata) yang mengandung arti tertentu misalnya kucing dapat ditemukan. Arti istilah kucing yang terdapat dalam kamus semata-mata didasarkan kesepakatan bersama atau konvensi pemakai bahasa. Hewan yang disebut kucing dapat disebut dengan istilah yang berbeda oleh bangsa lain. Konvensi (kesepakatan bersama) mengenai arti suatu istilah adalah bersifat arbitrer atau ditentukan menurut kehendak pemakai bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, arti sebuah istilah pada dasarnya hanya berlaku dan dimengerti oleh orang-orang yang memakai bahasa yang bersangkutan. Maka, untuk menunjuk objek yang sama, masing-masing bahasa dapat memakai istilah yang berbeda-beda seperti kucing dalam bahasa Indonesia yang disebut sebagai "cat" dalam bahasa Inggris. Kedua istilah tersebut adalah istilah yang berbeda tetapi menunjuk pada objek atau benda yang sama yaitu binatang berkaki empat dan berbulu yang suka mengeong dan biasa dipelihara dalam rumah.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian harus dikumpulkan atau digali dan sumber-sumber data. Cara-cara atau prosedur yang ditempuh untuk mengumpulkan atau menggali data ini disebut teknik pengumpulan atau penggalan data. Dalam penelitian ada 2 (dua) macam teknik pengumpulan atau penggalan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (Library research) dan

2. Studi Lapangan (Field research).

Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalan data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga

76

penggalan data kepustakaan (data yang sudah didokumentasikan) tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan). Akan tetapi, dilakukan di tempat data kepustakaan berada. Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi dapat berada di berbagai tempat sehingga penggalan data kepustakaan secara praktik tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan mungkin saja terdapat di pengadilan, di kantor-kantor pemerintah, di lembaga-lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

Studi lapangan (*field research*) adalah teknik penggalan data primer yakni penggalan data dari sumber data lapangan. Data primer yang terdapat dalam lapangan itu dapat digali dengan teknik (1) observasi (pengamatan), (2) wawancara (interview), (3) angket (kuesioner) dan (4) tes atau eksperimen.

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan pengumpulan data penelitian lapangan dengan cara turun secara langsung ke lapangan atau melihat secara langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Dalam observasi, pengamatan tidak dilakukan secara sembarangan melainkan berdasarkan suatu kerangka penelitian ilmiah. Selama pengamatan berlangsung, peneliti melakukan pencatatan-pencatatan hal-hal yang dianggap penting.

Wawancara adalah suatu metode untuk memperoleh informasi secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap secara berhadapan muka dengan orang tersebut. Keberhasilan wawancara ditentukan oleh berbagai faktor seperti keterampilan pewawancara, sikap dari orang yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam pertanyaan dan situasi pada waktu wawancara dilakukan.

Angket adalah metode pengumpulan data yang pada umumnya dipergunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas yang terdiri atas beraneka ragam golongan atau kelompok yang tersebar. Ada berbagai macam angket. Ada angket yang bersifat terbuka dan ada pula yang bersifat tertutup. Bahkan, ada angket yang bersifat kombinasi antara terbuka dan tertutup.

Eksperimen dapat dilakukan dalam laboratorium atau di luar laboratorium. Eksperimen adalah kegiatan percobaan untuk melihat suatu hasil yang akan menegaskan bagaimana hubungan kausal antara variabel yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, untuk mengetahui kebenaran suatu pernyataan bahwa murid SD yang sekolah siang cenderung rendah nilai rapornya dibandingkan dengan murid yang sekolah pagi dapat dilakukan eksperimen. Kemudian dipilih sekelompok murid SD untuk diteliti yang kondisinya hampir sama atau sama baik dengan kondisi sosial-ekonomi orang tuanya, nilai rapornya dan lain-lain. Pada awalnya, semua murid dalam satu tahun ajaran masuk pagi. Pada tahun berikutnya, semua murid masuk siang. Pada akhir tahun dilakukan pengujian. Dari hasil percobaan kemudian diperoleh informasi tentang kebenaran pernyataan bahwa jam sekolah dapat mempengaruhi nilai rapor murid.

BAB V

PENELITIAN YURIDIS-NORMATIF ATAU PENELITIAN HUKUM DOKTRINER/DOGMATIK

5.1. Pengertian Penelitian Yuridis-Normatif (Penelitian Hukum Doktriner)

Soerjono Soekanto mengemukakan "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan di samping itu ada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer."⁹⁸ Hal ini berarti bahwa bentuk penelitian hukum terdiri atas (a) penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner dan (b) penelitian hukum yuridis-empiris (sosiologis).

Apa yang dimaksud dengan Penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Hukum Doktriner? Ronny Hanitijo mengemukakan "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder."⁹⁹ Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai. Maka, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian data yang sudah didokumentasikan. Oleh sebab itu, tidak salah kalau dikatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu studi dokumen. Namun, tidak semua data sekunder yang sudah didokumentasikan merupakan data penelitian hukum normatif tetapi hanya data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

⁹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Data sekunder yang sudah didokumentasikan tetapi bukan merupakan bahan-bahan hukum seperti otobiografi, cerita atau surat-surat pribadi bukan objek kajian (objek penelitian) penelitian hukum. Namun, merupakan objek kajian cabang ilmu pengetahuan lain seperti Ilmu Sastra atau Sejarah. Oleh sebab itu, penelitian hukum berbeda dari penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang pada dasarnya meneliti data primer dalam bentuk fakta-fakta sosial seperti perilaku yang secara langsung dapat digali dari lapangan.

Perbedaan objek yang diteliti antara Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu Sosial dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam kerangka pemikiran, metode ilmiah, cara kerja, teknik pengumpulan data maupun alat analisis data dan cara menganalisis data penelitian. Dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Statistika memegang peranan yang penting sebagai sarana berfikir ilmiah. Akan tetapi, dalam penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner logika berperan penting sebagai sarana berfikir ilmiah. Demikian pula, jika rumus-rumus Statistika berperan penting untuk menganalisis data dalam penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Maka, hukum-hukum Logika berperan penting untuk menganalisis data sekunder yang berbentuk bahan-bahan hukum.

5.2. Tipologi Penelitian Yuridis-Normatif (Tipe-tipe Penelitian Hukum Doktriner)

Penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktriner terdiri atas beberapa macam tipologi penelitian karena tiap tipologi penelitian berkaitan dengan aspek tertentu dari hukum seperti aspek sistematika hukum, asas-asas hukum, praksis hukum dan sebagainya. Penelitian terhadap tiap aspek hukum tertentu dapat dikatakan sebagai suatu macam tipologi penelitian hukum normatif yang tersendiri. Umpamanya, penelitian terhadap asas-asas hukum dapat disebut sebagai tipologi penelitian asas-asas hukum.

Penelitian pada aspek sistematik hukum dapat dikatakan tipologi penelitian sistematika hukum dan lain-lain. Namun, sampai sekarang masih belum ada kesepakatan di antara para pakar tentang macam-macam tipologi penelitian hukum normatif tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan macam-macam tipologi penelitian hukum normatif yaitu:

1. Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum,
2. Penelitian Terhadap Sistematik Hukum,
3. Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal,
4. Penelitian Perbandingan Hukum,
5. Penelitian Sejarah Hukum.¹⁰⁰

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan tipologi penelitian hukum normatif yang berbeda dari tipologi penelitian hukum yang dikemukakan di atas.¹⁰¹ Ronny Hanitijo mengemukakan ada tipologi penelitian Inventarisasi Hukum dan tipologi Penelitian Untuk menemukan Hukum *In Concreto*. Atas dasar kedua pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa tipologi penelitian hukum normatif pada umumnya terdiri atas:

1. Tipologi Penelitian Inventarisasi Hukum,
2. Tipologi Penelitian Untuk menemukan Hukum *In Concreto*,
3. Tipologi Penelitian Terhadap Asas-asas Hukum,
4. Tipologi Penelitian Terhadap Sistematik Hukum,
5. Tipologi Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal,
6. Tipologi Penelitian Perbandingan Hukum,
7. Tipologi Penelitian Sejarah Hukum.

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 70 dan seterusnya.

¹⁰¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12 dan seterusnya.

5.2.1. Tipe Penelitian Inventarisasi Hukum

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan penelitian pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum tipe-tipe lain.¹⁰² Penelitian inventarisasi hukum positif sering dianggap bukan sebagai penelitian karena kurang pemahana. Ronny Hanitijo mengemukakan kerap kali ada anggapan bahwa kegiatan inventarisasi hukum positif sebenarnya hanya merupakan kumpul-mengumpulkan (peraturan-peraturan hukum . . . pen.) saja dan pekerjaan kumpul-mengumpulkan sukar untuk dimasukkan sebagai suatu kegiatan penelitian.¹⁰³ Pandangan demikian tentu saja tidak benar. Penelitian inventarisasi hukum bukan sekedar pekerjaan fisik yang bertujuan untuk mengumpulkan peraturan yang dilakukan tanpa didasari doktrin atau teori ataupun maksud dan tujuan yang jelas.

Kegiatan inventarisasi hukum positif adalah aktivitas intelektual yang terarah baik maksud maupun tujuannya serta landasi oleh teori atau doktrin-doktrin hukum tertentu sehingga tidak dapat dilakukan orang awam atau orang yang tidak belajar hukum. Dalam rangka penelitian Inventarisasi Hukum Positif, seorang peneliti mutlak harus menguasai teori sumber-sumber hukum, konsepsi-konsepsi tentang hukum positif, doktrin-doktrin hukum ataupun asas-asas hukum. Umpamanya, dalam penelitian Inventarisasi Hukum positif dalam bidang Hukum Tata Negara, seorang peneliti harus lebih dahulu menguasai konsepsi mengenai hukum positif, teori sumber-sumber Hukum Tata Negara, doktrin-doktrin dan asas-asas Hukum Tata Negara. Tanpa penguasaan

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 13.

teori, doktrin dan atau asas-asas hukum, kegiatan inventarisasi hukum mustahil dapat dilakukan. Untuk melakukan penelitian inventarisasi hukum positif dalam bidang hukum tertentu, seorang peneliti minimal harus menguasai teori sumber hukum, konsepsi tentang hukum positif, doktrin-doktrin hukum dan asas-asas hukum dalam bidang hukum yang bersangkutan. Semua hal-hal yang sudah disebut di atas dipergunakan peneliti sebagai pedoman atau penuntun dalam segenap aktivitas penelitian inventarisasi hukum positif. Sudah barang tentu doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan hal-hal lain yang sudah disebut dapat dipahami jika peneliti pernah belajar hukum. Hal ini lebih lanjut akan dijelaskan nanti.

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan ada 3 (tiga) kegiatan pokok dalam Penelitian Inventarisasi Hukum positif yaitu:

1. menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang dimasukkan sebagai norma hukum positif dan yang dianggap bukan norma-norma hukum positif,
2. melakukan pengumpulan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum tersebut,
3. melakukan pengorganisasian norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh).¹⁰⁴

Apa yang menjadi kriteria (patokan) dalam melakukan seleksi terhadap norma-norma hukum positif? Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa kriteria untuk menyeleksi norma-norma adalah konsepsi tentang hukum positif.¹⁰⁵ Konsepsi tentang hukum positif dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memisahkan norma-norma hukum dari yang bukan norma-norma hukum. Namun, dalam Ilmu Hukum, konsepsi tentang hukum positif ada beberapa macam. Perbedaan pandangan tentang konsepsi hukum positif muncul

¹⁰⁴ *Ibid.*, pada hlm. 13.

¹⁰⁵ *Ibid.*, pada hlm. 13-15.

karena perbedaan aliran filsafat yang dianut masing-masing. Dalam bahasa filsafat ilmu dapat dikatakan bahwa perbedaan pandangan tentang konsepsi hukum positif timbul karena perbedaan paradigma yang menjadi landasan berpijaknya.

Dalam lapangan Ilmu-ilmu Hukum, paradigma adalah aliran filsafat hukumnya. Dalam Filsafat Hukum dikenal beberapa macam mazhab yaitu Mazhab Hukum Kodrat, Positivisme Hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence* dan Realisme Hukum. Masing-masing aliran filsafat hukum tersebut memiliki konsepsi yang berbeda tentang hukum positif.

Dalam hubungan ini, ada 3 (tiga) macam pandangan atau konsepsi tentang hukum positif. Ketiga konsepsi tersebut terdiri atas:

1. Aliran Legisme,
2. Aliran Hukum Bebas dan
3. Aliran Hukum Moderen.¹⁰⁶

Dalam aliran legisme yang dimaksud dengan hukum positif adalah dan hanyalah undang-undang. Legisme berpandangan bahwa undang-undang adalah hukum yang sudah lengkap atau sempurna sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segenap masalah hukum. Oleh karena itu, norma hukum lain yaitu hukum tidak tertulis dan atau hukum yurisprudensi tidak diperlukan sehingga tidak diakui keberadaannya oleh Legisme. Menurut Arief Sidharta, pokok-pokok ajaran Legisme adalah sebagai berikut :

1. Hukum terbentuk semata-mata melalui proses perundang-undangan,
2. Para hakim terikat pada undang-undang,
3. Kebiasaan hanya akan memiliki kekuatan sebagai hukum jika secara tegas (eksplisit) oleh undang-undang dinyatakan sebagai peraturan hukum,
4. Sangat menitikberatkan pada tujuan hukum untuk menciptakan dan

¹⁰⁶ B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995, hlm. 30 dan seterusnya.

menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁰⁷

Jika, konsepsi hukum positif menurut pandangan Legisme ditetapkan sebagai patokan dalam memilah-milah norma-norma hukum positif dari norma-norma yang bukan hukum positif, penelitian inventarisasi hukum positif tersebut cenderung sebagai penelitian inventarisasi undang-undang. Bahkan, penelitian demikian tidak salah kalau disebut penelitian inventarisasi undang-undang saja. Namun, berbeda halnya jika aliran hukum bebas tentang konsepsi hukum positif yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam menginventarisasi hukum positif.

Pandangan Aliran Hukum Bebas tentang hukum positif adalah berbeda dari pandangan aliran Legisme. Aliran Hukum Bebas menyatakan bahwa pada pokoknya :

1. Hukum terbentuk oleh peradilan (*rechtspraak*),
2. Undang-undang dan kebiasaan hanyalah sarana pembantu bagi hakim dalam menemukan hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara atau kasus-kasus konkret. Undang-undang dan kebiasaan hanya berfungsi sebagai "*frame of reference*" atau kerangka orientasi,
3. Titik berat dalam mewujudkan hukum adalah kegunaan sosial (*social doelmatigheid*).¹⁰⁸

Dalam pandangan Aliran Hukum Bebas, tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk melindungi, memuaskan atau memenuhi kepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata.¹⁰⁹ Kepentingan-kepentingan yang dianggap penting dan yang tidak penting bagi kehidupan bersama semata-mata ditetapkan pembentuk undang-undang. Jika ada kepentingan yang dianggap penting oleh pembentuk undang-undang atau mempunyai

¹⁰⁷ *Ibid.*, pada hlm. 30.

¹⁰⁸ *Ibid.*, pada hlm. 33.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 2001, hlm. 98.

nilai, kepentingan-kepentingan itulah yang perlu dilindungi dengan undang-undang.¹¹⁰ Maka, jika terjadi sengketa atau konflik kepentingan di antara anggota masyarakat, hakim yang menyelesaikan konflik tersebut harus membuat putusan berdasarkan nilai-nilai yang dilindungi undang-undang tersebut. Hakim tidak boleh membuat keputusan sendiri untuk menentukan kepentingan yang harus dilindungi dengan menyimpang dari kepentingan yang telah pembentuk undang-undang.

Masalah timbul karena undang-undang tidak pernah lengkap. Kepentingan masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Perkembangan masyarakat membuat muncul kepentingan-kepentingan baru yang sama sekali belum terlindungi oleh hukum atau undang-undang. Dalam hal demikian, undang-undang menjadi ketinggalan jaman sehingga tidak dapat dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan sengketa kepentingan yang belum dilindungi oleh undang-undang tersebut. Undang-undang yang ketinggalan jaman tidak dapat dipergunakan sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan masalah. Jadi, harus diakui bahwa undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum.

Sesuai dengan kendala yang dikemukakan di atas dalam mengadili suatu konflik kepentingan, hakim atau para pejabat hukum yang lain harus memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan konflik kepentingan tersebut. Bahkan, jika perlu, hakim dan pejabat lain dapat menyimpang dari undang-undang.¹¹¹ Hakim dan pejabat hukum yang lain memiliki "*Freisermessen*" atau

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ B.Arief Sidharta dkk., *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995, hlm. 33.

kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang dianggapnya perlu untuk mewujudkan manfaat sosial sebesar-besarnya.¹¹²

Andaikata, konsepsi hukum positif menurut pandangan Aliran Hukum Kepentingan atau Aliran Hukum Bebas yang dipakai sebagai patokan dalam melakukan inventarisasi hukum positif, pengertian penelitian inventarisasi hukum positif tersebut pasti berbeda dengan penelitian inventarisasi hukum positif dengan paradigma legisme yang sudah dikemukakan. Dalam penelitian inventarisasi hukum positif dengan paradigma Aliran Hukum Bebas, kegiatan inventarisasi hukum positif cenderung sebagai penelitian inventarisasi hukum yurisprudensi atau penelitian inventarisasi hukum yang dibuat badan peradilan.

Pandangan yang berbeda dari pandangan Legisme dan Aliran Hukum Bebas dikemukakan Aliran Hukum Moderen. Menurut pandangan Aliran Hukum Moderen, undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Selain undang-undang terdapat banyak faktor penting yang harus diperhatikan dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Dengan perkataan lain, ada berbagai macam sumber hukum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah hukum. Aliran Hukum Moderen berpendapat bahwa pada dasarnya:

1. Hukum terbentuk melalui beberapa cara,
2. Pertama-tama, hukum terbentuk sebagai hasil karya pembuat undang-undang (*wetgever*),
3. Penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung secara mekanis yaitu hanya subsumsi kasus pada aturan,
4. Perundang-undangan (*wetgeving*) tidak pernah dan tidak mungkin lengkap dan sempurna dan perundang-undangan sering menggunakan istilah-istilah yang kabur,
5. Di samping oleh undang-undang dan peradilan, hukum juga terbentuk melalui kebiasaan (*gewoonte*),

¹¹² *Ibid.*

6. Kasasi berfungsi untuk memelihara kesatuan hukum atau "*rechtseenheid*."¹¹³

Jika, konsepsi hukum positif menurut pandangan Aliran Hukum Moderen dipakai sebagai patokan melakukan inventarisasi hukum positif, kegiatan inventarisasi hukum positif tersebut bersifat lebih luas. Penelitian inventarisasi hukum positif meliputi ketiga subsistem hukum positif yaitu (a) hukum perundang-undangan, (b) hukum tidak tertulis dan (c) hukum yurisprudensi.

Tahap kedua atau langkah kedua dalam penelitian inventarisasi hukum positif seperti dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro adalah pengumpulan atau pengelompokan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum ke dalam bidang-bidang hukum masing-masing. Pengelompokan norma-norma hukum menurut bidang hukum masing-masing tidak dapat dilakukan dengan berpedoman pada konsepsi hukum positif tetapi harus berpedoman pada kriteria atau patokan lain.

Menurut penulis, setidaknya ada 2 (dua) patokan atau kriteria yang dapat dipergunakan untuk melakukan inventarisasi hukum positif ke dalam bidang hukum masing-masing yaitu (a) Doktrin-doktrin Hukum dan (b) Teori Sumber Hukum.

Doktrin hukum adalah ajaran atau pandangan seorang ahli hukum berkenaan dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Doktrin hukum ada yang bersifat universal atau berlaku secara luas dalam dunia hukum karena mendapat pengakuan dari kalangan hukum. Ke dalam kelompok doktrin ini antara lain dapat dimasukkan doktrin Hans Kelsen tentang pertingkatan norma-norma hukum atau doktrin Trias Politika Montesquieu. Akan tetapi, ada juga doktrin yang ruang lingkup berlakunya secara terbatas baik karena keberlakuannya yang terbatas pada bidang hukum yang

¹¹³ *Ibid.*, pada hlm. 34.

tertentu atau terbatas karena mendapat pengakuan secara terbatas dari kalangan hukum. Doktrin tentang ruang lingkup Hukum Tata Negara yang dikemukakan para pakar Hukum Tata Negara Belanda adalah doktrin yang terbatas ruang lingkup keberlakukannya yakni di lingkungan negara-negara yang berkiblat ke Belanda seperti Indonesia. Doktrin tersebut tidak diakui di negara-negara lain seperti di Inggris. Para pakar Hukum Tata Negara Inggris memiliki pandangan yang berbeda atau pandangan yang lebih luas tentang ruang lingkup Hukum Tata Negara daripada Belanda. Demikian pula ada doktrin yang ruang lingkup keberlakuannya terbatas hanya karena berlaku pada bidang-bidang hukum tertentu. Dalam kelompok ini dapat dimasukkan doktrin-doktrin Hukum Tata Negara yang tidak berlaku dalam bidang Hukum Pidana atau Perdata. Demikian pula sebaliknya. Maka, andaikata hendak dilakukan inventarisasi hukum positif dalam bidang Hukum Tata Negara atau bidang hukum yang lain, doktrin atau pendapat-pendapat para pakar Hukum Tata Negara harus diketahui dan dikuasai peneliti. Peneliti dapat memilih salah satu doktrin yang dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian. Jika doktrin Hukum Tata Negara tidak dikuasai peneliti dapat bayangkan bahwa peneliti yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam memisahkan kelompok norma-norma hukum yang termasuk bidang Hukum Tata Negara dan norma-norma hukum yang bukan Hukum Tata Negara tetapi mungkin norma-norma Hukum Administrasi Negara, Hukum Ekonomi, Hukum Pidana sebagainya.

Sebagai missal dapat dilakukan penelitian inventarisasi hukum positif di bidang Hukum Tata Negara dengan tujuan untuk melakukan pengelompokan norma-norma Hukum Tata Negara dan memisahkannya dari norma-norma hukum yang lain. Dalam rangka inventarisasi hukum positif tersebut, titik tolak adalah doktrin ruang lingkup

Hukum Tata Negara menurut tradisi berfikir pakar Belanda dan negara-negara yang berkiblat pada Belanda. Dalam Hukum Tata Negara, Logemann termasuk salah satu pakar kalau bukan pakar Hukum Tata Negara yang terkemuka. Menurut Logemann, Hukum Tata Negara adalah serangkaian kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang :

1. Jabatan-jabatan dalam suatu susunan ketatanegaraan tertentu,
2. Pembentukan jabatan-jabatan,
3. Cara pengisian jabatan,
4. Tugas-tugas jabatan,
5. Wewenang hukum jabatan,
6. Hubungan kekuasaan jabatan antara satu dengan yang lain,
7. di dalam batas-batas apa organisasi negara dan (bagian-bagiannya) menjalankan tugasnya.¹¹⁴

Inventarisasi hukum (inventarisasi peraturan perundang-undangan) yang termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara dapat dilakukan dengan bertitik tolak dari pendapat Logemann. Jika bertitik tolak dari pendapat Logemann dapat dikatakan bahwa seluruh norma-norma hukum yang mengatur hal-hal yang disebut di atas dapat digolongkan dalam norma-norma Hukum Tata Negara. UUD 1945 merupakan norma Hukum Tata Negara yang pertama dan terutama dalam kelompok norma-norma Hukum Tata Negara Indonesia. Dalam UUD 1945 diatur susunan jabatan ketatanegaraan negara Republik Indonesia dan wewenang serta tugas dari masing-masing lembaga negara. Kemudian ada undang-undang yang mengatur lebih lanjut keberadaan, wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara seperti UU tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisila, UU BPK, UU tentang Susunan dan Kdudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang sistem pengisian lembaga-lembaga negara seperti antara lain Nomor 12 Tahun 2003

¹¹⁴ Logemann seperti dikutip dari Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 13-14.

Undang-Undang Pemilihan Umum anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan sebagainya. Akhirnya, hasil penelitian inventarisasi hukum positif dapat dikelompokkan berbagai undang-undang Hukum Tata Negara mulai dari UUD 1945 dan undang-undang dan memisahkannya dari undang-undang yang tidak termasuk kelompok norma-norma Hukum Tata Negara.

Tahap ketiga atau langkah ketiga dalam penelitian inventarisasi hukum positif adalah pengorganisasian norma-norma hukum yang sudah diidentifikasi dan dimasukkan dalam suatu sistem yang komprehensif (menyeluruh). Sistem yang komprehensif yang dimaksud adalah Sistem Tata Hukum suatu negara. Pengorganisasian norma-norma hukum dalam sistem yang komprehensif mengandung arti menata norma-norma hukum tersebut dalam jaringan Sistem Tata Hukum. Tahap ini dalam bahasa lain dapat disebut sebagai tahap sistematisasi norma-norma hukum ke dalam tata hukum.

Pada tahap ini, kelompok norma-norma Hukum Tata Negara yang sudah diinventarisasi dimasukkan dalam jaringan sistem hukum positif atau tata hukum. Tahap sistematisasi ini penting yaitu untuk mengetahui kelompok norma-norma hukum tata negara yang sudah diinventarisasi dapat diterima atau tidak dalam sistem hukum positif atau tata hukum. Ada kemungkinan norma-norma hukum yang sudah diinventarisir diterima oleh sistem hukum positif atau sistem tata hukum. Akan tetapi, ada pula kemungkinan norma-norma hukum positif tersebut ditolak. Bagian norma-norma hukum yang diterima Sistem Tata Hukum menjadi bagian dari Sistem Tata Hukum. Norma-

norma hukum yang diterima Sistem Tata Hukum mengandung arti sebagai norma yang diterima dari segi sistem materil maupun sistem formalnya.

Norma-norma hukum yang ditolak Sistem Tata Hukum tetap berlaku sebagai hukum positif menurut sistem formalnya sekalipun dari segi sistem materil bukan bagian Sistem Tata Hukum. Jadi, bagian yang sangat menentukan dari penelitian inventarisasi hukum positif terletak pada tahap sistematisasi hukum positif. Pada akhirnya, kelompok norma-norma hukum yang diterima sistem hukum positif baik dari segi sistem materil dan sistem formal yang dapat dianggap hukum positif. Norma-norma hukum yang ditolak sistem hukum positif dari segi sistem materil menurut logika hukum sesungguhnya harus dianggap bukan hukum positif sehingga tidak memiliki hak hidup sebagai norma hukum.

Apa ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu norma hukum dapat diterima atau ditolak oleh Sistem Tata Hukum? Ukuran yang dipergunakan untuk menilai sistem material norma hukum adalah asas-asas hukum. Asas-asas hukum memiliki fungsi ganda terhadap kaidah-kaidah hukum. Pertama, bersifat konstitutif dalam arti bahwa asas-asas hukum merupakan dasar pembentukan (konstitutif) kaidah hukum sehingga tanpa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif tidak mungkin ada. *Kedua*, bersifat regulatif yakni sebagai batu penguji atau ukuran yang dipakai untuk menilai norma-norma hukum memiliki kandungan yang sesuai atau tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang menjadi landasan keberadaannya yakni nilai keadilan. Dalam hal ini, asas-asas hukum merupakan ukuran yang menilai norma-norma hukum sebagai norma hukum yang mengandung keadilan atau tidak. Penelitian inventarisasi hukum dapat dipergunakan dalam rangka pembentukan hukum atau dalam rangka penyelesaian suatu kasus atau sengketa.

5.2.2. Tipologi Penelitian Untuk menemukan Hukum In Concreto

Ronny Hanitijo Soemitromengemukakan bahwa penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan.¹¹⁵ Penelitian hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa penelitian ini adalah cara untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Tidak salah pula kalau dikatakan bahwa penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* sebenarnya adalah suatu aktivitas penemuan hukum (*rechtsvinding*). Bentuk penelitian hukum seperti ini dapat dilakukan setelah diselesaikannya penelitian inventarisasi hukum positif yang sudah dijelaskan.¹¹⁶

Pada penelitian hukum normatif yang sudah dijelaskan jenis aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi hukum positif. Akan tetapi, pada penelitian hukum untuk menemukan hukum *in concreto*, hukum positif diterapkan pada peristiwa konkrit untuk menyelesaikan masalah. Penerapan norma-norma hukum terhadap peristiwa konkrit merupakan aktivitas akal-budi yang dilakukan dengan mengurai norma-norma hukum supaya norma-norma hukum yang bersifat abstrak-umum dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa konkrit. Penguraian itu bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup keberlakuan suatu norma hukum meliputi atau tidak meliputi peristiwa konkrit yang dimaksud. Proses penguraian norma-norma hukum dengan sendirinya

¹¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 22.

¹¹⁶ *Ibid.*, pada hlm. 22.

bersinggungan dengan bentuk-bentuk penalaran dalam Logika. Bentuk penalaran yang relevan dipergunakan dalam penelitian ini adalah silogisme.

Dalam penelitian ini, norma-norma hukum *in abstracto* (undang-undang) diposisikan sebagai premis mayor. Fakta-fakta dalam peristiwa konkrit berkedudukan sebagai premis minor. Atas dasar proses silogisme diperoleh kesimpulan berdasarkan kedua premis. Ruang lingkup keberlakuan kesimpulan selalu lebih sempit dari pada premisnya. Wujud konkrit dari kesimpulan yang diperoleh berdasarkan silogisme adalah keputusan hakim yang berfungsi sebagai norma hukum positif yang berlaku terhadap perkara yang bersangkutan. Vonis atau keputusan hakim sebagai hukum yang berlaku terhadap perkara mengikat para pihak yang terkait dalam sengketa atau kasus. Maka, jelas bahwa bentuk penalaran yang lazim dipergunakan dalam penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* adalah penalaran deduktif sesuai dengan silogisme.

Van Der Burght dan Winkelma mengemukakan bahwa dalam rangka penemuan hukum, ada 7 (tujuh) langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menemukan hukum *in concreto* yaitu :

1. Meletakkan kasus dalam suatu peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar yang artinya memaparkan secara singkat duduk perkara kasus tersebut,
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan juridis (mengkualifikasi),
3. Melakukan seleksi aturan-aturan hukum yang relevan,
4. Analisis dan penafsiran (*interpretasi*) aturan-aturan hukum itu,
5. Penerapan aturan hukum terhadap kasus,
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian,
7. Perumusan (formulasi) penyelesaian.¹¹⁷

¹¹⁷ Van Der Bueght dan Winkelma, *Penyelesaian Kasus*, Majalah Ilmiah Pro-Justitia, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1994, hlm. 35.

Ad.1. Pemetaan Kasus (Skematisasi Kasus)

Apa yang dimaksud dengan pemetaan kasus dalam penelitian hukum untuk menemukan hukum *in concreto*? Suatu peristiwa konkrit merupakan suatu rangkaian fakta-fakta yang di dalamnya tersembunyi suatu persoalan hukum.¹¹⁸ Suatu peristiwa konkrit ibarat teka-teki yang harus dijawab dan yang berkewajiban menjawab teka-teki adalah hakim yang mengadili perkara. Untuk menjawab persoalan hukum suatu peristiwa konkrit, hakim harus melakukan serangkaian kegiatan yang satu sama lain berkaitan dan tidak selalu dapat diurut secara matematis. Sering kali dalam melakukan satu kegiatan, hakim harus melakukan kegiatan yang lain sekaligus.

Langkah pertama kegiatan yang harus dilakukan hakim adalah memetakan kasus (skematisasi kasus). Maksud pemetaan kasus adalah untuk memisahkan fakta yang relevan dari fakta yang tidak relevan. Fakta-fakta yang tidak relevan dapat diabaikan sedangkan fakta-fakta yang relevan disusun atau dipetakan berdasarkan skema atau kerangka umum yang logis dan kronologis supaya duduk perkara jelas. Apabila terjadi kesalahan dalam proses pemetaan kasus dapat terjadi kesalahan dalam menetapkan duduk perkara dan karena itu terjadi kesalahan menetapkan peristiwa hukum yang sesungguhnya (proses kualifikasi juridis).

Selain kesalahan seperti itu, juga dapat terjadi kesalahan dalam proses penafsiran duduk perkara sehingga kesalahan tersebut berakibat pada kesalahan menetapkan peristiwa hukumnya (proses kualifikasi juridisnya). Umpamanya, pada suatu sore hari seorang laki-laki sedang membongkar kunci sebuah mobil di suatu tempat sepi sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Potongan cerita ini apabila ditafsirkan secara salah dapat

¹¹⁸ *Ibid.*, pada hlm. 38.

berakibat bahwa laki-laki tersebut seolah-olah hendak mencuri mobil. Jika hal seperti itu yang dibayangkan jelas terjadi kesalahan karena yang sesungguhnya tidaklah demikian. Laki-laki itu sedang kebingungan karena kunci ketinggalan dalam mobil sehingga terpaksa harus merusak pintu mobil supaya dapat kembali mengemudikan mobilnya. Ketika sedang membongkar pintu mobil si laki-laki melirik ke kiri dan ke kanan untuk mengetahui kalau-kalau ada orang yang dapat dimintai pertolongan.

Dalam pemetaan kasus ini pola penalaran yang lazim dipergunakan adalah penalaran induksi. Penalaran induksi dalam proses pemetaan kasus merupakan suatu proses penalaran yang bertujuan untuk melakukan sintesis (penguraian) terhadap rangkaian fakta-fakta dan kemudian menarik kesimpulan dan menetapkan peristiwa hukum apa yang sesungguhnya terjadi.

Atas dasar apakah suatu fakta dianggap relevan sedangkan fakta yang lain dianggap tidak relevan dalam suatu peristiwa atau sengketa? Pemetaan kasus selalu mengandaikan bahwa tiap orang yang melakukan pemetaan kasus (termasuk hakim) sudah memiliki pengetahuan hukum positif yang memadai. Tanpa pengetahuan aturan-aturan hukum positif, proses pemetaan kasus tidak mungkin dilakukan. Jadi, pengetahuan tentang aturan-aturan hukum positif merupakan dasar untuk melakukan pemetaan kasus. Dalam contoh kasus sewa-menyewa, hakim dapat dengan mudah melakukan pemetaan kasus apabila telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan-aturan hukum positif di bidang hukum perdata khususnya bidang hukum perjanjian. Perjanjian selalu didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Oleh karena itu, pemutusan hubungan hukum yang timbul berdasarkan

perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dilakukan secara sepihak apalagi oleh pihak ketiga yang tidak ikut dalam perjanjian. Atas dasar pemahaman demikian, hakim yang mengadili sengketa dapat membuat skema kasusnya.

Ad.2.Pengkualifikasian Fakta ke Dalam Istilah Juridis

Apabila pemetaan kasus selesai dilakukan dan duduk perkara jelas, kegiatan yang harus dilakukan hakim adalah menerjemahkan duduk perkara ke dalam istilah jurisdis. Langkah ini disebut mengkualifikasi fakta ke dalam istilah jurisdis yang bertujuan untuk menetapkan peristiwa hukumnya. Tanpa proses kualifikasi, peristiwa hukum dalam suatu peristiwa konkrit sulit diketahui. Bahasa yang dipakai dalam kasus pada umumnya adalah bahasa percakapan sehari-hari (bahasa orang awam) sedangkan bahasa perundang-undangan adalah bahasa hukum. Maka, bahasa sehari-hari harus diterjemahkan ke dalam bahasa hukum. Apabila berpedoman pada bahasa sehari-hari yang terdapat dalam fakta-fakta, problema hukum atau problema jurisdis yang terkandung dalam sengketa tidak dapat diungkapkan dengan baik. Jadi, pengkualifikasian duduk perkara ke dalam istilah jurisdis bertujuan untuk mengungkapkan persoalan hukum yang terkandung dalam peristiwa konkrit. Dalam proses pengkualifikasian harus dicari hubungan antara fakta (duduk perkara) dengan hukum positif. Misalnya, Si A mengambil sepeda motor milik Si B yang sedang di parkir di halaman rumah Si B. Apakah ada hubungan antara fakta Si A mengambil sepeda motor milik Si B dengan suatu aturan hukum tertentu ? Untuk mengetahui hal itu, hakim harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aturan-aturan hukum positif. Hubungan itu ternyata ada yakni diatur dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Pasal 362 KUHP orang yang mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak dan ijin si empunya serta bermaksud untuk memiliki barang itu dikualifikasikan sebagai perbuatan mencuri dan dapat dihukum penjara. Jadi, kualifikasi juridis kasus ini adalah Si A mencuri motor Si B sehingga dapat dikenai pidana penjara. Maka, sama seperti dalam hal pemetaan duduk perkara yang telah dikemukakan, proses pengkualifikasian duduk perkara ke dalam istilah juridis juga membutuhkan pengetahuan aturan hukum positif yang memadai. Tanpa pengetahuan itu, pengkualifikasian kasus terhadap istilah juridis mustahil dapat dilakukan atau setidaknya akan sangat sulit dilakukan.

Beberapa contoh cara pengkualifikasian peristiwa konkrit terhadap istilah-istilah juridis dapat dikemukakan berikut ini.

Beberapa Fakta	Kualifikasi Juridis
1.Saya besok akan memesan buku.	1.Saya besok akan mengadakan jual-beli.
2.Maukah Anda mengirim buku itu sekarang kepada saya ?	2.Maukah Anda sekarang memenuhi kewajiban Anda untuk melakukan penyerahan buku itu sesuai dengan perjanjian jual-beli ?
3.Bolehkah saya memiliki sepeda itu ?	3.Maukah Anda menghibahkan sepeda itu kepada saya ?
4.Kemarin Si A mengambil sepeda Si B.	4. Kemarin Si A mencuri sepeda Si B.

Ad.3.Seleksi Aturan Hukum yang Relevan

Langkah ketiga yang harus dilakukan setelah selesai langkah pertama dan kedua adalah seleksi aturan-aturan hukum yang relevan. Dalam rangka seleksi aturan-aturan hukum, penguasaan pengetahuan tentang sumber-sumber hukum formal sangat penting. Sudah barang tentu penguasaan yang baik mengenai tata hukum dan bidang-bidang tata hukum merupakan syarat mutlak. Bagi seorang awam, tata hukum adalah ibarat rimba raya yang sangat sulit dilalui sehingga jika memasuki rimba raya tanpa pengetahuan yang baik dapat tersesat. Akan tetapi, bagi orang yang berpengalaman, rimba raya tidak menakutkan tetapi menyajikan panorama yang indah. Pertanyaan penting diajukan di sini adalah sebagai berikut. Di mana dan dengan cara apa dapat ditemukan aturan-aturan hukum yang relevan yang dapat diterapkan dalam suatu kasus atau sengketa? Apakah dalam undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan atau peraturan lain ?

Ad.4.Interpretasi Aturan Hukum

Aturan-aturan hukum yang tercantum dalam undang-undang ataupun bentuk peraturan lain tidak selamanya jelas dan mudah dipahami. Ada kalanya, istilah-istilah yang dipergunakan dalam undang-undang tidak jelas sehingga norma hukum yang terkandung dalam aturan itu juga tidak jelas. Maka, undang-undang atau peraturan tersebut harus ditafsirkan supaya dapat ditentukan maknanya sehingga dapat ditetapkan norma hukumnya. Untuk menafsirkan ketentuan undang-undang harus dikuasai dengan baik pengetahuan tentang istilah-istilah teknis hukum seperti istilah “pengalihan atau *overdracht*,” istilah “itikad baik atau *to goeder trouw*,” dan lain-lain. Dalam hubungan ini, kamus hukum menjadi besar manfaatnya. Akan tetapi, syarat mutlak untuk dapat

menafsirkan undang-undang adalah menguasai metode-metode penafsiran hukum. Dalam Ilmu Hukum terdapat beberapa metode penafsiran yaitu (1) Penafsiran Gramatika (Penafsiran dari sudut bahasa), (2) Penafsiran Historis (Penafsiran dari sudut sejarah), (3) Penafsiran Sistematis dan (4) Penafsiran Teleologis (Penafsiran Sosiologis atau Penafsiran menurut Tujuan) dan (5) Penafsiran Hermeneutis.

Ad.5.Penerapan Aturan Hukum Terhadap Kasus

Apabila makna aturan hukum dan akibat-akibat hukum yang terkait dengan aturan hukum sudah dapat diketahui atau ditetapkan, tindakan yang kemudian harus dilakukan hakim adalah menerapkan aturan hukum terhadap peristiwa konkrit (kasus). Sebagai contoh, Si A menyetel radionya dengan sangat keras sehingga kaca rumah tetangga sebelah pecah. Tetangga itu menggugat Si A di pengadilan dan meminta sejumlah uang ganti rugi. Hakim yang mengadili perkara lalu melakukan langkah-langkah yang sudah dikemukakan di atas dan akhirnya setelah melakukan seleksi aturan hukum diperoleh kesimpulan bahwa pasal yang berkenaan dengan atau yang dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut adalah Pasal 1365 KUHPerdara (*Perbuatan Melanggar Hukum*). Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada tahap keempat, hakim menafsirkan pasal dan menentukan makna istilah perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara supaya dapat menentukan norma hukumnya. Setelah penafsiran dan penentuan makna perbuatan melanggar hukum dan penentuan norma hukumnya selesai dilakukan, tugas hakim pada tahap kelima adalah menerapkan Pasal 1365 KUHPerdara pada peristiwa konkrit yang dikemukakan.

Ad.6.Mengkaji argumen-argumen

Argumen-argumen yang disusun untuk menetapkan suatu putusan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa harus dikaji secara mendalam. Hal ini perlu dilakukan untuk menguji argumentasi yang paling masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam merumuskan argumentasi putusan, ada beberapa kemungkinan argumentasi yang dapat terjadi mengingat ada beberapa metode penafsiran Ilmu Hukum. Penafsiran yang berbeda dapat menghasilkan argumentasi yang berbeda sehingga harus dipilih salah satu dari beberapa kemungkinan. Umpamanya, argumentasi yang disusun berdasarkan metode penafsiran gramatika dapat berbeda (akan berbeda) dengan argumentasi yang disusun berdasarkan metode penafsiran historis atau teleologis. Hal ini menunjukkan bahwa dari suatu ketentuan undang-undang dapat muncul lebih dari satu makna. Jadi, perbedaan metode penafsiran menimbulkan pemaknaan norma hukum yang berbeda.

Dalam suatu sengketa, masing-masing pihak menafsirkan undang-undang sesuai dengan kepentingannya. Atas dasar itu, pihak yang bersangkutan mengemukakan argumentasi dengan bertitik tolak dari kepentingannya. Para pihak dapat secara bebas menentukan metode penafsiran yang dipakai. Tujuan akhir argumentasi para pihak dalam suatu perkara tentu saja untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim supaya mengambil putusan sesuai dengan kehendak pihak yang bersangkutan. Cara seperti ini adalah cara yang lazim terjadi di persidangan dan diperbolehkan undang-undang. Cara yang tidak diperbolehkan undang-undang dan kesusilaan adalah mempengaruhi hakim dengan cara memberikan sejumlah uang atau barang supaya hakim memutus perkara sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan. Hakim juga memiliki penafsiran sendiri mengenai

undangan.¹²⁰ Hasil-hasil penelitian asas-asas hukum ini antara lain dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara konkrit (sengketa) khususnya sengketa di bidang hukum perdata. Sebab, asas-asas hukum memainkan peranan penting dalam penemuan hukum.¹²¹ Pemanfaatan asas-asas hukum dalam penyelesaian suatu masalah konkrit dalam bidang hukum perdata antara lain dapat dilakukan pada waktu melakukan penemuan hukum. Sebagaimana diketahui, penemuan hukum adalah suatu bentuk methode (cara) untuk menemukan norma hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yakni dalam hal tidak ada suatu pasal undang-undang yang dapat secara langsung diterapkan terhadap suatu kasus atau peristiwa konkrit.

Penelitian asas-asas hukum akan lebih mudah dilakukan jika terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan asas-asas hukum. Namun, apakah yang dimaksud dengan asas-asas hukum? Ada berbagai pendapat mengenai pengertian asas-asas hukum. Ada yang berpendapat bahwa "Asas hukum adalah dasar-dasar normatif pembentukan hukum; tanpa asas hukum, hukum positif tak memiliki makna apa-apa dan kehilangan watak normatifnya, sedang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridik untuk menjadi aturan hukum positif."¹²² Ada pula definisi lain yang mengatakan bahwa "Asas hukum ...dapat kita rumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamental dari suatu sistem hukum, walaupun tidak

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 16-17.

¹²¹ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, Jakarta, 1995, hlm. 51.

¹²² Abdul Kadir Besar, *Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus Lima Puluh Tahun Pembangunan Nasional, Nomor 1, Jakarta, 1995, hlm. 29.

sefuruhnya masuk ke dalamnya.”¹²³ Namun, definisi lain mengatakan “Asas-asas hukum adalah dasar dari suatu lembaga hukum dan berfungsi untuk menjaga keselarasan dan kesesuaian di antara peraturan-peraturan hukum yang terhimpun di dalamnya.”¹²⁴ Contoh asas hukum adalah “Asas Praduga tak bersalah” dalam Hukum Acara Pidana, asas hukum “Kebebasan Berkontrak” dalam Hukum Perdata dan “Asas Monogami” dalam Hukum Perkawinan. Asas-asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum,
2. asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum, oleh karena ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum,
3. beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum, beberapa lagi di belakangnya, jadi di luar sistem hukum (atau tata hukum positif --- pen.) itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum tersebut.¹²⁵

Asas-asas hukum memiliki fungsi-fungsi tertentu pada pembentukan norma-norma hukum atau pembentukan keputusan hakim atau pejabat administrasi pemerintahan. Asas-asas hukum yang bersifat umum dan abstrak memberi ukuran mengenai nilai-nilai yang dengan ukuran ini orang dapat sampai kepada pedoman-pedoman yang konkrit.¹²⁶ Ukuran mengenai nilai-nilai yang diberikan asas-asas hukum pada norma-norma hukum ada yang bersifat konstitutif dan regulatif. Asas-asas hukum

¹²³ Ruslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus Lima Puluh Tahun Pembangunan Nasional, Nomor 1, Jakarta, 1995, hlm. 52.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Roeslan Saleh, *Pembinaan...op. cit.*, hlm. 51.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai yang bersifat konstitutif disebut asas-asas hukum konstitutif.¹²⁷

Asas-asas hukum konstitutif merupakan asas yang membentuk norma-norma hukum. Pembentukan norma-norma hukum yang tidak berdasar pada asas hukum konstitutif dengan sendirinya menghasilkan kaidah-kaidah hukum yang secara material bukan merupakan kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum yang dibentuk di luar asas-asas hukum konstitutif berkedudukan di luar tatanan hukum positif atau berada di luar jaringan sistem hukum sehingga tidak memiliki hak hidup sebagai norma-norma hukum positif secara material.

Asas-asas hukum yang berfungsi memberi ukuran nilai-nilai yang bersifat regulatif disebut sebagai asas-asas hukum regulatif.¹²⁸ Pembentukan norma-norma hukum yang tidak didasarkan pada atau mengabaikan asas-asas hukum regulatif menghasilkan norma-norma hukum yang tidak adil. Dalam hal ini, asas-asas hukum berfungsi sebagai penguji atau pembanding norma-norma hukum mengandung atau tidak mengandung nilai keadilan yang terdapat pada asas-asas hukum yang menjadi dasar pemebejukan norma-norma hukum tersebut. Jika nilai keadilan yang terdapat dalam asas-asas hukum tidak terdapat pada norma-norma hukum, norma hukum tersebut dapat dikatakan tidak mengandung keadilan. Jadi, dalam hal ini, asas-asas hukum regulatif berfungsi regulatif (berfungsi mengatur) norma-norma hukum.

Jika bertitik tolak dari uraian di atas, asas-asas hukum yang dari sudut fungsinya terhadap norma-norma hukum dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu asas hukum

¹²⁷ Soeriono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*... *on. cit.* hlm. 73.

konstitutif dan asas hukum regulatif.¹²⁹ Asas hukum konstitutif merupakan asas-asas yang harus ada bagi kehidupan suatu sistem hukum. Asas hukum konstitutif adalah dasar pembentukan norma-norma hukum. Asas hukum regulatif adalah asas hukum yang menilai atau yang menguji norma-norma yang harus ada supaya dihasilkan kaidah-kaidah hukum yang adil. Di samping itu, asas hukum juga dapat dibagi atas asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berlaku dalam semua bidang hukum atau dalam suatu tata hukum. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku hanya dalam bidang hukum tertentu.

Asas-asas hukum menurut Roeslan Saleh memiliki ciri-ciri yang membuatnya berbeda dari norma-norma hukum yakni sebagai berikut:

1. Pertama-tama dia menunjukkan bahwa asas hukum adalah fundamen dari sistem hukum, oleh karena dia adalah pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum,
2. Selanjutnya, dia menunjukkan bahwa asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum,
3. Akhirnya, dia menunjukkan bahwa beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum : bebrapa lagi di belakangnya, jadi di luar sistem hukum itu sendiri, sungguhpun demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum.¹³⁰

Jika ditinjau dari aspek strukturnya terdapat kesamaan antara asas-asas hukum dengan norma-norma hukum positif. Sama seperti norma-norma hukum yang tertata dalam suatu tatanan yang berjenjang, asas-asas hukum juga tersusun secara berjenjang (bertingkat). Struktur asas-asas hukum dimulai dari asas hukum yang tertinggi dan yang paling abstrak serta paling luas ruang lingkupnya sampai pada asas hukum yang paling rendah, paling konkrit dan paling terbatas ruang lingkupnya. Roeslan Saleh

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Roeslan Saleh, *op.cit.*, hlm. 51-52.

mengemukakan bahwa dalam asas-asas hukum terdapat perbedaan-perbedaan atau pertingkatan karena:

1. Asas-asas hukum yang kurang fundamental sifatnya adalah yang telah dimasukkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan,
2. Yang kedua terdiri atas asas-asas hukum yang menjadi dasar dari berbagai peraturan perundang-undangan,
3. Yang ketiga terdiri atas asas-asas hukum yang merupakan anggapan untuk suatu daerah hukum. Misalnya dalam hukum acara : kesamaan pihak-pihak yang berperkara atau dalam hukum pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,
4. Yang keempat adalah asas-asas hukum yang lebih tinggi. Dia bukan lagi anggapan untuk daerah hukum tertentu tetapi untuk keseluruhan stelsel hukum positif,
5. Yang kelima : asas-asas hukum yang paling fundamental. Yang berlaku bagi tiap-tiap sistem hukum positif.¹³¹

Asas-asas hukum ini disebut "Sistem Material" dalam suatu sistem hukum atau lembaga hukum.¹³² Sistem material mengandung arti sebagai unsur material yang membentuk lembaga hukum atau sistem hukum. Jika unsur material tersebut tidak ada dengan sendirinya lembaga hukum atau suatu sistem hukum itu tidak ada. Sistem formal lembaga hukum atau sistem hukum berkaitan dengan rangkaian bentuk-bentuk kaidah hukum yang membentuk suatu lembaga hukum atau sistem hukum sehingga kaidah hukum tidak saling bertentangan. Sebagai contoh, sistem formal sistem hukum Indonesia meliputi berbagai bentuk kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem materialnya meliputi berbagai asas hukum seperti asas negara hukum, asas legalitas, asas persamaan di depan hukum dan sebagainya. Asas-asas hukum kemudian menjadi titik tolak pembentukan kaidah-kaidah hukum dalam berbagai bidang hukum. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa sistem material mempunyai fungsi konstitutif terhadap pembentukan

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 55.

¹³² *Ibid.*

kaidah-kaidah hukum. Dalam bahasa yang lain dapat dinyatakan bahwa tanpa system material, norma hukum tidak pernah ada.

Apa sebab penelitian terhadap asas-asas hukum perlu dilakukan? Salah satu tujuan penelitian terhadap asas-asas hukum adalah untuk menyelesaikan suatu perkara. Penelitian asas-asas hukum dilakukan dalam rangka penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara yang tidak ada aturannya karena terjadinya kekosongan undang-undang. Jika asas hukum ditemukan, asas hukum tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara seperti layaknya ketentuan sebuah undang-undang sebagai norma hukum yang bersifat abstrak-umum yang diterapkan pada peristiwa konkrit. Proses penelitian asas-asas hukum akan dijelaskan dalam paparan berikut ini.

Ada kalanya, sistem material suatu norma hukum yang hendak dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara tidak secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Dalam keadaan seperti ini, hakim harus berusaha menemukan sistem material yang dimaksudkan pembentuk undang-undang. Untuk itu, hakim dapat melakukan perbandingan berbagai ketentuan hukum dalam suatu lembaga hukum yang dianggap memiliki kesamaan. Misalnya, dalam Pasal 279 KUHPidana disebutkan "Seseorang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun bila mengadakan hubungan perkawinan, pada hal ia seharusnya menyadari bahwa perkawinan yang sudah ada merupakan penghalang baginya untuk menikah lagi." Dalam pasal ini tidak jelas disebutkan bagi siapa Pasal 279 KUHPidana berlaku. Untuk mengetahui hal itu, hakim dapat melakukan perbandingan dengan pasal lain dalam tata hukum Indonesia. Pasal 279 KUHPidana ternyata mirip dengan Pasal 27 KUHPerdata yang menyatakan "Dalam waktu yang sama, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu

orang suami.” Dari hasil perbandingan diperoleh sistem material yang melandasi kedua pasal yaitu “Asas Monogami Mutlak.” KUHPerdara pada dasarnya berlaku hanya bagi orang Eropa dan orang Indonesia yang beragama Kristen. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 279 KUHPidana berlaku hanya bagi orang Indonesia yang beragama Kristen sedangkan bagi orang Indonesia yang beragama Islam pasal tersebut tidak berlaku.

Dari sudut epistemologi hukum, bentuk penalaran yang dipakai dalam penelitian asas-asas hukum adalah penalaran induktif. Penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum bertujuan untuk mencari dan menetapkan asas hukum yang mengikat norma hukum dalam ruang lingkup keberlakuan asas-asas hukum tersebut. Jadi, asas hukum sebenarnya adalah abstraksi dari norma-norma hukum yang lebih konkrit sehingga kandungan asas-asas hukum lebih abstrak dan umum. Dari sudut logika, pencarian asas hukum dengan model seperti ini pada hakikatnya tidak lain dari suatu bentuk generalisasi.

5.2.4. Tipologi Penelitian Terhadap Sistematis Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian terhadap sistematis hukum adalah penelitian terhadap pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.¹³³ Pengertian-pengertian dasar sistem hukum antara lain mencakup pengertian masyarakat hukum, subjek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹³⁴ Penelitian terhadap sistematis hukum adalah penelitian yang khusus dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan

¹³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 255.

¹³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm. 23.

sekunder.¹³⁵ Konsep-konsep hukum atau pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum terdapat dalam bahan-bahan hukum primer seperti tertuang dalam undang-undang atau dalam bahan-bahan hukum sekunder dalam doktrin-doktrin hukum. Dalam rangka penelitian sistematik hukum, konsep-konsep hukum atau yang juga disebut bangunan-bangunan yuridis yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan seperti subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum dan sebagainya ditelaah supaya maknanya, batas-batasnya dan daya jangkaunya dapat diketahui. Dengan demikian, hubungan suatu peraturan perundang-undangan dengan yang lain dapat ditetapkan sehingga jaringan sistem peraturan perundang-undangan dapat diketahui.

Soerjono Soekanto lebih lanjut mengemukakan bahwa penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang hukum tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan.¹³⁶ Peraturan perundang-undangan yang hendak diteliti dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan patokan tertentu misalnya menurut urutan waktu atau bagian-bagian yang diatur berdasarkan kriteria lain. Soerjono Soekanto lebih lanjut mengemukakan "Di sini si peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut."¹³⁷ Setelah itu dilakukan analisis dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang

¹³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 80.

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, ...op. cit.*, hlm. 255.

¹³⁷ *Ibid.*

telah disebut di atas.¹³⁸ Penelitian terhadap sistematik hukum perlu dilakukan baik dalam rangka penemuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara konkrit maupun pembentukan hukum (pembentukan undang-undang).

Apa sebab pengertian-pengertian dasar atau konsep-konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan itu perlu diteliti ? Penelitian terhadap sistematik hukum merupakan suatu penelitian terhadap suatu atau beberapa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengetahui sistem tertentu yang terdapat dalam suatu tata hukum ataupun dalam suatu sub bidang hukum tertentu.¹³⁹ Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui isi, batas-batas dan daya jangkau pengertian-pengertian dasar yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu sehingga dapat ditetapkan hubungan dan kedudukan suatu peraturan perundang-undangan dengan yang lain dalam bidang hukum yang sama atau dalam suatu tata hukum.. Hubungan dan kedudukan tiap peraturan perundang-undangan atau norma hukum dalam suatu tata hukum atau bidang hukum perlu diketahui. Sebab, suatu kaidah hukum selalu memiliki kedudukan tertentu dalam suatu himpunan kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu hal tertentu.¹⁴⁰ Dalam hubungan ini, Sudikno Mertokusumo mengemukakan "Di luar sistem hukum, lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 255.

¹³⁹ Bandingkan dengan penafsiran sistematis yang dikemukakan oleh Tim Pengajar PIH, *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995, hlm. 100.

¹⁴⁰ *Ibid.*

mempunyai arti.”¹⁴¹ Dengan perkataan lain, peraturan hukum umumnya merupakan bagian dari suatu sistem secara keseluruhan sehingga tidak mungkin berdiri sendiri.

Sistem tata hukum pada dasarnya terdiri atas sistem material dan sistem formal.¹⁴² Sistem material tata hukum disebut asas-asas hukum. Sistem material tata hukum atau asas-asas hukum berfungsi untuk mengikat kaidah-kaidah hukum yang mengatur objek yang sama atau memiliki kesamaan sehingga membentuk suatu lembaga hukum. Umpamanya, lembaga Hukum Perjanjian yang terdiri atas sejumlah pasal-pasal dibentuk oleh beberapa asas-asas hukum dalam bidang hukum perjanjian yakni Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KHUPerdata) dan Asas Konsensualitas atau Asas Kesepakatan (Pasal 1320 KUHPerdata).

Penelitian terhadap sistem material tata hukum dimulai dari penelitian kaidah-kaidah hukum yang mengatur objek yang sama atau memiliki kesamaan untuk kemudian mencari asas-asas hukum yang menjadi pengikat norma-norma hukum tersebut. Penelitian seperti ini disebut penelitian asas-asas hukum. Jadi, penelitian terhadap sistem material tata hukum pada dasarnya adalah sama dengan penelitian terhadap asas-asas hukum seperti sudah dibicarakan pada bagian sebelumnya.

Sistem formal tata hukum berfungsi untuk membentuk suatu jaringan supaya kemungkinan terjadinya pertentangan di antara norma-norma hukum dapat dicegah. Sistem formal tata hukum tampak dalam wujud berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan yang tertata secara horizontal dan vertikal dalam suatu jaringan norma-norma hukum yang disebut tata hukum. Penelitian terhadap sistem formal suatu

¹⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 58.

¹⁴² Arief B. Sidharta, *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm. 100-101.

tata hukum bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hubungan suatu norma hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur bidang yang sama atau yang berkaitan. Penelitian terhadap sistem formal tata hukum menjadi penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum dimulai dari analisis konsep-konsep hukum atau pengertian-pengertian dasar sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dapat dipertanyakan pengertian, isi dan daya jangkau konsep-konsep hukum yang dipakai dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan konsep hukum yang sama tetapi yang dipergunakan dalam peraturan perundangan-undangan yang lain dalam bidang hukum yang sama. Umpamanya dapat dikemukakan pertanyaan sebagai berikut. Apakah konsep hak milik dalam Hukum Perdata mempunyai pengertian, isi dan daya jangkau yang sama dengan konsep hak milik dalam Hukum Dagang dan Hukum Agraria ?

Analisis konsep hukum hak milik bertujuan untuk memahami pengertian, isi, batas-batas dan ruang lingkup hak milik sebagai suatu konsep hukum. Dalam hal ini yang dapat dipertanyakan antara lain adalah sebagai berikut. Apakah hak milik sebagai suatu konsep hukum bersifat mutlak sehingga tidak dapat dicabut oleh negara? Apakah hak milik sebagai konsep hukum meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak atau kedua-duanya? Apakah hak milik sebagai konsep hukum meliputi benda yang berwujud konkrit, abstrak atau kedua-duanya?

Isi, batas-batas dan daya jangkau konsep hak milik perlu ditetapkan supaya diperoleh gambaran tentang hubungan dan kedudukan norma-norma hukum yang mengatur hak milik dalam bidang hukum yang sama atau bidang hukum yang terkait. Maka, tidak salah kalau dikatakan bahwa penelitian terhadap sistematik hukum atau

penelitian terhadap pengertian-pengertian dasar sistem hukum dapat juga disebut sebagai suatu penelitian yang bersifat analitis.¹⁴³ Sebab, maksud utama penelitian hukum dengan metode pendekatan yang bersifat analitis menurut Johny Ibrahim adalah untuk mengetahui makna yang dikandung dalam aturan-aturan perundang-undangan secara konsepsional dan sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek hukum.¹⁴⁴ Jadi, sebagai suatu penelitian yang bersifat analitis, tugas utama penelitian dengan metode pendekatan analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis seperti subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik dan sebagainya.¹⁴⁵

Penelitian terhadap sistematika hukum dengan pendekatan analitis perlu dilakukan karena seperti dikemukakan Johny Ibrahim "Tidak jarang sebuah kata atau definisi yang terdapat dalam sebuah rumusan aturan hukum tidak jelas maknanya."¹⁴⁶ Jika konsep atau definisi suatu aturan hukum tidak jelas dengan sendirinya sulit diketahui kandungan norma aturan hukum tersebut. Kandungan norma aturan hukum yang tidak jelas membuka kemungkinan timbulnya kesulitan dan atau kesalahan memahami makna aturan hukum tersebut. Kesalahan dalam memberi makna terhadap aturan hukum menimbulkan kesulitan atau kesalahan memahami hubungan aturan hukum dengan aturan hukum yang lain dan sekaligus dapat menimbulkan kesalahan dalam

¹⁴³ Bandingkan dengan pendapat Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 256.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 256.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 257.

¹⁴⁶ *Ibid.*

melaksanakan norma hukum tersebut. Jadi, makna suatu definisi, kata atau konsep yang tidak jelas yang tercantum dalam undang-undang perlu diungkap supaya makna aturan hukum dan hubungannya dengan aturan hukum yang lain dapat diketahui sehingga sistem yang membentuk jaringan norma-norma hukum dapat diketahui. Sekaligus dengan itu penerapan konsep hukum yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa konkrit diharapkan dapat dilakukan secara tepat.

Aktivitas intelektual yang dikemukakan di atas merupakan aktivitas hukum (praksis hukum) yang bersifat teoretis dan berlangsung dalam wilayah kerja Ilmu Pengertian Hukum. Ilmu Pengertian Hukum memperbincangkan konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam suatu tata hukum. Ilmu Pengertian Hukum merupakan bagian dari Dogmatika Hukum bersama-sama dengan Ilmu Kaedah Hukum. Jadi, penelitian sistematik hukum merupakan aktivitas intelektual dalam Dogmatika Hukum Ilmu sebagai salah satu bentuk praksis hukum teoretis selain Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Penelitian konsep-konsep hukum juga juga menjadi objek penelitian Teori Hukum sekalipun dengan pendekatan yang berbeda.

Penelitian konsep-konsep hukum dalam rangka Dogmatika Hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang bangunan-bangunan yuridikal dalam ruang lingkup suatu tata hukum. Hal ini berbeda dengan penelitian konsep-konsep hukum dalam kerangka Teori Hukum. Dari perspektif Teori Hukum, konsep-konsep hukum tidak hanya dipahami dalam suatu kerangka tata hukum tetapi dalam konteks yang lebih luas daripada tata hukum yakni mencakup latar belakang ekonomikal, historikal dan lain-

lain.¹⁴⁷ Jadi, penelitian konsep-konsep hukum dari pespektif Teori Hukum tidak semata-mata bersifat dogmatika tetapi pada derajat tertentu memiliki segi-segi empiris.

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke mengemukakan bahwa maksud utama penelitian sistematik hukum atau penelitian terhadap bangunan-bangunan yuridis adalah untuk menentukan dengan secermat mungkin:

1. Isi dari konsep-konsep hukum yang dianalisis,
2. Batas-batas konsep hukum yang dianalisis dan
3. Daya jangkau (*draagwijd*) konsep hukum yang dianalisis.¹⁴⁸

Pendapat di atas kiranya akan lebih terang jika disertai dengan contoh seperti diuraikan berikut ini. Contoh yang diambil adalah penelitian tentang konsepsi "Hak Milik" dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam rangka penelitian sistematik hukum, tugas pertama seperti dikemukakan oleh Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah menentukan isi dari konsep hak milik sebagai konsep hukum. Isi, batas-batas dan daya jangkau konsep hak milik sebagai konsep hukum tidak selalu sama dalam tiap tata hukum. Umpamanya, isi, batas-batas dan daya jangkau konsep "*Eigendom*" dalam sistem hukum agraria Hindia Belanda berbeda dari pengertian dan isi konsep "Hak Milik" UU Nomor 5 Tahun 1960. Subekti mengatakan "*Eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁴⁸ Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, *Apakah Teori Hukum itu?* (Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta), Laboratorium Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 97.

mempunyai hak eigendom (hak milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu, asal saja ia tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.”¹⁴⁹

Konsep hak *Eigendom* ini tentu saja berbeda dengan konsep hak milik menurut UU Nomor 5 Tahun 1960. Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan “Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1960 lebih lanjut mengemukakan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.” Pengertian hak atas tanah yang mempunyai fungsi sosial dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960 yang menentukan “Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.” Maka, dengan ketentuan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hukum Hak Milik menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak bersifat mutlak karena demi kepentingan umum dapat dicabut oleh negara berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 1960.

Perbedaan isi, batas-batas dan daya jangkau konsepsi “*Eigendom*” dan “Hak Milik” berhubungan dengan perbedaan teori-teori Ilmu Negara Khusus Belanda dan Hindia Belanda dengan Indonesia khususnya teori tentang berdirinya negara. Menurut teori Ilmu Negara Khusus Indonesia, negara Indonesia didirikan oleh bangsa Indonesia seperti dapat disimpulkan dari teks proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari teks proklamasi dapat diderivasi (diturunkan) pengertian tentang teori bernegara bangsa Indonesia. Dalam teori bernegara bangsa Indonesia, kepentingan bangsa selalu

¹⁴⁹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cetakan Ke- XXI, Jakarta, 1987 hlm. 69.

ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kepentingan individu. Oleh sebab itu, kepentingan individu harus dikalahkan demi kepentingan umum (bangsa). Prinsip ini dengan sendirinya membawa konsekuensi pada pengertian atau isi, batas-batas dan daya jangkau konsep hak milik dalam kerangka teori bernegara bangsa Indonesia.

Hak milik menurut pengertian bangsa Indonesia sesuai dengan teori bernegara bangsa Indonesia tidak pernah bersifat mutlak karena sewaktu-waktu dapat ditundukkan pada kepentingan bersama (bangsa). Hak milik harus selalu siap berkorban demi dan untuk kepentingan umum (bangsa). Pengertian hak milik seperti dikemukakan di atas dituangkan dalam norma-norma atau tata hukum. Maka, atas dasar argumentasi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kandungan konsep Hak Milik menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tidak bersifat mutlak. Sebab, demi kepentingan umum (bangsa) hak milik selalu dapat dicabut oleh negara berdasarkan Pasal 18 UU Nomor Tahun 1960.

Setelah dapat mengungkap isi atau pengertian dari konsep hak milik seperti dikemukakan di atas, tugas berikutnya menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah menentukan batas-batas konsepsi hak milik dalam kerangka (menurut pengertian) sistem tata hukum Indonesia. Batas-batas hak milik sebagai suatu konsep hukum ternyata meliputi benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor dan sebagainya. Hak milik juga mencakup pengertian hak atas benda yang konkrit atau abstrak.

Tugas yang terakhir menurut Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke adalah menentukan daya jangkau (*draagwijd*) konsep hak milik sebagai konsep hukum dalam kerangka (menurut) sistem tata hukum Indonesia. Hak milik sebagai konsep hukum dalam tata hukum Indonesia mempunyai daya jangkau yang bersifat mutlak dalam arti

sebagai hak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sebab, hak milik itu merupakan salah satu dari 3 (tiga) macam hak mutlak yaitu hak-hak asasi, hak publik mutlak dan hak keperdataan mutlak.¹⁵⁰

Argumentasi yang lain juga dapat dikemukakan untuk semakin memperjelas pemahaman mengenai penelitian sistematik hukum yakni sebagai berikut. Penelitian analitis hukum menurut Valerine Kierkof dapat disejajarkan dengan penelitian analisis isi dalam penelitian komunikasi. Penelitian analisis konten (isi) yang paling mendekati penelitian analisis hukum adalah penelitian analisis konten dengan unit analisis kata seperti analisis konten dari kata keadilan, jual beli, *leasing* dan sebagainya.

5.2.5. Tipologi Penelitian Terhadap Sinkronisasi Hukum Vertikal dan Horizontal

Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.¹⁵¹ Tipe penelitian sinkronisasi hukum terdiri atas tipe penelitian sinkronisasi hukum vertikal dan sinkronisasi hukum horizontal.

Jika yang dilakukan adalah penelitian terhadap sinkronisasi vertikal yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah berbagai perundang-undangan yang derajatnya

¹⁵⁰ Arief B. Sidharta dkk., *Diktat Pengantar Ilmu Hukum, op. cit.*, hlm. 79.

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, op. cit.*, hlm. 85.

berbeda-beda yang mengatur bidang yang sama.¹⁵² Jadi, pada penelitian sinkronisasi vertikal yang diteliti adalah perundang-undangan dalam suatu bidang hukum tertentu dalam perspektif hierarkhisnya.¹⁵³ Sebagai contoh, penelitian sinkronisasi hukum vertikal mengenai hukum pemerintahan daerah. Dalam rangka itu, norma-norma hukum yang diteliti adalah UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004, PP dan Perda-perda yang dibuat masing-masing daerah. Dalam hal ini, yang diteliti adalah kesesuaian norma-norma UUD 1945 tentang pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah undang-undang sampai peraturan paling rendah.

Dalam penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara horizontal dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan mengadakan inventarisasi hukum yang sejajar.¹⁵⁴ Soerjono Soekanto lebih lanjut mengemukakan "Dengan menempatkan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar akan lebih mudah untuk mengadakan identifikasi terhadap sinkronisasinya yang rendah, sedang atau tinggi."¹⁵⁵ Sebagai contoh, penelitian sinkronisasi hukum horizontal mengenai hukum tentang agraria. Dalam rangka sinkronisasi hukum horizontal, penelitian dilakukan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan undang-undang lain. Dalam hal ini, yang diteliti adalah derajat sinkronisasi undang-undang tersebut satu sama lain.

¹⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, op. cit., hlm. 29.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, op. cit., hlm. 91.

4.2.6. Tipologi Penelitian Perbandingan Hukum

Apakah yang dimaksud dengan penelitian perbandingan hukum? Penelitian perbandingan hukum adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti persamaan dan perbedaan 2 (dua) sistem hukum yang berbeda. Jika diperbandingkan dua sistem hukum yang berbeda ada unsur yang sama dan unsur yang berbeda dalam kedua sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, Lembaga Hukum Hak *Eigendom* menurut BW mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Lembaga Hukum Hak Milik menurut Hukum Adat.

Persamaan-persamaan yang terdapat dalam 2 (dua) sistem hukum yang berbeda dapat terjadi karena beberapa faktor. *Pertama*, karena persamaan dalam pola politik/atau pola kebudayaan di kedua negara. *Kedua*, karena pertukaran atau pengoperasian kebudayaan di antara kedua bangsa. *Ketiga*, karena terjadi penyusupan (infiltrasi) dari suatu sistem hukum pada yang lain. *Keempat*, karena kebutuhan masyarakat yang bersifat universal.

Perbedaan-perbedaan dalam 2 (dua) sistem hukum yang berbeda dapat terjadi karena berbagai faktor juga. *Pertama*, karena keadaan tanah dan iklim yang berbeda di antara dua negara. *Kedua*, pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari dua bangsa. *Ketiga*, karena pengaruh dari orang-orang tertentu. *Keempat*, karena keadaan sosial-ekonomi yang berbeda dari negara-negara yang bersangkutan. *Kelima*, karena perbedaan agama. *Keenam*, karena perbedaan pola politik dan/pola kebudayaan dari bangsa-bangsa yang bersangkutan.

Dari sudut pandang tertentu, penelitian Perbandingan Hukum dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu (1) penelitian perbandingan hukum umum dan (2) penelitian

perbandingan hukum khusus. Penelitian perbandingan hukum umum adalah penelitian yang memperbandingkan hukum secara keseluruhan dari berbagai negara atau daerah atau golongan dari suatu zaman tertentu. Sebagai contoh, penelitian perbandingan hukum Indonesia dengan hukum di Malaysia, Singapura dan lain-lain.

Penelitian perbandingan hukum khusus adalah penelitian yang memperbandingkan lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara atau daerah atau golongan dari zaman tertentu. Sebagai contoh, penelitian perbandingan lembaga hukum perkawinan menurut BW dan Hukum Adat.

Penelitian perbandingan hukum juga dapat dibagi (1) penelitian perbandingan hukum horizontal dan (2) penelitian perbandingan hukum vertikal. Penelitian perbandingan hukum horizontal adalah penelitian perbandingan dua sistem hukum yang berbeda pada masa yang sama seperti perbandingan hukum Indonesia dan Vietnam saat ini. Penelitian perbandingan hukum vertikal adalah penelitian perbandingan suatu sistem hukum tertentu pada masa yang berbeda. Umpamanya, perbandingan keadaan sistem hukum Indonesia pada jaman kolonial dengan jaman kemerdekaan.

4.2.7. Tipologi Penelitian Sejarah Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian sejarah (lembaga-lembaga) hukum tertentu dapat ditelaah dalam pelbagai bahan, baik bahan hukum maupun bahan-bahan nonhukum.¹⁵⁶ Jika yang diteliti adalah bahan-bahan hukum, penelitian sejarah hukum dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena meneliti bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan dalam bentuk bahan hukum primer maupun

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 103.

bahan hukum yang lain. Soerjono Soekanto lebih lanjut mengemukakan bahwa “Kalau yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, misalnya maka sejarah suatu lembaga tertentu dapat ditelaah dengan cara meneliti perundang-undangan yang mengatur lembaga tersebut sejak semula ada.”¹⁵⁷ Sebagai contoh, Soerjono Soekanto mengemukakan penelitian sejarah pemerintahan Desa di Indonesia yang dapat ditelaah dari pelbagai peraturan perundang-undangan semenjak zaman Hindia Belanda. Namun, jika yang diteliti adalah bahan-bahan nonhukum, penelitian sejarah hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris karena meneliti bahan-bahan nonhukum yang digali dari sumber-sumber data lapangan. Dengan bertitik tolak dari cara yang sama dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian sejarah hukum terhadap suatu sistem (tata hukum) juga dapat dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum atau bahan-bahan nonhukum.

Penelitian sejarah hukum merupakan penelitian asal-usul dan taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁵⁸ Umpamanya, penelitian sejarah perkembangan Hukum Sipil Hindia Belanda yang sampai sekarang masih berlaku. Dalam nada yang sama Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa penelitian sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan sistem (tata) hukum atau dalam arti sempit penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan suatu perundang-undangan.¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 103

¹⁵⁸ Bandingkan dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1999, hlm. 58-59.

¹⁵⁹ Bandingkan dengan pendapat Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 101.

Penelitian sejarah hukum dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang tepat suatu sistem hukum (tata hukum) atau suatu undang-undang yang mengatur suatu bidang tertentu dengan cara meneliti sejarah perkembangan sistem hukum (tata hukum) atau lembaga hukum tersebut.

Penelitian sejarah hukum dapat dibagi atas 2 (1) penelitian sejarah hukum dalam arti luas dan (2) penelitian sejarah hukum dalam arti sempit. Penelitian sejarah hukum dalam arti luas merupakan penelitian untuk memahami taraf-taraf perkembangan suatu sistem hukum (tata hukum) yang berlaku pada suatu masa tertentu. Sebagai suatu contoh, Soetandyo Wignjosoebroto melakukan penelitian terhadap taraf-taraf perkembangan sejarah hukum Indonesia sejak jaman kolonial hingga jaman nasional.¹⁶⁰

Penelitian sejarah hukum dalam arti sempit merupakan penelitian untuk memahami taraf-taraf perkembangan suatu perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu yang berlaku pada suatu masa tertentu. Umpamanya, penelitian tahap-tahap perkembangan lembaga kekuasaan kehakiman sejak jaman awal kemerdekaan hingga jaman sekarang.¹⁶¹ Dari penelitian sejarah lembaga kekuasaan kehakiman dapat diketahui banyak hal mengenai kekuasaan kehakiman Indonesia. Mulai tahap-tahap perkembangannya, konflik dengan cabang kekuasaan yang lain, problematik dan kendala yang dialami untuk menegakkan dirinya sebagai suatu cabang kekuasaan negara yang merdeka dan lain-lain sebagainya.

¹⁶⁰ Lihat Soetandyo Wigjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994.

¹⁶¹ Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.

BAB VI

PENELITIAN HUKUM EMPIRIS/SOSIOLOGIS

6.1. Pengertian Metode Penelitian Yuridis Empiris/Sosiologis

Penelitian hukum atau studi hukum dapat dibagi dalam dua cabang studi yaitu (a) hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi mengenai *law in books* dan (b) hukum dipelajari dan diteliti sebagai studi mengenai *law in action*.¹⁶² Studi mengenai "*law in books*" adalah studi terhadap hukum sebagai norma-norma undang-undang. Studi demikian disebut penelitian yuridis-normatif. Studi hukum sebagai *law in action* merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris.¹⁶³ Studi ini menyoroti hukum bukan sebagai norma-norma undang-undang tetapi hukum sebagai aspek kemasyarakatan. Studi ini disebut juga penelitian yuridis-sosiologis/empiris. Lili Rasjidi mengemukakan "Dalam metode penelitian hukum dikenal adanya dua bentuk penelitian hukum yaitu penelitian hukum yang normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris atau sosiologis."¹⁶⁴

Studi hukum sebagai aspek kemasyarakatan (penelitian hukum sosiologis/empiris) mulai dikembangkan pada pertengahan abad kedua puluh sebagai hasil interaksi Ilmu Hukum Dogmatik dengan disiplin ilmu sosial dengan menggunakan

¹⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Lili Rasjidi, *Merencanakan Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis (Socio Legal Research)*, Makalah Pada Penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se Indonesia, 12 – 17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992, hlm. 1.

pendekatan yuridis-sosiologis.¹⁶⁵ Pendekatan terhadap hukum dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis memandang hukum sebagai tidak otonom tetapi bagian dari masyarakat sehingga hukum bersangkut paut dengan aspek kemasyarakatan. Sebagai contoh, hukum dipandang sebagai berkaitan dengan kejahatan, kemiskinan dan sebagainya. Dengan perkataan lain, dalam kerangka berfikir penelitian hukum empiris (sosiologis), hukum ditempatkan sebagai suatu aspek social yang dalam kenyataan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi aspek-aspek kemasyarakatan lain seperti aspek agama, budaya, sosial-ekonomi dan sebagainya. Oleh sebab itu, kerangka berpikir penelitian hukum empiris (sosiologis) memiliki kesamaan dengan kerangka berfikir penelitian ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi. Dalam bahasa penelitian sosiologis dapat dikemukakan bahwa hukum adalah suatu variabel penelitian yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel lain sebagai variabel dependen (variabel terikat). Oleh sebab itu, Bagir Manan mengatakan "Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji korelasi antara hukum dengan lingkungan di tempat mana hukum itu berlaku."¹⁶⁶ Jadi, berbeda dengan penelitian hukum normatif, tujuan dilakukannya penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan pengetahuan ini akan dapat diketahui pula sejauh mana pengaruh hukum itu terhadap masyarakat dan sebaliknya.¹⁶⁷

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum PUSLITBANGKUM, Nomor Perdana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 4.

¹⁶⁷ Lili Rasjidi, *Perencanaan Penelitian Hukum*, *op. cit.*

Dalam studi hukum yang non-doktrinal, hukum diposisikan sebagai variabel penyebab (*independent variable*).¹⁶⁸ Studi hukum ini juga disebut studi tentang Hukum dan Masyarakat. Dalam studi hukum ini, hukum dipandang bukan lembaga sosial yang otonom yang tidak dipengaruhi atau mempengaruhi aspek-aspek kemasyarakatan yang lain. Akan tetapi, merupakan bagian dari masyarakat dapat mempengaruhi dan dipengaruhi aspek-aspek aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Bentuk (tipe) penelitian yuridis-empiris pada dasarnya berkenaan dengan identifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian tentang efektivitas hukum. Dalam hubungan ini, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis terdiri atas 2 (dua) macam tipe yaitu (1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan (2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁶⁹

Penelitian identifikasi hukum dapat dilakukan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum adat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu. Dalam hal ini, objek yang diteliti adalah perilaku-perilaku anggota masyarakat mengenai suatu hal tertentu seperti misalnya perilaku dalam hal perkawinan.

Masalaah pokok dalam penelitian efektivitas hukum sebagai suatu tipe penelitian hukum sosiologis adalah tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan tertentu mempengaruhi keadaan atau tingkah laku masyarakat.¹⁷⁰ Pengaruh suatu perundang-undangan atau hukum terhadap perilaku masyarakat tidak selalu bersifat positif dalam

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹⁷⁰ Bagir Manan, *Penelitian Terapan di Bidang Hukum*, Makalah pada lokakarya tentang Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, Nopember 1993, hlm. 15.

arti terjadi perubahan perilaku masyarakat seperti oleh peraturan perundang-undangan. Namun, juga dapat berbentuk pengaruh negatif yang tidak diharapkan dalam bentuk penolakan, pelanggaran atau penyimpangan perilaku. Penelitian hukum sosiologis menurut Bagir Manan adalah sangat penting dalam rangka :

1. Mengetahui efektifitas suatu peraturan perundang-undangan,
2. Mengetahui "tingkat eksekusi" yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan,
3. Mengetahui persepsi masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan (menolak, menerima atau acuh tak acuh).¹⁷¹

6.2..Kerangka Teoretis dan Kerangka Konsepsional serta Definisi Operasional

Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, kegiatan penelitian dimulai dari penyusunan kerangka teori. Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis.¹⁷² Pemikiran-pemikiran teoretis ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu penelitian. Kerangka teori adalah titik tolak peneliti dalam melakukan penelitian. Kerangka teori adalah landasan teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Bahkan, menurut Soerjono Soekanto, teori atau kerangka teoretis mempunyai beberapa kegunaan seperti umpamanya untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.¹⁷³ Di samping itu, teori juga sangat berguna untuk

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 41.

¹⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi dan lain-lain sebagainya.¹⁷⁴

Sebagai contoh dapat dilakukan melakukan penelitian yuridis sosiologis/empiris dalam bidang hukum perburuhan. Dalam hal ini, variabel penelitian adalah hukum perburuhan dan kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, kemudian disusun kerangka teori tentang hukum perburuhan dan kesejahteraan buruh sebagai berikut “Hukum Perburuhan dan Kesejahteraan Buruh.” Namun, dalam hal ini penelitian belum dapat dilaksanakan karena kedua variabel penelitian masih sangat abstrak karena kedua variabel belum dapat diukur atau dinyatakan dengan angka-angka. Dalam penelitian hukum empiris/sosiologis, semua variabel (gejala) yang diteliti harus dapat diukur atau dinyatakan dengan bilangan. Variabel “Hukum Perburuhan dan Kesejahteraan Buruh” di atas belum dapat diukur sehingga kedua variabel tersebut harus dibuat lebih konkrit supaya penelitian dapat dilaksanakan. Kerangka teori yang masih sangat abstrak tersebut harus dijabarkan atau dirumuskan dalam bentuk yang lebih konkrit supaya penelitian dapat dilaksanakan. Rumusan kerangka teori yang lebih konkrit dirumuskan dalam bentuk kerangka konseptual.

Apa yang dimaksud dengan Kerangka Konseptual suatu penelitian? Soerjono Soekanto mengemukakan “Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹⁷⁵ Kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 132.

masalah yang kita teliti.¹⁷⁶ Kerangka konsepsional tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti.¹⁷⁷ Pada dasarnya, kerangka teoretis dan kerangka konsepsional adalah sama. Keduanya sebagaimana dikemukakan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti meskipun pada tingkatan abstraksi yang berbeda. Kerangka teoretis merupakan teori yang kita buat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan kita teliti.¹⁷⁸ Konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka teoretis lebih abstrak dari konsep-konsep yang dipakai dalam kerangka konsepsional.¹⁷⁹

Variabel Hukum Perburuhan dan Kesejahteraan Buruh dibuat menjadi kerangka konsepsional yang lebih konkrit yakni “Ketentuan Pembatasan Upah Minimum Regional dan Kemampuan Buruh Untuk Menyekolahkan Anaknya.” Andaikata, kedua variabel dalam kerangka konsepsional di atas dianggap masih belum dapat diukur, penelitian belum dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kerangka konsepsional tersebut harus dibuat lebih konkrit supaya dapat diukur. Oleh sebab itu, kerangka konsepsional tersebut harus dibuat menjadi “Definisi Operasional.”

Definisi operasional merupakan tingkatan terakhir dari penjabaran kerangka teori. Artinya, definisi operasional harus merupakan definisi yang menggambarkan variabel-variabel yang sudah terukur atau dapat dinyatakan dengan angka-angka. Dengan demikian, jika sudah sampai pada tahap definisi operasional sesungguhnya penelitian

¹⁷⁶ Rianto Adi, *Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 29.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

sudah dapat dilaksanakan karena yang hendak diukur sudah jelas. Maka, definisi operasional kedua variable yang hendak diukur seperti di atas diubah menjadi variabel "Gaji Buruh Per Bulan dan Jumlah Biaya Sekolah Anak Per Bulan."

Kedua variable tersebut sudah dapat diukur atau dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Oleh sebab itu, pada dasarnya sudah dapat dilaksanakan penelitian. Akan tetapi, harus ditentukan populasinya atau buruh yang dimaksud dalam penelitian. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah buruh yang bekerja di Kabupaten Bekasi. Namun, karena jumlah buruh di Kabupaten Bekasi banyak sehingga tidak mungkin dapat diteliti seluruh buruh tersebut. Maka, cukup meneliti sebagian buruh saja. Buruh yang diteliti disebut sampel. Sebelum buruh yang menjadi sampel diteliti sebagai sumber data, terlebih dahulu harus dipersiapkan segala sesuatu peralatan penelitian dibutuhkan seperti daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan atau alat-alat untuk melakukan wawancara dan sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan, penelitian hukum empiris/sosiologis mengikuti kerangka berfikir dan metode kerja yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, pada dasarnya ada 3 (tiga) macam bentuk penelitian yaitu (1) Penelitian Deskriptif, (2) Penelitian Komparatif dan (3) Penelitian Asosiatif yang terdiri atas (3.1. Penelitian Korelasi), (3.2.) Penelitian Kausal (Penelitian Hubungan Sebab-Akibat) dan (3.3.) Penelitian Interaktif (Penelitian Hubungan Sebab-Akibat/Akibat-Sebab).

Dalam contoh penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian mengenai tingkat upah buruh dan kemampuan untuk menyekolahkan anak dapat dilakukan dalam 3 (tiga) macam bentuk penelitian yang dikemukakan di atas. Dalam hal penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat deskriptif, tujuannya adalah untuk memaparkan

seberapa besar upah yang diterima rata-rata buruh di Bekasi dan seberapa besar jumlah uang yang dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Dalam hal penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat komparatif, tujuannya adalah untuk memperbandingkan besar upah buruh di Bekasi dan Tangerang dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Dalam penelitian hukum empiris/sosiologis yang bersifat asosiatif, tujuannya adalah untuk melihat ada tidaknya hubungan antara besar upah buruh di Bekasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

6.3. Hipotesa

Jika peneliti sudah menetapkan judul penelitian, masalah penelitian, kerangka teori (kerangka konseptual dan definisi operasional), sekarang peneliti harus menetapkan hipotesa. Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesa masih perlu diuji kebenarannya secara empiris dengan data yang diperoleh dari data lapangan. Ada 2 (dua) kemungkinan berkenaan dengan pengujian hipotesa. Jika hipotesa terbukti kebenarannya, hipotesa berubah menjadi tesis. Dalam hal hipotesa tidak terbukti kebenarannya berarti hipotesa harus dirumuskan kembali supaya lebih baik. Proses pengujian hipotesa disebut proses verifikasi.

Apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesa? Jawabannya tentu saja tidak karena penelitian eksploratif tidak hipotesa. Sebab, penelitian eksploratif masih bersifat penelitian pendahuluan. Demikian juga dengan penelitian deskriptif tidak perlu hipotesa. Namun, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto, hipotesa harus ada jika tujuan

penelitian untuk menguji hubungan sebab-akibat antara gejala-gejala tertentu.¹⁸⁰ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua penelitian mempunyai hipotesa. Jadi, hipotesa hanya ditemukan pada tipologi penelitian yang bertujuan menguji hubungan 2 (dua) gejala atau lebih.

Bagaimana dengan penelitian hukum? Untuk penelitian hukum dengan tipologi penelitian yuridis-normatif (doktriner), hipotesa jelas tidak diperlukan. Namun, bagaimana dengan penelitian hukum dengan tipologi penelitian yuridis-empiris/sosiologis? Apakah hipotesa harus ada dalam penelitian hukum dengan tipologi penelitian yuridis-empiris/sosiologis? Sebagaimana dikemukakan di atas, hipotesa diperlukan dalam penelitian yuridis-empiris/sosiologi jika penelitian hukum juga bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara gejala hukum dengan gejala kemasyarakatan yang lain. Apakah yang dimaksud dengan hipotesa? Hipotesa sebenarnya merupakan jawaban sementara atau kesimpulan sementara dari masalah penelitian.¹⁸¹ Setiap hipotesa pada hakikatnya adalah mengungkapkan suatu hubungan atau pertalian antara dua atau lebih gejala (konsep/variable).

Ada 2 (dua) jenis hipotesa yang biasa dirumuskan peneliti yaitu (1) Hipotesa kerja dan (2) Hipotesa Nol. Hipotesa kerja (biasa disingkat dengan H_a) adalah hipotesa yang menyatakan hubungan atau pertalian atau perbedaan antara suatu variabel dengan variabel yang lain. Contoh hipotesis kerja antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jika harga barang naik, permintaan akan barang tersebut menurun,
2. Ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal rata-rata gaji yang diterima,

¹⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 147.

¹⁸¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian*, *op. cit.*, hlm. 25.

3. Ada pengaruh pembukaan jalan desa terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat desa tersebut,

4. Makin lama bekerja di luar negeri, makin besar investasi yang dilakukan tenaga kerja yang bersangkutan.

Hipotesa Nol (biasa disingkat dengan H_0) adalah hipotesa yang berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesa kerja. Jika hipotesa kerja menyatakan ada hubungan, perbedaan atau pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lain, hipotesa nol menyangkal hal itu atau menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan atau pertalian atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Contoh hipotesa Nol adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan harga barang dan permintaan atas barang tersebut tidak ada hubungan,
2. Tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dalam hal penerimaan gaji,
3. Tidak ada pengaruh pembukaan jalan desa terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat desa tersebut,
4. Lama waktu bekerja di luar negeri tidak ada pengaruhnya terhadap investasi yang dilakukan oleh tenaga kerja yang bersangkutan.

Hipotesis kerja biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat sebagai berikut ” (1). Jika, maka (Jika orang makan banyak, maka berat badannya akan naik). (2). Ada perbedaan antara dan dalam hal (Ada perbedaan antara penduduk kota dan desa dalam hal cara penggunaan waktu luang). (3). Ada pengaruh Terhadap (Ada pengaruh pembukaan jalan X terhadap perkembangan ekonomi desa Y).

Hipotesa Nol (Hipotesis penguji hipotesis kerja) biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat sebagai berikut (1) Tidak ada pengaruh makan banyak dengan berat badan), (2) Tidak ada perbedaan antara ... dengan dalam hal) (Tidak ada perbedaan antara penduduk desa dengan penduduk kota dalam hal penggunaan waktu luang). (3) Tidak ada pengaruh Terhadap (Tidak ada pengaruh jarak rumah dengan kampus terhadap kerajinan mengikuti kuliah).

6.3. Variabel

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, penelitian yuridis-empiris/sosiologis mengikuti kerangka berfikir, metode ilmiah dan cara kerja ilmu-ilmu sosial. Dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, semua gejala yang diamati atau diteliti harus dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Maka, sebagai pengaruh ilmu-ilmu sosial tersebut, semua gejala yang diteliti dalam penelitian yuridis-empiris/sosiologis juga harus dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Jika suatu konsep sebagai bentuk abstraksi dari suatu gejala tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan angka dengan sendirinya konsep tersebut harus dibuat supaya konkrit sampai pada tingkatan yang dapat diukur atau dinyatakan dengan angka-angka. Proses konkritisasi konsep supaya dapat diukur sudah dibicarakan dalam pembahasan kerangka teori, kerangka konseptual dan definisi operasional.

Jika konsep sebagai abstraksi suatu gejala sudah sampai pada tingkatan yang dapat diukur, konsep itu dinyatakan sebagai variabel. Dengan perkataan lain, variabel adalah konsep yang bisa diukur atau bisa dinilai.¹⁸² Umpamanya, konsep status social-

¹⁸² Rianto Adi, *op. cit.*, hlm. 39 pada catatan kaki.

ekonomi adalah konsep abstrak sehingga belum dapat diukur. Oleh karena itu, konsep ini harus dibuat menjadi variabel supaya dapat diukur. Maka, konsep status sosial ekonomi harus diubah menjadi variabel-variabel (1) Pendidikan, (2) Pekerjaan, (3) Penghasilan dan (4) Kekayaan.

6.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau kejadian yang akan diteliti. Populasi biasanya terdapat dalam jumlah yang sangat besar atau sangat banyak sehingga sering tidak mungkin diteliti seluruhnya. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian tidak perlu segenap populasi diteliti. Namun, cukup dengan meneliti sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Bagian dari populasi yang diteliti disebut *sample* (populasi terjangkau). Umpamanya, untuk meneliti sekarung beras cukup diambil segenggam beras sebagai wakil (*sample*). Untuk mengetahui ketentuan tentang pencatatan perkawinan dilaksanakan atau tidak secara efektif di Indramayu tidak perlu diteliti segenap warga Kabupaten Indramayu. Cukup diambil *sample* yang dianggap dapat mewakili warga Kabupaten Indramayu. Ada beberapa cara dan teknik pengambilan *sample* yang dianggap benar seperti teknik *Random*, *purposive* dan sebagainya.

6.6. Teknik Pengumpulan Data

Bagaimana cara mengumpulkan data penelitian? Pada dasarnya, teknik pengumpulan data penelitian dapat dilakukan dengan 2 (dua) macam cara yaitu (1) Studi Kepustakaan dan (2) Studi Lapangan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang mengumpulkan data sekunder atau data yang sudah didokumentasikan. Studi lapangan

adalah kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan atau mengumpulkan data primer secara langsung dari masyarakat (lapangan).

6.5. Teknik Analisis/Penafsiran Data

Bagaimana cara menganalisis atau menafsirkan data yang sudah dikumpulkan dalam suatu penelitian? Dalam garis besarnya, analisis data dapat dibedakan atas:

1. Analisis Kualitatif dan

2. Analisis Kuantitatif (Analisis statistika) yang terdiri atas :

2.1. Analisis Statistika Deskriptif dan

2.2. Analisis Statistika Induktif.

Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data kualitatif yaitu data yang tidak dapat dihitung atau dinyatakan dengan angka-angka seperti kasus sehingga objek penelitian harus dipelajari secara utuh. Data yang dianalisis misalnya bersifat deskriptif seperti hasil wawancara, potret, dokumen pribadi, dokumen perorangan dan lain-lain. Analisis kualitatif dapat dilakukan terhadap responden yang sedikit sehingga analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika.

Analisa Statistika Deskriptif dipakai untuk menganalisis data yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa ada hipotesa. Dalam analisa statistik deskriptif, data yang diperoleh ditata dalam diagram, dibuat tabulasi frekuensi, dihitung ukuran pemusatan data (modus, median dan mean) atau ukuran penyebaran data untuk setiap kelas yang dibuat (*range, variance, standard deviasi*).

Analisa Data Statistika Induktif bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data yang ada dalam suatu bagian dari

populasi tersebut. Tujuan penelitiannya dituangkan dalam hipotesa-hipotesa yang selanjutnya hendak diuji kebenarannya dengan statistika. Kesimpulan dari suatu penelitian dimaksudkan untuk berlaku bagi keseluruhan populasi berdasarkan data *sample* yang diteliti. Umpamanya, jika hendak meneliti 20 karung beras cukup diambil segenggam beras dari salah satu karung. Jika hendak melakukan uji statistika induktif, kesimpulan yang berlaku umum dapat ditarik dan berlaku terhadap kedua puluh karung beras berdasarkan *sample* yang diuji yakni segenggam beras. Oleh karena itu, dalam pengujian data statistika induktif lazimnya dilakukan pengukuran-pengukuran berdasarkan aturan-aturan yang sudah dibakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku

- Sabine, G.H. *Teori-teori Politik, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*, terjemahan Soewarno Hadiatmodjo, (Jakarta, 1977).
- J.H.Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavelli*, (Jakarta, 2001),
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, 1990),
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta, 2002),
- C.Verhaak dan R. Haryono Iman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Gramedia, (Jakarta, 1989),
- Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Alih Bahasa : Arief B.Sidharta, (Bandung, 2003),
- Arief B.Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung, 1999),
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih Bahasa : Arief B.Sidharta (Bandung, 1996),
- Beerling, Kwee, Mooij, Van Veursen, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Alih bahasa Soemargono (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2002),
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, 2001),
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta, 2002),
- Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung, 1993),
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, 1990)
- F.Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas, Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta, 2003),
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Alih Bahasa : Somadi, (Jakarta, 1995),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, 2001),
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta, 2004)

Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung, 1993),

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, 1991)

Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, (Bandung, 1993)

Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Bandung, Citra Adhitya Bhakti, 1995.

B.Makalah, Jurnal dan Diktat

Soetandyo Wignjosoebroto, "Penggunaan Metode Penelitian Menurut Tradisi Sains Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial, Sebuah Perbincangan tentang Masalah Teknis Operasional," (Makalah, tanpa tahun),

Sunarjati Hartono, "Kembali ke Metode Penelitian Hukum," (Makalah yang disampaikan pada penataran Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia, 12-17 Januari, Cisarua, Bogor, 1992),

Sidharta, "Mencari Alternatif Paradigma Penalaran Hukum Untuk Kepentingan Pembangunan Hukum Indonesia," (Makalah yang disampaikan pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional, Jakarta, 2004),

D.H.M. Meuwissen, "Ilmu Hukum," *Pro Justitia*, Tahun XII, Nomor 4, (Oktober, 1994),

Soetandyo Wognjosobroto, "*Metodologi Penelitian Dalam Ilmu Hukum Yang Normatif (The Jurisprudence)*," (Bahan Kuliah Methodologi Penelitian Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas PELITA HARAPAN, Jakarta), 2005, hlm. 1

D.H.M.Meuwissen, "Ilmu Hukum," (Alih Bahasa : B. Arief Sidharta), Jurnal Ilmiah, PRO JUSTITIA, Bandung, Tahun XII, Nomor 4 Oktober, 1994,

Ali Mudhofir, "Landasan Ontologis Ilmu Pengetahuan," (Makalah pada penataran dosen-dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 1998),

Tim Pengajar PIH , "Pengantar Ilmu Hukum," (Diktat Kuliah, Fakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 1995